

**PENGEMBANGAN SEKOLAH KEJURUAN
BERBASIS POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH
DI KABUPATEN BREBES**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota

Oleh :

ISKANDAR MIRZA
L4D006083



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

LEMBAR PENGESAHAN
PENGEMBANGAN SEKOLAH KEJURUAN
BERBASIS POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH
DI KABUPATEN BREBES

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

Iskandar Mirza
L4D006083

Diajukan Pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal, Desember 2008

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Desember 2008

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

Okto R. Manullang, ST,MT

Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan telah selesainya penyusunan Tesis ini maka dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang yang saya ketahui judul dan isi Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali daftar pustaka dimungkinkan ada kesamaan dipakai juga oleh orang lain. Apabila ternyata dalam Tesis ini terdapat duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain, maka dengan penuh rasa tanggung jawab saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan dan bersedia dicopot gelar Magister Teknik saya.

Semarang Desember 2008

ISKANDAR MIRZA
NIM. L4D006083

" *Dadio wong pinter, mung ojo minteri* "

" *Yen Dadi wong bodo, mung ojo mbodoni* "

Jadilah orang pandai, tetapi jangan
menggurui/sombong atas kepandaiannya
Jikalau jadi orang bodoh, tetapi
jangan *membodohi*/membohongi/sok pandai

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Istri Tercinta Susmiyati, SPd, Atas Dorongan dan Segala Pengorbanannya.
Anak-anakku Yang Aku Sayangi,
Arrahmi Eman Prihastari, Faozan Eman Dwijanto dan Rizka Eman
Yulistianti
Dengan penuh limpahan rahmat kebahagiaan dan pengertian serta
kesabaran.
Ibunda dan Saudara-saudaraku, atas Doa dan Restunya.
Sahabat, Rekan Semua, berkat dukungan moral dan spirit.

ABSTRAKSI

Potensi wilayah yang dimiliki suatu daerah merupakan modal dasar pelaksanaan pembangunan daerah pada era otonomi. Upaya dilakukan melalui kebijakan pengembangan potensi berupa penyediaan sarana dan prasarana pembangunan termasuk diantaranya penyediaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), yang memiliki tingkat keahlian yang signifikan yaitu dengan penyediaan lulusan sekolah yang memiliki keahlian melalui sekolah kejuruan. Kondisi sekolah kejuruan saat ini masih kurang memadai, baik kualitas, kuantitas maupun relevansinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tentang pengembangan sekolah kejuruan berbasis pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Brebes. Potensi sumber daya alam cukup besar, memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, jumlah penduduk tersebut merupakan potensi SDM. Seiring dengan kondisi tersebut pemerintah menerapkan kebijakan pengembangan potensi wilayah yang sinergis dengan peningkatan mutu SDM, sehingga masyarakat dapat terkonsentrasi pada aktivitas pengolahan potensi sumber daya alam yang ada. Dari dasar latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah ; Bagaimanakah tingkat potensi wilayah untuk pengembangan sekolah kejuruan di Kabupaten Brebes ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menetapkan jenis dan lokasi wilayah yang memenuhi kelayakan bagi pengembangan sekolah kejuruan di Kabupaten Brebes.

Sasaran yang hendak dicapai adalah ; Mengidentifikasi potensi, kondisi dan masalah kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan kejuruan, kekuatan ekonomi wilayah dan kebutuhan angkatan kerja, menganalisis keseluruhan hasil identifikasi tersebut di atas sebagai dasar kelayakan penetapan lokasi dan jenis sekolah kejuruan yang akan dikembangkan.

Analisis data, dengan metode yang digunakan adalah diskriptif analisis kualitatif, menggunakan prinsip komponen analisis, merupakan reduksi data primer pendidikan dan data sekunder pendidikan. Metode yang dipakai untuk analisis pengembangan potensi wilayah adalah dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ), pada analisis potensi pendidikan analisis yang digunakan adalah Principal Component Analysis (PCA) dengan alat Software Statistik Minitab. Nilai skor kedua potensi tersebut dilakukan urutan prioritas kebutuhan sekolah kejuruan, Hasil temuan diperoleh adalah nilai kebutuhan terendah yaitu merupakan prioritas dibangunnya sekolah kejuruan baru dengan program jurusan yang sesuai dengan pengembangan potensi wilayah.

Hasil penelitian disimpulkan dan direkomendasikan untuk dipakai sebagai dasar penetapan kebijakan program pembangunan bidang pendidikan selanjutnya dalam upaya peningkatan SDM yang sesuai dengan program pengembangan potensi wilayah melalui sekolah kejuruan.

Kata Kunci Sekolah Kejuruan, Potensi Wilayah, Lokasi Sekolah.

ABSTRACT

Potential area of the capital region is a basic implementation of regional development in the era autonomy. Efforts made through policy development potential of the form providing facilities and infrastructure development including the provision and improvement of human resources (HR), which has a significant level of expertise, namely the provision of school graduates who have skills through vocational school. Now, conditional of vocational schools still inadequate, the quality, quantity and relevance.

The goal of this research is to analyze the development of vocational school-based development potential in the region Brebes regency. The potential of natural resources is quite large, has a population of a large number of residents is a potential human resources. Along with the conditions the government implement the policy of the synergistic potential of the region to improve the quality of human resources, so that people can concentrate on the activities of potential natural resources that exist. From the basic background to the formulation of the problem is, how high potential areas for the development of vocational schools in Brebes regency? To answer the question that the goal be achieved in this research is to set the type and location of areas that meet the eligibility for the development of vocational schools in Brebes regency.

Achieving aim is; Identifying potential, the conditions and needs of the community of vocational education, economic strength and the needs of the workforce, the full identification of the above as a basis for determining the feasibility of the location and types of vocational schools that will be developed.

Analysis of the data, the method used is discriptive qualitative analysis, using principle component of analysis, data reduction is the primary education and secondary education. Method used for analysis of potential development area is to use the analysis Location Quotient (LQ), the analysis of the potential of education is the analysis used Principal Component Analysis (PCA) with the Minitab Statistical Software tools. Score the potential value of the second order was the priority needs of vocational schools, of the findings is the lowest value of the needs is a priority in building a new vocational school program with the department in accordance with the potential development area.

Results concluded the research and recommendations to be used as a basis for the determination of the policy areas of education development program in an effort to further increase human resources in accordance with the development of potential areas through vocational school.

Keywords : Vocational School, Potential Region, School location.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, kami telah dapat menyelesaikan Tesis dengan sebaik-baiknya, dengan judul : "*Pengembangan Sekolah Kejuruan Berbasis Potensi Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Brebes*".

Tema tersebut diambil dengan pertimbangan :

1. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan yang belum maksimal, sehingga kebutuhan penyediaan fasilitas/prasarana pendidikan belum seimbang dengan pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah serta seiring dengan pengembangan potensi wilayah.
2. Sekolah Menengah Kejuruan belum efisien dan efektif, baik dari segi penyelenggaraannya, program jurusan dan pemerataan.
3. Pembangunan Unit Sekolah Baru belum memenuhi standard kewilayah/terkesan pembangunan tanpa pertimbangan masa depan.

Pengembangan potensi wilayah dan kependudukan tidak terpisahkan dengan pengembangan sekolah kejuruan. Sehingga diharapkan dengan penelitian ini hasilnya dapat digunakan sebagai pedoman menentukan lokasi pada sekolah kejuruan sesuai dengan pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Brebes.

Tersusunnya Tesis ini adalah merupakan hasil dari motivasi, kerjasama, bimbingan dari dosen mata kuliah, mentor dan comentor serta dosen penguji. Untuk itu ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada :

1. Dr. Ir. Joesron Ali Syahbana, MSc, Ketua Program Studi Magister Teknik Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP, pembimbing utama dan Okto R. Manullang, ST.MT, pembimbing pendamping, dengan sabar memberikan bimbingan sampai selesainya penyusunan Tesis.
3. Prof. Dr. Sugiono Soetomo, CES, DEA, Penguji sidang Tesis atas saran, kritik dan koreksi untuk kesempurnaan Tesis ini.
4. Bupati dan Wakil Bupati, seluruh pejabat pemerintahan Kabupaten Brebes dan jajarannya atas dukungan, selama kuliah sampai lulus.
5. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Teknik Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang atas motivasinya.
6. Semua pihak telah membantu penyelesaian penyusunan Tesis ini.

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan, maka Tesis ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran diperlukan untuk kelanjutan dalam penelitian ini.

Akhirnya dengan penelitian yang baik, menghasilkan karya ilmiah yang baik sehingga bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik dengan tulisan ini

Semarang, Januari 2009
Penulis

Iskandar Mirza
NIM. L4D006083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Sasaran Penelitian	7
1.3.3 Manfaat Penelitian	7
1.4 Ruang Lingkup	7
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah	7
1.4.2 Ruang Lingkup Subtansial.....	9
1.5 Posisi Penelitian	9
1.6 Kerangka Pikir	10
1.7 Metodologi Penelitian	13
1.7.1. Obyek Penelitian	13
1.7.2. Data dan Sumber Data	14
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data	15
1.7.4. Teknik Pengambilan Sampel	16
1.7.5. Instrumen Penelitian	19
1.7.6. Analisis Dan Penafsiran Data	21
1.7.7. Metode	22
1.7.7.1 Metode Analisis Locationb Quotion (LQ)	22
1.7.7.2 Metoder Principal Component Analisis (PCA)	23
1.7.8. Proses dan Teknik Analisis	24
1.7.8.1. Analisis Potensi Wilayah	24
1.7.8.2. Analisis Potensi Pendidikan.....	25
1.7.8.3. Analisis Potensi Sekolah Kejuruan	26
1.7.8.4 Analisis Potensi Sekolah Kejuruan Berbasis Potensi Wilayah	28
1.8 Sistematika Pembahasan	30

BAB II PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH	32
2.1 Pengembangan Wilayah	32
2.1.1 Tata Guna Lahan	35
2.1.2 Pengertian Pengartian Kota	38
2.1.3 Teori Lokasi	40
2.2 Pengembangan Sekolah	41
2.2.1 Pengertian Pendidikan	42
2.2.2 Teori Pendidikan	43
2.2.3 Konsep Pendidikan	44
2.2.4 Pengembangan Pendidikan	46
2.2.5 Pengembangan Pendidikan Kejuruan	48
2.3. Hubungan Antara Pengembangan Wilayah Dan Pendidikan.	43
2.4 Rangkuman	50
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI WILAWAH KABUPATEN BREBES	55
3.1 Potensi Wilayah Kabupaten Brebes	55
3.2 Potensi Wilayah	55
3.2.1. Potensi Ekonomi	56
3.2.1.1 Pertanian	56
3.2.1.2 Pertambangan Dan Penggalian	59
3.2.1.3 Industri Pengolahan	59
3.2.1.4 ListrikGas Dan Air	62
3.2.1.5 Bangunan	62
3.2.1.6 Perdagangan Restoran Dan Hotel	62
3.2.1.7 Pengangkutan Dan Komunikasi	64
3.2.1.8 Keuangan Persewaan Dan Jasa Perusahaan ...	65
3.2.1.9 Jasa-Jasa	65
3.2.2. Potensi Tenaga Kerja	67
3.2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia	67
3.2.2.2 Angkatan Kerja	70
3.3 Kondisi Pendidikan	71
3.3.1. Kondisi Sekolah	71
3.3.2. Kondisi Sekolah Kejuruan	72
3.3.3. Kebutuhan Sekolah Kejuruan	78
3.4 Landasan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	79
3.4.1 UU Nomor 20 Tahun 2003	79
3.4.2 Renstra Depdiknas	81
BAB IV ANALISIS PENGEMBANGAN SEKOLAH KEJURUAN BERBASIS PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH	83
4.1 Analisis Potensi Wilayah	83
4.1.1 Analisis Potensi Ekonomi	87
4.1.1.1 Potensi Pertanian	90
4.1.1.2 Potensi Perdagangan, Restoran dan Hotel ...	92

4.1.1.3	Potensi Industri Pengolahan	93
4.1.1.4	Jasa – Jasa Lain	95
4.1.1.5	Temuan Analisis Potensi Wilayah	95
4.1.2	Tenaga Kerja	99
4.1.2.1	Kependudukan	99
4.1.2.2	Angkatan Kerja	105
4.2	Analisis Kondisi Pendidikan Dan Kebutuhan Pendidikan ...	108
4.2.1	Analisis Kondisi Pendidikan	108
4.2.2	Analisis Kebutuhan Pendidikan	114
4.2.3	Analisis Kebutuhan Sekolah Kejuruan	115
4.3	Lokasi Sekolah Kejuruan	143
4.4	Temuan Studi	144
BAB V	PENUTUP	127
5.1	Kesimpulan	127
5.2	Rekomendasi	129
5.3	Batas Penelitian	130
DAFTAR PUSTAKA	131
DAFTAR LAMPIRAN	134

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Jumlah Sampel Penelitian Stakeholder	19
TABEL I.2	Jumlah Sampel Penelitian Calon Peserta Didik	19
TABEL II.1	Landasan Teori Dan Landasan Operasional	52
TABEL III.1	Sentra Pengembangan lahan Di Kabupaten Brebes	56
TABEL III.2	Potensi Kelompok Industri Dan Nilai Produksi Di Kabupaten Brebes 2007	59
TABEL III.3.	Jumlah Penduduk Keseluruhan Dan Jumlah Penduduk Menurut Usia Di Kabupaten Brebes	68
TABEL III.4	Kondisi Penduduk Dan Pendidikan Di Kabupaten Brebes .	70
TABEL III.5	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Brebes Tahun 2006	71
TABEL III.6	Data Pokok SMA, MA dan SMK Tahun 2007	72
TABEL III.7	Jumlah Siswa Menurut Kelompok Tahun 2007	75
TABEL IV.1	Potensi Wilayah Menurut SWP	86
TABEL IV.2	Distribusi Persentase Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku	88
TABEL IV.3	Distribusi Persentase Menurut SWP Di Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku	89
TABEL IV.4	Distribusi Persentase Menurut SWP Dan Sektor Di Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku	90
TABEL IV.5	Sentra Pengembangan Lahan Di Kabupaten Brebes	92
TABEL IV.6	Analisis Potensi Wilayah Dengan Menggunakan Perhitungan LQ	96
TABEL IV.7	Tingkat potensi Ekonomi Dengan Kriteria Basis Hasil Analisis LQ	98
TABEL IV.8	Jumlah Penduduk Keseluruhan dan Jumlah Penduduk Menurut Usia Kabupaten Brebes Tahun 2007	100
TABEL IV.9	Bilangan Pengali Sprange Usia 16-18	100
TABEL IV.10	Hasil Pemecahan Usia 16-18 Tahun 2007	101

TABEL IV.11	Hasil Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2008-2012	103
TABEL IV.12	Proyeksi Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun 2008-2012..	104
TABEL IV.13	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Brebes Tahun 2007	106
TABEL IV.14	Jumlah Sekolah, Kelas, Guru, Siswa, Siswa Usia 16-18 SMA/MA dan SMK Di Kabupaten Brebes Tahun 2007	110
TABEL IV.15	Indikator Pemerataan Pendidikan SMA/MA dan SMK Menurut SWP Di Kabupaten Brebes Tahun 2007.....	110
TABEL IV.16	Rasio Siswa Per Sekolah, Kelas, Guru, Siswa Baru, Dan APK Jenjang Pendidikan Menengah Umum Tahun 2007.....	114
TABEL IV.17	Potensi Wilayah Menurut SWP Dan Prioritas Pengembangan SMK	117
TABEL IV.18	Indikator Pemerataan Pendidikan Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Brebes Tahun 2007	118
TABEL IV.19	Nilai Skor PCA 1 Untuk Masing-masing Kecamatan	120
TABEL IV.20	Temuan Studi	124

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Kerangka Pikir	12
GAMBAR 1.2 Kerangka Analisisr.....	29
GAMBAR 3.1 Peta Produksi Perikanan Tambak Di Kabupaten Brebes	58
GAMBAR 3.2 Peta Kontribusi Tiap Sektor Terhadap PDRB	61
GAMBAR 3.3 Peta Pembagian Wilayah Pengembangan Di Kabupaten Brebes	66
GAMBAR 3.4 Peta Jumlah Penduduk Per Kecamatan	69
GAMBAR 3.5 Peta Sebaran SMK Di Kabupaten Brebes	74
GAMBAR 3.6 Peta Persentase Siswa SMK Menurut Kelompok Pendidikan Di Kabupaten Brebes	77
GAMBAR 4.1 Peta Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Berdasar Harga Konstan	94
GAMBAR 4.2 Peta Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Brebes	107
GAMBAR 4.3 Peta APM SMK Kabupaten Brebes	112
GAMBAR 4.4 APK SMK Kabupaten Brebes	113

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Kuesioner Penelitian	123
LAMPIRAN 2 : Kisi-kisi Survey	124
LAMPIRAN 3 : Kisi-kisi Wawancara	125
LAMPIRAN 4 : Kisi-kisi Dokumentasi	128
LAMPIRAN 5 : Angket Kuesioner	129
LAMPIRAN 6 : Lembar Asistensi	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah melalui peningkatan mutu pendidikan. Sejalan dengan perubahan lingkungan pendidikan dan dunia usaha saat ini maka diperlukan profesionalisme di segala bidang termasuk dunia pendidikan.

Memperhatikan arti pentingnya pendidikan sebagai sarana pembentuk sumber daya manusia yang berkualitas maka Negara melalui UUD 1945 pasal 31 telah mengamanatkan suatu sistem pendidikan nasional, di mana sistem pendidikan nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Pendidikan merupakan faktor yang secara signifikan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), oleh karena itu pembangunan pendidikan memerlukan perencanaan yang komprehensif dengan melibatkan indikator-indikator ekonomi, kependudukan, kependidikan maupun potensi sumber daya alam. Sejalan dengan hal itu, strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia diarahkan pada kemampuan kecakapan/keterampilan hidup (*life skill*) para peserta didik. Pendidikan kecakapan hidup ini sangat relevan dengan pengembangan pendidikan kejuruan.

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. (UU Sisdiknas No: 20. 2003). Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu sub sistem dari sistem pendidikan

nasional dengan tugas utamanya adalah mempersiapkan lulusannya memasuki dunia kerja, mengisi keperluan tenaga terampil tingkat menengah. Dipertegas melalui PP 29 tahun 1990 Pasal 1 ayat 3 bahwa, Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.

Dengan sekolah kejuruan diharapkan dapat menyiapkan peserta didik menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang mampu meningkatkan kualitas hidup, mampu mengembangkan dirinya, dan memiliki keahlian dan keberanian membuka peluang meningkatkan penghasilan, sedangkan tujuan penyelenggaraan pendidikan kejuruan adalah:

1. Menyiapkan siswa menjadi tenaga produktif.
 - Memenuhi keperluan tenaga kerja dunia usaha dan industri.
 - Menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan bagi orang lain.
 - Merubah status siswa dari ketergantungan menjadi masyarakat yang berpenghasilan (produktif).
2. Menyiapkan siswa yang menguasai iptek, sehingga mampu mengikuti, menguasai, dan menyesuaikan diri dengan kemajuan iptek. (UU RI. Nomor 22, 1999), disempurnakan (UU Pemerintah Daerah Nomor 32, 2004).

Pendidikan kejuruan pada tingkat sekolah menengah dilakukan melalui jalur sekolah kejuruan. Beberapa tahun yang lalu pengembangan SMK kurang mendapat perhatian yang serius, hal ini dapat dilihat dari perbandingan keberadaan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang masih jauh lebih banyak jika

dibandingkan dengan keberadaan sekolah kejuruan (SMK). Jika melihat kenyataan di lapangan, keberadaan tenaga kerja yang memiliki ijazah lulusan SMA ternyata jauh lebih banyak dibandingkan dengan lulusan SMK, padahal semestinya lulusan SMA dididik berdasarkan kurikulum yang dikondisikan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. Melihat kondisi tersebut perlu adanya pengembangan sekolah kejuruan baik secara kualitas maupun kuantitas dengan target perbandingan perimbangan sekolah kejuruan (SMK) banding sekolah umum (SMA/MA) mencapai rasio 70:30.

Pengelolaan sekolah kejuruan di Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2007 tercatat 37 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 11.195. Dari 37 sekolah terbagi menjadi 6 program keahlian yaitu; Pertanian dan Kehutanan, Teknologi Industri/Otomotif, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Kesehatan dan Kelautan. Diantara program keahlian yang ada ternyata yang paling banyak diminati adalah teknologi Industri/Otomotif dan Manajemen Bisnis Ekonomi.

Pengembangan sekolah kejuruan dewasa ini masih dilakukan berdasarkan animo masyarakat dengan jurusan yang sedang tren, sehingga lulusan sekolah kejuruan cenderung memilih untuk mencari kerja di daerah perkotaan pada sektor formal. Kondisi seperti ini menjadikan perkembangan daerah menjadi lambat karena tenaga-tenaga terampil yang mestinya bisa diarahkan untuk membangun daerahnya malah memilih untuk bekerja di daerah lain. Mungkin akan berbeda kondisinya jika pengembangan sekolah kejuruan diarahkan pada pengembangan potensi wilayah, dengan kata lain pengembangan sekolah kejuruan berbasis pengembangan wilayah.

Kabupaten Brebes merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar kedua di Jawa Tengah, Luas wilayah administrasi tercatat sebesar 166.019,07 Ha. Wilayah Kabupaten Brebes tersebar dalam 17 Kecamatan, beberapa kecamatan memiliki topografi yang sama. Diantaranya terdiri dari: 5 Kecamatan berupa daerah pesisir/pantai, 9 Kecamatan dataran rendah dan 3 Kecamatan dataran tinggi atau pegunungan. (BPS Kabupaten Brebes 2007), (Kabupaten Brebes Dalam Angka 2007).

Dengan wilayah administrasi yang sangat luas, maka Kabupaten Brebes memiliki sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Kebijakan pemerintah daerah, potensi tersebut terbagi dalam 3 satuan wilayah pengembangan yang memiliki karakteristik masing-masing. Wilayah Kabupaten Brebes bagian utara yang berada pada pantura laut Jawa mempunyai potensi kekayaan laut namun potensi tersebut belum dikelola secara optimal. Wilayah Kabupaten Brebes bagian Timur berbatasan dengan Kota Tegal dengan mata pencaharian masyarakatnya adalah buruh industri modern atau industri berat yang ada di luar wilayah tersebut. Wilayah Kabupaten Brebes bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dengan potensi pertanian khususnya tanaman bawang merah yang cukup besar. Sedangkan Wilayah Kabupaten Brebes bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas di mana masyarakatnya banyak yang mengembangkan industri rumah tangga seperti kerajinan bambu, konveksi, kerajinan kulit, bertani dan berkebun. Wilayah Brebes bagian Selatan ini memiliki potensi pertanian, peternakan maupun potensi pariwisata yang masih sangat potensial untuk dikembangkan.

Disamping potensi Sumber Daya Alam cukup besar, Kabupaten Brebes jumlah penduduknya cukup besar pula yaitu sebesar 1.736.401 jiwa, jumlah penduduk tersebut merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Dari jumlah penduduk tersebut 31,93% tercatat memiliki tingkat pendidikan belum tamat SD; 42,30%, tamat SD; 15,47% tamat SLTP; 8,57% tamat SLTA dan sisanya tamat Perguruan Tinggi 1,73%. Dinas P dan K Kabupaten Brebes (2007). Profil Pendidikan (2007). Hal ini menunjukkan bahwa SDM Kabupaten Brebes tergolong rendah. Kondisi SDM ini apabila dikembangkan menjadi tenaga-tenaga berkeahlian melalui pendidikan kejuruan maka merupakan potensi SDM yang sangat besar yang dapat mendukung pembangunan daerahnya. Untuk itu perlu adanya keselarasan antara kebijakan pengembangan wilayah dan pengembangan potensi wilayah serta di dukung pula dengan peningkatan SDM. Penerapan kebijakannya adalah memprioritaskan adanya sekolah kejuruan yang dapat menampung penduduk usia sekolah menengah untuk memperoleh pendidikan sekolah kejuruan dan selanjutnya lulusan sekolah kejuruan tersebut dapat mengembangkan wilayah dan melakukan pembangunan di Kabupaten Brebes. Apabila dapat terlaksana maka dampak positif yang di peroleh adalah tercapainya peningkatan SDM, sehingga masyarakat akan terkonsentrasi pada aktivitas pengolahan sumber daya alam yang ada di daerahnya dan selanjutnya masyarakat enggan mencari kerja ke kota-kota besar serta mengurangi tingkat urban.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah tersebut di atas, perlu dilakukan kajian potensi wilayah sebagai dasar pengembangan sekolah kejuruan. Selanjutnya dapat dirumuskan masalah dan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimanakah tingkat potensi wilayah untuk pengembangan sekolah kejuruan di Kabupaten Brebes?

Sedangkan fokus masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengembangan Sekolah Kejuruan berbasis pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Brebes.
2. Bagaimana penentuan titik lokasi pembangunan sekolah kejuruan dengan memperhatikan indikator-indikator yang ada.

1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: menganalisis kebutuhan pendidikan sekolah menengah kejuruan berdasarkan potensi wilayah dengan menetapkan jenis dan lokasi wilayah yang memenuhi kelayakan bagi pengembangan sekolah kejuruan di Kabupaten Brebes. Unsur-unsur kelayakan tersebut dilihat dari potensi ekonomi, ketenagakerjaan/sumber daya manusia, dan kebutuhan masyarakat akan sekolah kejuruan.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis potensi wilayah; potensi ekonomi, potensi angkatan kerja dan potensi tenaga kerja.
2. Menganalisis potensi pendidikan; penduduk usia sekolah dan kondisi sekolah.
3. Menganalisis potensi sekolah kejuruan yang berbasisi potensi wilayah.

1.3.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teknis untuk menyelesaikan persoalan yang ada kaitannya dengan kondisi dan sistem pengembangan sekolah kejuruan.
2. Memberikan masukan mengenai pengembangan sekolah kejuruan yang sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansial. Kedua bagian tersebut diuraikan berikut ini.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian adalah Kabupaten Brebes, yang meliputi 17 kecamatan. Masing-masing kecamatan memiliki keragaman dan spesifikasi potensi wilayah, masalah ketenagakerjaan/sumber daya manusia, kebutuhan dan aspirasi penduduk terhadap pendidikan kejuruan. Adapun sampel

wilayah yang akan dijadikan fokus penelitian ini terdiri atas 3 kecamatan; Kota Brebes, Kota Ketanggungan dan Kota Bumiayu, 3 kecamatan tersebut merupakan 3 Zona Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Brebes. (RTRW Kabupaten Brebes, 2008-2027; V-7-V-8) yaitu :

1. SWP I sebagai pusat pengembangan Wilayah Utara adalah Kota Brebes di Kecamatan Brebes
2. SWP II sebagai pusat pengembangan Wilayah Tengah adalah Kota Ketanggungan di Kecamatan Ketanggungan
3. SWP III sebagai pusat pengembangan Wilayah Selatan adalah Kota Bumiayu di Kecamatan Bumiayu

Pemilihan ketiga sampel penelitian tersebut didasarkan atas alasan bahwa masing-masing wilayah itu telah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan berdasarkan karakteristik lahan, potensi sumber daya alam, dan potensi sumber daya manusianya. Kota Brebes merupakan pusat pengembangan Wilayah Utara, yang memiliki potensi dataran pantai/kelautan, pertanian, industri dan perdagangan. Kota Ketanggungan mewakili Wilayah Tengah, yang potensinya didominasi oleh dataran rendah, pertanian, industri, pertambangan dan perdagangan. Sedangkan Kota Bumiayu merupakan pusat pengembangan Wilayah Brebes Selatan, yang didominasi oleh potensi: dataran tinggi, hasil pertanian, industri, pariwisata. dan perdagangan.

1.4.2 Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansial penelitian yaitu potensi wilayah, penetapan lokasi dan jenis sekolah kejuruan. Untuk mempertegas ruang lingkup substansial tersebut, maka dilakukan pembatasan potensi wilayah adalah Kabupaten Brebes yang memiliki 17 kecamatan, yang memiliki 3 karakter zona wilayah yaitu wilayah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi memiliki potensi ekonomi 9 sektor lapangan usaha yang ada di Kabupaten Brebes adalah merupakan kekuatan perekonomian. Dari 9 sektor tersebut ada 4 sektor lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB, yaitu; Pertanian, Industri Perdagangan Jasa dan sumber lain-lain. Sedangkan pengembangan potensi wilayah dibagi menjadi 3 SWP yaitu :

1. SWP I pengembangan potensinya; sektor perikanan, agroindustri pertanian, peternakan dan agrowisata pantai.
2. SWP II pengembangan potensinya; sektor perdagangan dan industri pengolahan pertanian dan perkebunan serta perikanan.
3. SWP III pengembangan potensinya; sektor perdagangan, pertanian dan perkebunan, industri dan pariwisata.

1.5 Posisi Penelitian

Penelitian mengenai pengembangan wilayah memiliki cakupan yang luas. Dengan demikian, penelitian pengembangan wilayah dapat menjangkau aspek-aspek pengembangan fisik, ekonomi, kelembagaan dan manusia. Dilihat

dari keragaman aspek kajian tersebut, maka penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada pengembangan wilayah dalam aspek manusianya.

Pengembangan wilayah dalam aspek manusia, dalam penelitian ini lebih dikhususkan lagi pada kondisi pendidikan dan sosial ekonomi di daerah penelitian. Pemahaman atas kondisi tersebut lebih lanjut akan dijadikan dasar analisis kelayakan pengembangan sekolah kejuruan. Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa posisi penelitian mengetengahkan isu kebutuhan dan ketetapan pengembangan sekolah dalam kerangka pengembangan potensi wilayah di daerah penelitian.

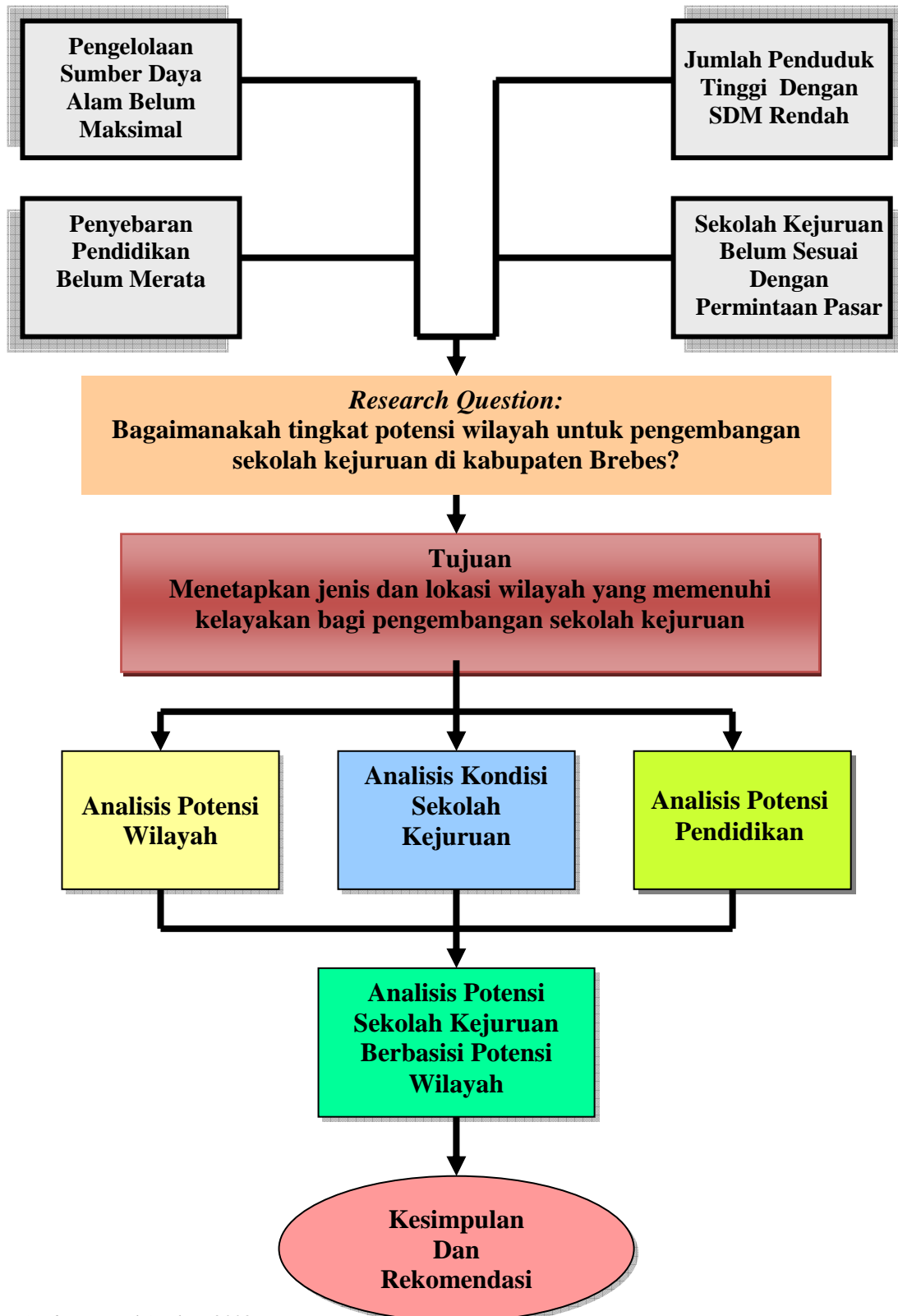
1.6 Kerangka Pikir

Alur pemikiran dalam penelitian ini dikerangkakan berikut ini.

1. Mengenal substansi isu utama yang ada, bahwa Kabupaten Brebes yang memiliki wilayah yang sangat luas serta jumlah penduduk yang sangat padat tetapi merupakan masalah pada kualitas SDM masih rendah, disebabkan oleh faktor-faktor pendidikan, kondisi sekolah tingkat penyebarannya belum merata, kondisi sekolah kejuruan yang ada belum memenuhi permintaan pasar.
2. Membandingkan antara isu sekolah kejuruan dengan kebijakan pembangunan bidang pendidikan, selanjutnya dikemukakan pertanyaan penelitian; Bagaimanakah tingkat potensi wilayah untuk pengembangan sekolah kejuruan di kabupaten Brebes?
3. Data dan informasi empirik secara keseluruhan diharapkan dapat menjelaskan pertanyaan penelitian maka ditetapkan tujuan penelitian.

4. Melakukan analisis dari semua potensi yang ada, dalam hubungan ini aspek metodologi dan kajian teori digunakan untuk menganalisis data dan informasi empirik mengenai pengembangan sekolah kejuruan, pengembangan potensi wilayah dan kondisi eksisting pendidikan.
5. Sintesis dari analisis semua potensi diperoleh suatu temuan potensi sekolah kejuruan berbasisi potensi wilayah.
6. Temuan penelitian itu selanjutnya disimpulkan dan diramu sebagai rekomendasi.

Kerangka alur kerangka pemikiran lihat Gambar 1.1.



GAMBAR 1.1
KERANGKA PIKIR

1.7 Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif mempunyai lima ciri yaitu: (1) Dilakukan pada latar alami, karena yang merupakan alat penting adalah adanya data yang langsung dari peneliti sendiri (2) Bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar. (3) Lebih memperhatikan proses dari pada hasil. (4) Dalam menganalisa data cenderung induktif, dan (5) Makna merupakan hal yang esensial. (Bagdan dan Biklen dalam Munandir 1990).

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena beberapa pertimbangan antara lain: (1) Penelitian ini merupakan upaya untuk menemukan permasalahan yang terkait dengan kondisi sekolah kejuruan dan bagaimana kaitannya dengan pengembangan sekolah kejuruan berbasiskan pengembangan potensi wilayah (2) Penelitian ini lebih bersifat induktif, artinya peneliti berusaha menemukan permasalahan berdasar data dan terbuka bagi penelitian lebih lanjut. (3) Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang wajar dan mengutamakan data yang bersifat kualitatif.

1.7.1 Objek Penelitian

Sampling dalam hal ini ialah pilihan aspek apa dan peristiwa apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat dan situasi tertentu karena itu pemilihan sample dilakukan terus menerus sepanjang penelitian. Sampling bersifat purposif yakni tergantung pada tujuan fokus. Instrumen penelitian tidak bersifat eksternal atau objektif, akan tetapi subjektif yaitu peneliti itu sendiri tanpa menggunakan test, angket atau eksperimen. Instrumen dengan sendirinya tidak berdasarkan

definisi operasional. Yang dilakukan ialah menyeleksi aspek-aspek yang khas yang berulang kali terjadi, yang berupa pola atau tema dan tema itu senantiasa diselidiki lebih lanjut dengan cara yang lebih halus dan mendalam. Tema itu akan merupakan petunjuk ke arah pembentukan suatu teori. Analisis data bersifat terbuka, *opened-ended*, dan induktif.

Dikatakan terbuka karena teknik *sampling purposive* (bertujuan). Jadi sampel dalam penelitian ini antara lain adalah pejabat Dinas Pendidikan dan Kabupaten Brebes, pejabat instansi lain yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, Camat, Cabang Dinas P dan K Sekolah dan unsur masyarakat yang berkompeten mengenai pengembangan pendidikan di Kabupaten Brebes.

1.7.2 Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu data utama dan data pendukung. Data utama diperoleh dari informan, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan sebagai fokus penelitian. Yang terlibat sebagai informan dalam penelitian ini adalah: Camat, Kepala Cabang Dinas P dan K, Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Komite Sekolah dan Orang tua siswa. Sedangkan data pendukung bersumber dari dokumen-dokumen resmi yang ada, baik berasal dari BPS, Bappeda maupun Dinas P dan K Kabupaten Brebes.

Pemilihan informasi yang tepat dengan informasi yang akurat merupakan pilihan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. (Nasution 1996: 32) berpendapat “dalam penelitian naturalistik yang dijadikan sampel adalah sumber yang dapat memberikan informasi. Sampel dapat berupa hal, peristiwa,

manusia, situasi yang observatif”. Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, bersahabat sebagaimana adanya, tanpa ada pengaruh yang merencanakan.

Secara umum data yang akan diperoleh dipaparkan dalam bentuk kisi-kisi instrumen pengumpulan data.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dengan tahapan penelitian dalam penelitian kualitatif, instrumen umum adalah peneliti sendiri. “Pada awal penelitian, peneliti adalah alat satu-satunya”. Untuk memudahkan dalam pengumpulan data, peneliti dapat memakai alat bantu catatan lapangan, tape recorder, kamera foto dan pedoman wawancara (*interview guide*). (Nasution 1996 : 34)

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data berjalan dari medan empiri dalam upaya membangun teori dari data. Proses pengumpulan data ini meliputi proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*) serta berada di lokasi penelitian (*getting along*) dan mengumpulkan data (*logging the data*).

Pada tahap pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik:

1. Wawancara mendalam (*indepth interview*).

Wawancara adalah suatu percakapan yang bertujuan memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktifitas, organisasi perasaan, motivasi, pengakuan dan kerisauan. Wawancara mendalam dilakukan baik secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, maupun wawancara terang-terangan yang akan digabung dengan teknik observasi.

2. Observasi partisipasi

Observasi partisipasi dimaksudkan untuk memperoleh data yang lengkap dengan rincian melalui pengamatan yang seksama dengan melibatkan diri dalam kegiatan subyek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasi aktif untuk mencoba mempelajari dan memahami perilaku orang-orang yang terlibat.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi dari bahan-bahan dokumentasi. Bahan dokumentasi yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah dokumen dan data yang berasal dari BPS, BAPPEDA maupun Dinas P dan K Kabupaten Brebes yang menyangkut program pengembangan wilayah dan program pengembangan sekolah.

4. Kuesioner

Adalah teknik data menggunakan daftar pertanyaan baik yang bersifat tertutup maupun terbuka. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup dengan tujuan agar responden hanya cukup memilih dari beberapa alternatif pilihan yang telah tersedia.

1.7.4 Teknik Pengambilan Sampel

Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini tidak menggunakan secara random (*Stratified sampling*), serta sampel harus mewakili pada semua tingkatan atau strata dan pemilihan sampel bertujuan untuk target tertentu dalam memilih sampel tidak dengan acak (*Purpose sampling*), sehingga elemen sampling tidak memiliki kesempatan sama untuk menjadi sampel. Metode sampel

ini merupakan salah satu sampel probabilitas. (Indriantoro dan Supomo, 1999: 131).

Anggota sampel pada penelitian ini dipilih untuk mendukung penguatan data atau untuk memperjelas data. Kriteria teknik *Purpose sampling* pada penelitian ini adalah :

1. Mengetahui karakteristik wilayah penelitian
2. Memberikan penjelasan pengembangan wilayah dan pengembangan potensi wilayah
3. Memberikan penjelasan aspek sosial ekonomi dan budaya yang ada serta peran serta masyarakat terhadap pengembangan sekolah kejuruan.

Sampel yang diambil adalah dengan tujuan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dari *stakeholder* terdiri dari unsur:

1. Kepala Bappeda, perolehan materi untuk pemenuhan kebutuhan analisa data, dokumentasi data yang diminta meliputi : Renstra dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten, Dokumen Perencanaan Tata Ruang, Dokumen Pembagian Wilayah Pengembangan, Gambar , Risalah, Peta, dan Dokumen Data Kuantitatif yang relevan. Semua data terpenuhi, yaitu diperolehnya keterangan dan informasi data-data tersebut dalam bentuk buku dan *software*.
2. Kepala Dinas P dan K, perolehan materi untuk pemenuhan kebutuhan analisa data, dokumentasi data yang diminta meliputi: penjelasan mengenai, kebijakan dan perencanaan pengembangan SMK di Kabupaten Brebes, tingkat sebaran, jenis program keahlian, jumlah siswa, faktor

potensial, target pengembangan dan faktor penghambat pengembangan SMK , jumlah dan mutu SMK di Kabupaten Brebes. Hasil wawancara diperoleh data pernyataan maupun data rekaman berupa dokumen pendidikan.

3. Camat, dan Kepala Cabang Dinas P dan K, perolehan informasi data untuk pemenuhan kebutuhan analisa data, dokumentasi data yang diminta meliputi: Sektor-sektor potensi ekonomi unggulan, kontribusi terhadap PDRB. peluang kerja, peluang usaha, dan taga kerja, jumlah penduduk usia sekolah, keberadaan sekolah kejuruan di wilayah baik negeri maupun swasta, jumlah penduduk yang bersekolah SMK baik yang di daerah maupun di luar daerah, pelayanan dan jarak tempuh. keinginan masyarakat tentang adanya SMK, bidang keahlian apa yang diharapkan.

Di peroleh informasi data dari Kepala Sekolah berupa dokumentasi data meliputi : Penjelasan sejarah singkat dan perkembangan SMK, kondisi siswa, antara lain aspek-aspek jumlah siswa, latar belakang sosial ekonomi, persentase kelulusan, masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan, proporsi pembiayaan pendidikan SMK, rencana pengembangan SMK, program SPG, relevansi program jurusan dengan kebutuhan masyarakat, wilayah yang layak untuk pendirian SMK.

4. Calon peserta didik sekolah kejuruan yaitu siswa kelas III.

Informasi data menggunakan kuesioner dengan target utama data yang diperoleh adalah: data pribadi, cita-cita, Pelajaran yang paling disukai, rencana melanjutkan sekolah, minat melanjutkan ke SMK, Program

pilihan, keberadaan sekolah SMK di kotanya, program/jenis kejuruan yang diketahui.

Sampel yang dipakai dalam penelitian adalah terdiri dari jumlah sampel penelitian dari *stakeholder* dan dari calon peserta didik, lihat Tabel I.1 dan I.2.

TABEL I.1
JUMLAH SAMPEL PENELITIAN *STAKEHOLDER*

No.	Populasi	Responde	Jumlah
<i>Stakeholder</i>			
1.	Kepala Bappeda	1	1
2.	Kepala Dinas P dan K	1	1
3.	Camat	1	1
4.	Kepala Cabang Dinas P dan K	1	1
5.	Kepala Sekolah	1	1
Jumlah		5	5

Sumber : Data Penelitian, 2008

TABEL I.2
JUMLAH SAMPEL PENELITIAN CALON PESERTA DIDIK

No.	Populasi	Responden	Jumlah
Calon Peserta Didik			
1.	Siswa kelas III SMP di Kec. Brebes	33	33
2.	Siswa kelas III SMP di Kec. Ketanggungan	33	33
3.	Siswa kelas III SMP di Kec. Bumiayu	34	34
Jumlah		100	100

Sumber : Data Penelitian, 2008

1.7.5 Instrumen Penelitian

Manusia sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif, karena dipandang lebih cermat dengan cirri-ciri yang diintrodusir (Nasution 1992:55-56) sebagai berikut; (1) manusia sebagai alat yang peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulan dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak

bermakna bagi peneliti; (2) manusia sebagai alat yang dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata-mata; (5) peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh; (6) hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan segera menggunakannya sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau penolakan; dan (7) manusia sebagai instrumen, respon yang aneh dan yang menyimpang justru diberi perhatian.

Untuk mempermudah pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa alat pengumpul data, yaitu:

1. Panduan wawancara

Panduan wawancara merupakan seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang digunakan peneliti sebagai panduan dalam melakukan wawancara dengan responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Panduan observasi

Berupa daftar cek yang dibuat untuk mengingatkan observasi apakah seluruh informasi sudah diperoleh atau belum. Selain itu digunakan sebagai pembimbing bagi observer dan sebagai jadwal waktu serta isi informasi yang akan dijaring.

3. Panduan Kuesioner

Daftar pertanyaan yang dibuat untuk memperkuat data bahwa seluruh

informasi data yang diperoleh didukung pula dengan kondisi riil yang ada di lapangan.

1.7.6 Analisis dan Penafsiran Data

Analisis data pada penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis transkrip dan catatan hasil observasi, dokumen dan wawancara serta bahan-bahan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. (Moleong, 1990:183) mengemukakan antara analisis data dan penafsiran data merupakan kegiatan yang terjalin secara terpadu. Analisis data telah dimulai sejak di lapangan, pada saat itu sudah ada upaya dalam rangka penyusunan hipotesis yaitu teorinya sendiri. Jadi analisis data ini terintegrasi secara terpadu dengan penafsiran data.

Dengan mengacu pada model analisis data penelitian kualitatif tersebut, maka peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut; (1) setelah data terkumpul, peneliti mengadakan reduksi data dengan jalan merangkum laporan lapangan, mencatat hal-hal pokok yang relevan dengan fokus penelitian; (2) menyusun secara sistematis berdasarkan kategori dan klasifikasi tertentu; (3) membuat display data dalam bentuk tabel ataupun gambar sehingga hubungan antara data yang satu dengan lainnya menjadi jelas dan utuh; (4) mengadakan *cross site analysis* dengan cara membandingkan dan menganalisis data secara lebih mendalam; dan (5) menyajikan temuan penelitian kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk kecenderungan umum, dan implikasi untuk

penerapannya serta rekomendasi bagi pengembangan adaptasi ataupun penyempurnaan lebih lanjut.

1.7.7 Metode

17.7.1 Metode Analisis Location Quotion (LQ)

Untuk mengetahui seberapa tingkat potensi wilayah yang terdiri dari potensi ekonomi, potensi angkatan kerja dan potensi tenaga kerja maka dilakukan pembobotan nilai dengan menggunakan metode analisis *Location Quotient* (LQ).

1. Metode analisis LQ adalah membandingkan porsi lapangan kerja/tenaga kerja/usaha/potensi/nilai tambah untuk suatu sektor tertentu di suatu wilayah (lokal) dibandingkan dengan porsi lapangan kerja/tenaga kerja/potensi/nilai tambah untuk sektor yang sama pada wilayah yang lebih luas (regional).
2. Perhitungan LQ dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan diantaranya:
 - Pendekatan lapangan kerja/tenaga kerja/usaha/potensi.
 - Pendekatan nilai tambah.
3. Apabila diperoleh hasil nilai $LQ > 1$: maka sektor tersebut merupakan sektor basis di kota yang menjadi wilayah studi.
4. Apabila nilai $LQ < 1$: maka sektor tersebut **bukan** merupakan sektor basis (non basis) di kota yang menjadi wilayah studi.

Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan.

1.7.7.2 Metode Principal Component Analysis (PCA)

PCA atau Principal Component Analysis adalah salah satu bentuk analisa multivariate. Dalam penelitian yang mengukur banyak variable dan ingin mengelompokkan variable-variable tersebut, maka PCA dapat menjadi salah satu alat bantu (Soemantri, 2008). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan PCA untuk mengukur variable indikator pendidikan yaitu: jumlah penduduk usia 16-18 tahun, rasio siswa sekolah, rasio siswa per kelas, rasio siswa per guru, rasio siswa per siswa baru, APK, rasio SMA/SMK.

Keuntungan penggunaan Principal Component Analysis (PCA) dibandingkan metode lain (Soemartini, 2008) :

- a. Dapat menghilangkan korelasi secara bersih (korelasi = 0) sehingga masalah;
- b. multikolinearitas dapat benar-benar teratasi secara bersih;
- c. Dapat digunakan untuk segala kondisi data / penelitian;
- d. Dapat dipergunakan tanpa mengurangi jumlah variabel asal;
- e. Walaupun metode Regresi dengan PCA ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi akan tetapi kesimpulan yang diberikan lebih akurat dibandingkan dengan penggunaan metode lain.

Ada dua manfaat pokok dari PCA yaitu: (1) PCA dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan *multikolinieritas*, dan (2) dapat menyajikan data dengan struktur jauh lebih sederhana tanpa kehilangan esensi informasi yang terkandung di dalamnya, dengan demikian akan mudah memahami, mengkonsumsikan dan *menetapkan prioritas* penanganan terhadap hal-hal yang

lebih pokok dari struktur permasalahan yang dihadapi, sehingga efisiensi dan efektifitas penanganan permasalahan dapat lebih ditingkatkan (Dermoredjo dan Noekman, (2001).

Untuk menetapkan perhitungan tingkat kebutuhan sekolah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan indikator pemerataan pendidikan, yaitu untuk menetapkan berapa skor yang diperoleh yaitu dengan menggunakan Model PCA. Prinsip dasar PCA adalah untuk mencari nilai masing-masing variable, setelah diperoleh nilai skor maka dapat ditetapkan titik lokasi pengembangan sekolah yaitu melalui perolehan skor terendah adalah merupakan prioritas kebutuhan sekolah.

1.7.8 Proses Dan Teknik Analisis

1.7.8.1 Analisis Potensi Wilayah

Sektor kegiatan ekonomi dengan perbandingan dalam perhitungan LQ ini adalah PDRB Kabupaten Brebes. (Syafaat dan Supena, 2000 dalam Hendayana, 2003). Adapun dalam perhitungan yang dilakukan, basis ekonomi ini berdasarkan atas mata pencaharian penduduk. Rumus dari analisis ini adalah sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{S_i/N_i}{S/N}$$

Keterangan :

LQ_i = Nilai LQ pada tahun i

- Si = Jumlah tenaga kerja sektor i di daerah yang dianalisa
(per Kecamatan)
- Ni = Jumlah tenaga kerja sektor i seluruh daerah (Kabupaten Brebes)
- S = Jumlah tenaga kerja semua sektor di daerah yang dianalisa
(Kecamatan)
- N = Jumlah tenaga kerja semua sektor seluruh daerah (Kabupaten
Brebes)

Nilai dari LQ akan menunjukkan kemampuan dari suatu daerah dalam sektor tertentu, yaitu bila:

1. Nilai $LQ < 1$, berarti daerah yang bersangkutan mempunyai kecenderungan impor dari daerah lain.
2. Nilai $LQ = 1$, berarti daerah yang bersangkutan mampu mencukupi daerah sendiri dalam kegiatan tertentu.
3. Nilai $LQ > 1$, berarti daerah yang bersangkutan mempunyai kecenderungan ekspor ke daerah lain.

1.7.8.2 Analisis Potensi Pendidikan

Potensi pendidikan dilihat dari tingkat penduduk usia sekolah. Data yang diperoleh dari BPS adalah data yang masih acak yaitu; data jumlah penduduk usia 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, 15-19 tahun, 20-24 tahun dan 25-29 tahun. Untuk mengetahui tingkat potensi pendidikan melalui jumlah penduduk usia sekolah lanjutan atas (SMA/MA/SMK) adalah penduduk usia 16-18 tahun maka dilakukan pemecahan usia sekolah. Metode yang digunakan dalam pembahasan

ini untuk memecah interval ini adalah *Metode Sprague Multiplier* dilakukan menyusun dengan cara tertentu yang dikalikan dengan bilangan pengali sprague.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan pemecahan adalah:

$$\mathbf{Fa = Sla \times F-2 + S2a \times F-1 + S3a \times F0 + S4a \times F1 + S5a \times F2}$$

Keterangan :

Fa	=	Penduduk menurut usia tahunan yang pertama
F0	=	Penduduk Kelompok usia yang akan dipecah
F1	=	Penduduk Kelompok usia berikutnya yang pertama sesudah F0
F2	=	Penduduk Kelompok usia berikutnya yang kedua sesudah F0
F-1	=	Penduduk Kelompok usia sebelumnya yang pertama sebelum F0
F-2	=	Penduduk Kelompok usia sebelumnya yang kedua sebelum F0
S1a	=	Bilangan pengali Sprague pertama untuk usia a tahun
S2a	=	Bilangan pengali Sprague kedua untuk usia a tahun
S3a	=	Bilangan pengali Sprague ketiga untuk usia a tahun
S4a	=	Bilangan pengali Sprague keempat untuk usia a tahun
S5a	=	Bilangan pengali Sprague kelima untuk usia a tahun

1.7.8.3 Analisis Potensi Sekolah Kejuruan

Kebutuhan sekolah, untuk mengetahui tingkat kebutuhan sekolah kejuruan dilakukan dengan Analisis PCA dengan bantuan software *Statistik Minitab Release* yaitu dengan mempertimbangkan indikator pendidikan yang digunakan dengan langkah-langkah perhitungan antara lain adalah:

1. Jumlah Penduduk

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah Jumlah Penduduk

Usia 16-18 Tahun dan Jumlah Siswa SLTA untuk masing-masing kecamatan.

Menghitung Jumlah Penduduk usia 16-18 yang belum tertampung

$$\mathbf{B \Rightarrow \frac{A}{100} \times Jml \ Penduduk \ Usia \ 16-18}$$

2. Rasio Siswa Per Sekolah.

Menghitung Kebutuhan Sekolah dengan asumsi satu sekolah memiliki 9 ruang kelas (masing-masing tingkat terdiri dari 3 kelas)

$$\mathbf{KS} \Rightarrow \frac{KRS}{9}$$

3. Rasio Siswa Per Kelas.

Menghitung Kebutuhan Ruang Kelas dengan Asumsi Daya Tampung Kelas, kondisi ideal adalah 36 siswa per kelas

$$\mathbf{K RK} \Rightarrow \frac{K RK}{36}$$

4. Rasio Siswa Per Guru.

Kebutuhan satu guru menangani siswa rata-rata sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang di keluarkan oleh Departemen pendidikan Nasional, kondisi ideal adalah sebanyak banyaknya 36 siswa per guru.

$$\mathbf{KGS} \Rightarrow \frac{KRG}{36}$$

5. Persentase Siswa Baru.

Menetapkan kebutuhan siswa baru sesuai dengan daya tampung kelas, diperoleh data rata-rata masing-masing kecamatan sebesar 90% dari jumlah lulusan.

$$\mathbf{PPSL} \Rightarrow \frac{L}{SB}$$

6. Angka Partisipasi Kasar (APK)

- Menghitung APK untuk masing-masing Kecamatan

- $$\mathbf{APK} = \frac{\text{Jumlah Siswa SLTA}}{\text{Jml Penduduk usia 16-18}} \cdot 100$$

- Menghitung selisih APK masing-masing kecamatan dengan Target APK

$$A \Rightarrow 95\%.$$

Alat yang dipakai adalah menggunakan *Principal Component Analysis* (PCA), dengan rumus sebagai berikut:

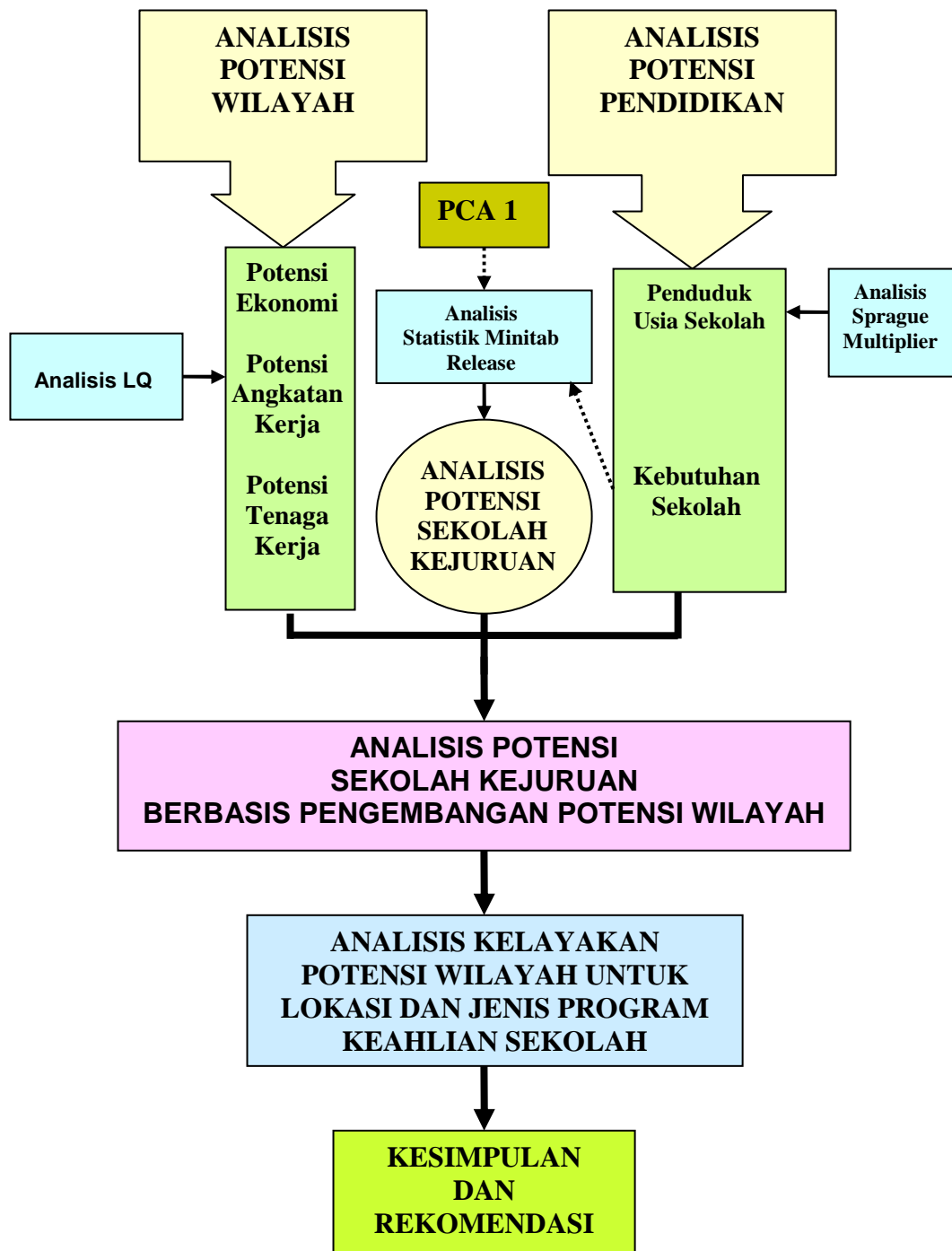
$$\begin{aligned}\xi_1 &= w_{11} x_1 + w_{12} x_2 + \dots + w_{1p} x_p \\ \xi_2 &= w_{21} x_1 + w_{22} x_2 + \dots + w_{2p} x_p \\ &\vdots \\ \xi_p &= w_{p1} x_1 + w_{p2} x_2 + \dots + w_{pp} x_p\end{aligned}$$

dimana p adalah banyaknya variabel (indikator pendidikan) yang digunakan. (Subhas Sharma, 1984).

Dari PCA 1 kemudian dihitung skor untuk masing-masing kecamatan pada tiap-tiap SWP, merupakan hasil analisis prioritas kebutuhan sekolah kejuruan.

1.7.8.4 Analisis Potensi Sekolah Kejuruan Berbasis Potensi Wilayah

Sintesa pada analisis ekonomi dengan menggunakan metode basis dan penentuan kebutuhan serkolah berbasis potensi pendidikan dengan PCA 1 maka dihasilkan pengembangan sekolah kejuruan berbasis pengembangan potensi wilayah yang dibutuhkan di Kabupaten Brebes. dapat ditentukan tingkat potensi sekolah kejuruan serta disinergikan dengan kebijakan pengembangan wilayah. Tingkat kesesuaian tersebut merupakan temuan adanya potensi sekolah kejuruan yang berbasisi potensi wilayah. Secara garis besar digambarkan pada Kerangka Analisis, lihat Gambar 1.2.



GAMBAR 1.2
KERANGKA ANALISIS

1.8 Sistematika Pembahasan

Review dan bahasan ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai pendahuluan dari kajian ini menguraikan tentang penelitian yang dilakukan termasuk didalamnya tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran dan manfaat penelitian, ruang lingkup, posisi penelitian, kerangka pikir, metodologi, kerangka analisis dan sistematika pembahasan.

BAB II. PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH

Bab ini berisikan teori dan konsep-konsep yang menjelaskan permasalahan operasional studi secara teoritis berdasarkan literatur yang berkaitan dengan pengembangan wilayah dan pengembangan sekolah antara lain Bab ini berisikan teori dan konsep-konsep yang menjelaskan permasalahan operasional studi secara teoritis berdasarkan literatur yang berkaitan dengan pengembangan wilayah dan pengembangan sekolah yaitu: (1) Pengembangan wilayah antara lain; Tata guna lahan; Pengertian kota, teori lokasi. (2) Pengembangan sekolah antara lain; Pengertian pendidikan, Teori pendidikan dan konsep pendidikan, Pengembangan pendidikan, Pengembangan pendidikan kejuruan dan Rangkuman.

BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH KABUPATEN BREBES

Bab ini membahas mengenai (1) Potensi Wilayah Kabupaten Brebes, (2) Potensi Wilayah yang terdiri dari: Potensi ekonomi, Potensi tenaga kerja, dan Potensi infrastruktur. (3) Kondisi Pendidikan: Kondisi Sekolah, Kondisi Sekolah Kejuruan dan Kebutuhan Sekolah Kejuruan. (4) Landasan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

BAB IV. ANALISIS PENGEMBANGAN SEKOLAH KEJURUAN BERBASIS PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH

Pembahasan pada bab ini adalah menganalisis data yang terdiri dari: (1) Analisis potensi wilayah: potensi ekonomi, potensi dan tenaga kerja, (2) Analisis kondisi pendidikan dan kebutuhan pendidikan : Kondisi pendidikan, kebutuhan pendidikan. (3) Lokasi Sekolah Kejuruan dan (4) Temuan Studi.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH

2.1 Pengembangan Wilayah

Pembangunan daerah atau pengembangan wilayah dilakukan melalui rangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan dan dilangsungkan secara terus menerus selama kurun waktu tertentu. Kegiatan pengembangan wilayah dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang di antaranya adalah pihak pemerintah, pihak swasta dan pihak masyarakat.

Konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model yang senantiasa berkembang yang telah diujiterapkan dan kemudian dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Indonesia. Pengertian pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI (Dirjen Penataan Ruang, 2003).

Riyadi (2000) mengungkapkan beberapa pemikiran yang dapat dikembangkan untuk strategi pengembangan wilayah di masa mendatang antara lain adalah :

a. Alokasi sumber daya yang lebih seimbang

Berbagai deregulasi di sektor riil dan moneter telah dilakukan Pemerintah dalam rangka efisiensi di segala bidang. Namun dari berbagai studi yang dilakukan ternyata upaya tersebut masih cenderung menguntungkan Jawa dan kawasan-kawasan cepat berkembang lainnya. Seperti misalnya penambahan infrastruktur besar-besaran dan pengembangan pertanian di wilayah padat penduduk seperti Jawa telah menarik investasi modal swasta, serta terjadinya peningkatan kemampuan teknologi dan manajemen hanya di kawasan-kawasan tersebut. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah telah membuka kewenangan yang semakin besar bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan menggunakan sumber-sumber keuangannya. Untuk itu, perlu pula dilakukan reformasi fiskal yang mendukung alokasi sumber daya yang lebih baik terutama ke kawasan-kawasan yang belum berkembang, termasuk diantaranya reformasi di bidang perpajakan. Deregulasi sektor riil juga perlu memperhatikan perkembangan kemampuan daerah.

b. Peningkatan sumber daya manusia di daerah

Pembangunan selama ini telah menurunkan angka buta huruf, meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat di daerah. Namun demikian, kualitas manusia di kawasan-kawasan tertinggal umumnya masih di bawah rata-rata kualitas nasional. Untuk itu, pendekatan pembangunan sektoral yang telah meningkatkan standard kualitas manusia Indonesia sampai pada taraf tertentu, pada masa mendatang perlu diikuti oleh pendekatan pembangunan yang lebih memperhatikan kondisi dan aspirasi wilayah, bukan oleh pendekatan yang bersifat

uniform. Strategi pembangunan manusia di masa mendatang harus mampu mengidentifikasi jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat menempatkan tenaga kerja dan lulusan terdidik dalam pasar peluang kerja yang senantiasa menuntut adanya peningkatan keahlian.

c. Pengembangan kelembagaan dan aparat daerah

Struktur kelembagaan dan aparat pemerintah daerah selama ini mencerminkan sistem pemerintahan berjenjang. Walaupun propinsi dan kabupaten juga berfungsi sebagai daerah otonom, yang mempunyai kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri, namun dalam berbagai implementasi pelaksanaan pembangunan selama ini daerah lebih kepada “menunggu” petunjuk dari Pusat. Proses pengambilan keputusan yang demikian kemudian berkembang menjadikan aparat daerah lebih melayani aparat Pusat daripada melayani masyarakat daerahnya. Dalam era demokratisasi yang semakin berkembang seperti sekarang ini, yang ditunjang oleh berbagai peraturan perundangan mengenai desentralisasi yang lebih lengkap, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu melaksanakan kewenangan yang semakin besar dalam menata pembangunan daerahnya. Semakin lengkapnya perangkat peraturan dan perundang-undangan mengenai penataan ruang di setiap propinsi dan kabupaten/kota dapat menjadi acuan aparat daerah dalam untuk mengelola berbagai unsur ruang (seperti sumber daya alam, manusia dan buatan) secara optimal, serta mengembangkan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

d. Pelayanan masyarakat yang efisien

Untuk kepentingan stabilitas ekonomi dan politik selama ini pemerintah memegang kendali yang lebih besar terhadap sumber-sumber penerimaan dan

berbagai kebijaksanaan pelayanan masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat kebutuhan dasar masih sangat kurang, resiko investasi masih sangat besar, dan tingkat pendidikan rata-rata manusia di daerah masih rendah. Dengan semakin meningkatnya kemampuan kelembagaan dan kualitas aparat di daerah, sudah masanya sekarang untuk memperbesar kewenangan daerah dalam menata pembangunan di daerah. Keterlibatan pihak swasta sebagai mitra kerja sekaligus sebagai pelaku pembangunan perlu diperbesar, sejalan dengan kewenangan daerah yang semakin besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya. Hal ini ditujukan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.

Rencana tata ruang wilayah merupakan bentuk-bentuk kerangka komitmen publik (makro) jangka panjang tentang arah pengembangan wilayah dan cara-cara penyelenggaraan pembangunan daerah dalam mencapai tujuannya. Rencana umum tata ruang wilayah mengandung tujuan-tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan segenap sumber daya wilayah yang dimiliki daerah meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia. Rencana tata ruang wilayah disesuaikan dengan perkembangan wilayah berdasarkan pertimbangan pada lahan yang tersedia dalam suatu ruang wilayah. Pengertian wilayah sangat identik dengan pengertian kota.

2.1.1 Tata Guna Lahan

Ada tiga sistem yang berhubungan dengan penggunaan lahan kota menurut (Chapin, 1979:28-31), yaitu:

1. Sistem Aktivitas Kota, berhubungan dengan manusia dan lembaganya seperti rumah tangga, perusahaan pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam mengorganisasikan hubungan-hubungan mereka sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia dan keterkaitan antara yang satu dengan yang lain dalam waktu dan ruang. Dalam melakukan interaksi ini, melibatkan dimensi hubungan yang kadang-kadang menggunakan media tetapi tidak jarang juga berhadapan langsung dengan di dukung oleh sistem transportasi. Jadi, dalam konteks ini sistem aktivitas kota mewujudkan aktivitas-aktivitas antar tempat dan antar perjalanan dan tempat sebagai pelengkap kegiatan mereka.

Dengan kata lain, pergerakan diwujudkan dalam jaringan transportasi dan aktivitas dalam bentuk guna lahan.

2. Sistem Pengembangan Lahan, berhubungan dengan proses konversi atau rekonversi lahan (ruang) dan penyesuaiannya bagi kegunaan manusia dalam mendukung sistem aktivitas yang telah ada sebelumnya. Sistem pengembangan lahan ini berhubungan dengan lahan kota baik dari segi penyediaan maupun dari segi ekonominya.

Dalam sistem pengembangan lahan ini, unsur-unsur yang terlibat adalah pemilik lahan, developer, konsumen, agen keuangan dan agen-agen masyarakat.

3. Sistem Lingkungan, berhubungan dengan unsur-unsur biotik dan abiotik yang dihasilkan dari proses alam yang dikaitkan dengan air, udara dan zat-zat lain.

Sistem ini berfungsi untuk menyediakan tempat bagi kehidupan dan keberadaan manusia dan habitat serta sumber daya untuk mendukung kelangsungan hidup manusia.

Ketiga sistem tersebut akan saling mempengaruhi dalam membentuk struktur penggunaan lahan kota. Unsur yang paling mempengaruhi dalam pembentukan struktur ruang kota ini adalah sistem aktivitas karena biasanya suatu kota mempunyai penduduk yang padat dan banyak serta bermacam-macam kegiatan kota sehingga sistem aktivitas masyarakat kotanya akan jauh lebih baik berperan daripada sistem pengembangan lahan dan sistem lingkungannya. Pada dasarnya ketiga sistem tersebut apabila saling berinteraksi dan saling berhubungan satu dengan yang lain akan membentuk suatu pola penggunaan lahan kota. Pola penggunaan lahan kota ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan kotanya.

Guna lahan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan bentuk struktur kota. Bentuk struktur kota merupakan bentuk dasar dari struktur kota dan bentuk struktur kota ini merupakan pencerminan dari suatu struktur sosial kota. Pada satu sisi, perubahan kondisi sosial-ekonomi dapat mempengaruhi bentuk lahan kota dan disisi lain, guna lahan akan menggambarkan lokasi dan kegiatan kota, berpengaruh juga terhadap perkembangan sosial kota di masa depan.

Pada dasarnya pola penggunaan lahan kota merupakan penjabaran dari pola struktur tata ruang kota. Pada awalnya pola penggunaan lahan kota ini

didasarkan pada suatu pola produksi pertanian yang berhubungan dengan tata guna lahan di sekitar suatu kota pasaran.

Economic rent yang erat kaitannya dengan ongkos transport yang dikeluarkan sehubungan dengan lokasi suatu fungsi lahan. Dengan keadaan yang demikian, maka orang-orang yang tinggal dalam suatu wilayah perkotaan cenderung untuk memilih lahan sebagai tempat tinggalnya sesuai dengan kondisi ekonomi yang dimilikinya.

Kesimpulan yang di dapat dari teori ini adalah memberikan manfaat penelitian pada suatu sistem penzanaan dalam penggunaan lahan perkotaan yaitu dalam pembangian sistem wilayah pengembangan.

2.1.2 Pengertian Kota

Definisi kota; Tempat bermukim bagi sekelompok orang dengan berbagai fasilitas yang ada, dengan dominasi kegiatan jasa dan perekonomian dan bukan kegiatan pertanian. (Daldjoeni, 1998: 37). Dalam bukunya yang berjudul Geografi Kota dan Desa, menjelaskan pendapat dari berbagai tokoh atau para ahli tentang pendefinisian kota antara lain adalah :

1. *Meyer*, melihat kota sebagai tempat bermukim penduduknya; baginya yang terpenting dengan sendirinya bukan rumah tinggal, jalan raya, rumah ibadah, kantor, taman, kanal dan sebagainya melainkan adalah penghuni yang menciptakan segalanya itu. Pedesaan dirasa sebagai kawasan yang melingkupi kota; kota memiliki jiwanya sendiri; organisasinya, kesenian dan kebudayaan sendiri.

2. *Holmeister*, seorang geografer dari Jerman bahwa, kota adalah ; suatu pemusatan keruangan dari tempat tinggal dan tempat kerja manusia yang kegiatannya umum di sektor sekunder dan tersier, dengan pembagian kerja ke dalam dan arus lalu lintas yang beraneka ragam antara bagian-bagiannya dan pusat, yang pertumbuhannya sebagian besar disebabkan oleh tambahnya pendatang dan mampu melayani kebutuhan barang dan jasa bagi wilayah yang jauh letaknya.
3. *Hockveld*, seorang geografer dari Belanda bahwa dalam pendefinisian; kota harus ada aspek-aspek yang mendasarinya yaitu morfologi, jumlah penduduk, sosial ekonomi dan hukum.

- a. Morfologi

Mencirikan perbandingan kota dengan pedesaan pada fisik, di kota terdapat gedung-gedung tinggi dan besar yang serba berdekatan, sedangkan di pedesaan rumah tersebar dalam lingkungan alam fisis biotus.

- b. Jumlah Penduduk

Ukuran wilayah dikatakan kota diukur dengan jumlah penduduk. Di Indonesia pada tahun 1987 menggunakan kriteria kota;

Kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000-50.000 jiwa, kota sedang dengan jumlah penduduk 50.000-100.000 jiwa, kota besar dengan jumlah penduduk 100.000-1.000.000 jiwa dan kota metropolitan jumlah penduduk di atas 1.000.000 jiwa.

c. Hukum

Kota dikaitkan dengan adanya hak-hak hukum tersendiri bagi masyarakat penghuni kota.

d. Ekonomi

Gaya hidup kota adalah non agraris, dengan fungsi khas yang lebih kultural, industri dan perdagangan, ekonomi perniagaan.

e. Sosial

Hubungan antar penduduk secara sosial atau *impersonal*, orang bergaul secara luas/bebas, tetapi dengan pola kehidupan yang terkotak-kotak oleh kepentingan yang berbeda-beda.

Daya dukung fasilitas perkotaan dimaksudkan untuk melihat kondisi tingkat pelayanan sarana dan prasarana perkotaan bagi kebutuhan aktivitas penduduk perkotaan dalam menunjang fungsi dan peran kawasan di wilayah perkotaan. Dengan informasi tersebut diharapkan dapat diformulasikan kondisi kawasan terutama yang menyangkut keserasian dan keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan antara pengembangan kota inti dan pusat-pusat aktivitas. Formulasi kondisi kawasan tersebut mencakup permasalahan potensi, peluang serta tantangan yang ada maupun kecenderungan yang akan datang.

2.1.3 Teori Lokasi

Definisi teori lokasi dilandasi pada konsep lokasi, ada dua pendekatan yang dilakukan pada konsep teori lokasi yaitu:

1. Jangkauan barang atau pelayanan.

Jangkauan jarak yang mampu ditempuh untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga tertentu.

2. Ambang batas permintaan.

Merupakan batas ambang yang didefinisikan pada tingkat permintaan minimal yang dibutuhkan untuk mendukung keberadaan fungsi tertentu. (Daldjoeni 1997;134-135).

Strategi yang dilakukan untuk menetapkan lokasi pada tingkat pelayanan umum sehingga dapat memberikan pelayanan secara optimal adalah :

1. Diperoleh gambaran yang tepat pada tingkat karakteristik target populasi konsumen yang telah teridentifikasi.
2. Menetapkan distribusi ruang dari target populasi yang telah diidentifikasi.
3. Menetapkan area wilayah yang berpotensi untuk dialokasikan pada area fasilitas.
4. Menetapkan secara pasti terhadap lokasi fasilitas masing-masing area pelayanan (Bourne, 1982: 371-381).

Diperoleh manfaat dari teori tersebut diatas adalah: pergerakan kota merupakan aktivitas yang ada dalam ruang kota, baik ekonomi maupun jasa pelayanan umum, termasuk diantaranya urban/penduduk kota dan keberadaan fasilitas sarana prasarana pendidikan.

2.2 Pengembangan Sekolah

Kajian tentang pengembangan sekolah diawali dari teori-teori yang identik dan relevan dengan pendidikan.

2.2.1 Pengertian Pendidikan

1. *Dictionary Of Education.*

Pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), dan dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. (Dikti, 1984:19).

2. *Crow and Crow.*

Pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. (Suprpto, 1995).

Dari uraian di atas, bahwa yang dimaksud dengan pendidikan dalam penelitian ini adalah:

1. Suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan;
2. Suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak dalam pertumbuhannya;
3. Suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang dikehendaki oleh seseorang atau masyarakat;

4. Suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak dalam menuju kedewasaan.

2.2.2 Teori Pendidikan

Ada empat teori pendidikan, antara lain: pendidikan klasik, pendidikan pribadi, teknologi pendidikan dan teori pendidikan interaksional.

1. Pendidikan klasik (*classical education*);

Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik, seperti *perennialisme, essentialisme, dan eksistensialisme* yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan dari pada proses.

2. Pendidikan pribadi (*personalized education*);

Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Materi pengajaran berasal dari pengalaman peserta didik yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya.

3. Teknologi pendidikan

Teknologi pendidikan, lebih mengutamakan pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. Dalam konsep teknologi pendidikan, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus. Isi pendidikan

berupa data-data objektif dan keterampilan-keterampilan yang mengarah kepada kemampuan *vocational*.

4. Pendidikan interaksional

Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Lebih dari itu, interaksi ini juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. (Sukmadinata, 1997:15-17).

2.2.3 Konsep Pendidikan

Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan, dikelompokkan menjadi:

1. Pendidikan Baca Tulis Fungsional;

Dalam hal ini menunjukkan ketergantungan orang akan bahan bacaan. Realisasi pendidikan baca tulis fungsional adalah memberikan kecakapan membaca-menulis dan menghitung yang fungsional bagi anak didik dan menyediakan bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya.

2. Pendidikan *Vokasional*;

Pendidikan ini berperan sebagai program pendidikan luar sekolah bagi anak didik diluar batas usia sekolah, juga sebagai program pendidikan formal dan non formal dalam rangka *apprentice-skip training*. Pendidikan ini timbul karena *output* pendidikan sekolah pada umumnya dirasakan

kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan ini lebih bersifat remedial dengan tujuan agar para lulusan pendidikan itu menjadi tenaga kerja produktif.

3. Pendidikan Profesional;

Pada prinsipnya sama dengan sifat para pekerja buruh, karena apa yang berlaku pada pekerja buruh juga berlaku pada para profesional.

4. Pendidikan ke Arah Perubahan dan Pembangunan;

Pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan merupakan konsekuensi dari pendidikan seumur hidup.

5. Pendidikan Kewarganegaraan dan Kedewasaan Politik;

Tidak saja bagi warga negara biasa, melainkan para pemimpin masyarakatpun sangat membutuhkan pendidikan warga negara dan kedewasaan politik.

6. Pendidikan Kultural dan Pengisian Waktu Luang;

Seseorang disebut sebagai *educated man* harus memahami dan menghargai sejarah, kesusastraan agama, filsafat hidup, seni dan musik bangsa sendiri. (Ananda, 2005:48-51).

Teori ini digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang ada di masyarakat untuk membentuk berbagai jenis perubahan sikap dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan yang dialaminya adalah pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Melalui pendidikan

diharapkan setiap individu akan memiliki perubahan hidup dalam perjalanan kehidupannya.

2.2.4 Pengembangan Pendidikan

Ada lima prinsip pembelajaran berkualitas yaitu meliputi:

1. Belajar adalah suatu proses yang melibatkan tingkah laku, rangkaian peristiwa dan juga hasil.
2. Belajar adalah hasil dari pengalaman.
3. Belajar sangat tergantung pada apa yang dilakukan pembelajaran, hal tersebut tentu saja melibatkan bagaimana memahami, berpikir, merasakan, dan bagaimana bertindak.
4. Hal akhir dari proses belajar adalah terjadinya beberapa perubahan, perilaku, potensi dan aktualisasi diri.
5. Perubahan dalam diri pelajar cenderung sebagai akibat dari perilakunya dalam sistem motivasi. Clayton, (Baene, 1986:142), Toepfler, (Alessi 1990) *Curriculum, Planning and Developing*. Toronto: Allyn an Bacon, Inc.

Prinsip pembelajaran tersebut, menekankan bahwa belajar adalah bagaimana mereka merasakan, bertindak dan bereaksi terhadap yang mengenainya sehingga menghasilkan perubahan potensi dirinya maupun perubahan perilaku. Setiap proses pembelajaran sasaran utamanya adalah bagaimana tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud pembelajaran harus di desain dalam kerangka yang baik sesuai dengan kebutuhan murid/siswa serta memperhatikan kebutuhan-kebutuhan peserta didik serta

mempergunakan komponen pendidikan yang ada guna mencapai hasil pembelajaran yang bermutu.

Upaya memperbaiki kualitas dalam sekolah sangat ditentukan oleh mutu kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Dukungan dari bawah akan muncul secara berkelanjutan ketika pimpinannya benar-benar berkualitas atau unggul. (David 1996:149. Sekolah akan maju apabila dipimpin oleh kepala sekolah yang memiliki sifat visioner, memiliki keterampilan manajerial, serta integritas kepribadian dalam melakukan perbaikan mutu, sesuai dengan iklim disekolahnya. Oleh karena itu untuk mencapai sekolah yang efektif dalam mencapai harapan peserta didik unggulan tentu saja perlu diciptakan hal-hal yang baru dalam organisasi pendidikan, baik dalam hal pemilihan metode pengajaran, pembiayaan yang efektif, penggunaan alat-alat pengajaran, materi pengajaran dan kemampuan menciptakan output yang unggul dalam segala hal.

Teori ini dipakai sebagai pedoman untuk mencapai hasil pendidikan yang efektif, unggul dan bermutu dengan mengoperasionalkan secara maksimal semua organisasi sekolah yang ada (MBS), sehingga tercapainya *output* SDM yang berkualitas.

2.2.5 Pengembangan Pendidikan Kejuruan

Ada beberapa buku yang memuat tentang teori-teori pendidikan kejuruan, (Slamet, 1994:9-11), bahwa;

1. Pendidikan Kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan jika tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang diterapkan di tempat kerja

2. Pendidikan Kejuruan akan efektif jika individu dilatih secara langsung dan spesifik
3. Menumbuhkan kebiasaan kerja yang efektif kepada siswa akan terjadi hanya jika pelatihan dan pembelajaran yang diberikan berupa pekerjaan nyata dan bukan sekedar latihan

2.3 Hubungan Antara Pengembangan Wilayah dan Pendidikan

Kajian pengembangan wilayah memiliki aspek yang luas. Pengembangan wilayah tidak hanya menjangkau aspek-aspek pengembangan fisik, tetapi juga aspek ekonomi, kelembagaan dan manusia. Pembangunan daerah melalui pengembangan wilayah menuntut terciptanya manusia yang berkualitas, yang mempunyai kemampuan intelektual, ketrampilan kerja, dan daya saing tinggi. Permasalahan pembangunan daerah melalui pengembangan wilayah salah satunya disebabkan rendah kualitas sumber daya manusianya.

Peranan institusi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kaitannya dengan pengembangan dan pembangunan wilayah/daerahnya telah menarik perhatian akhir-akhir ini. Perencanaan pembangunan wilayah ditujukan untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, tertib dan aman (Riyadi, 2000). Lebih lanjut, Riyadi (2000) menyatakan bahwa peningkatan sumber daya manusia di daerah melalui sarana pendidikan dan pelatihan yang tepat dapat memicu pengembangan wilayah. Institusi pendidikan tidak hanya sebatas melaksanakan

pendidikan dan penelitian-penelitian (research), tetapi juga memainkan peranan penting di dalam mendukung pembangunan daerah melalui pengembangan wilayahnya di sektor ekonomi, social dan budaya (Arbo dan Benneworth, 2007).

Banyak peneliti yang meneliti hubungan antara pengembangan wilayah dan pendidikan. Diantaranya, Song Seng (2007), meneliti hubungan pembangunan/pengembangan wilayah dengan pendidikan kejuruan di Singapura. Song Seng menyatakan bahwa pendidikan kejuruan memerankan peranan yang krusial dalam pembangunan ekonomi dan social dalam sebuah bangsa.

Popescu dan Diaconu (2009) melakukan study tentang hubungan antara level pendidikan dengan pembangunan di Romania. Dalam kesimpulannya, “between the education and the development there is a strong correlation”, pendidikan dan pembangunan mempunyai hubungan yang kuat. Pendidikan menjadi salah satu cara menuju kesejahteraan bangsa. Karena, dampak dari pendidikan yang penting untuk kemajuan suatu bangsa, maka intervensi suatu bangsa untuk berinisiatif dan mendukung institusi-institusi yang bertanggungjawab dalam proses pendidikan. (“Education becomes a way towards the welfare state. Yet, the impact of education being essential for the progress of a nation, it is necessary that the state interfere in initiating and supporting the institutions responsible for the education process”, Popescu dan Diaconu, 2009).

Babatunde dan Adefabi (2005) melakukan study tentang hubungan jangka panjang pendidikan dan pembangunan ekonomi di Nigeria. Penelitian mereka meneliti hubungan jangka panjang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi antara tahun 1970 sampai 2003 di Nigeria. Mereka menguji pendidikan dengan dua cara.

Pertama, ketika pendidikan menjadi input dalam fungsi produksi, dan kedua, pendidikan mempengaruhi penguasaan teknologi. Berdasarkan analisis, temuan studi menyimpulkan ada hubungan jangka panjang antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang terdidik mempunyai pengaruh signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.

Kilpatrick (2004) melakukan study tentang institusi pendidikan dan training sebagai modal social dalam pembangunan daerah/wilayah di Australia. Kilpatrick berpendapat bahwa institusi pendidikan dan training memainkan peranan penting dalam pembangunan di daerah-daerah Australia. Dalam kesimpulannya, Kilpatrick menyatakan bahwa “education and training institutions are a key piece of interactional infrastructure in rural communities”. Pada intinya, institusi pendidikan dan training merupakan modal social yang bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan orang dan institusi pendidikan dalam memperoleh pengetahuan/ketrampilan.

2.4 Rangkuman

Berbagai landasan teori dan landasan operasional yang telah disajikan tersebut diatas serta sesuai dengan berbagai pendapat para ahli, maka pengembangan wilayah dan pengembangan potensi wilayah sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik fisik maupun non fisik, diantaranya adalah diimbangi dengan peningkatan SDM, perubahan dalam kehidupan sosial dan pola pikir serta aktifitas pergerakan seluruh penduduknya sangat mempengaruhi perkembangan wilayah dan kota.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh teori yang disampaikan oleh para ahli untuk dikaitkan dengan faktor-faktor yang akan mempengaruhi terhadap tema penelitian secara ringkas lihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1
LANDASAN TRORI DAN LANDASAN OPERASIONAL

No	Teori	Sumber	Ringkasan	Manfaat Kajian
1	Pengembangan Wilayah – Tata Guna Lahan – Pengertian Kota – Teori Lokasi	Chapin (1979:28-31), <i>Meyer, Holmeister, Hockveld, Djaldjoeni</i> , (1998 : 37) Daldjoeni (1997;134-135). Bourne, (1982: 371-381).	<ul style="list-style-type: none"> – Sistem Aktivitas Kota, berhubungan dengan manusia dan lembaganya seperti rumah tangga, perusahaan pemerintah dan lembaga-lembaga lain – Sistem Pengembangan Lahan, berhubungan dengan lahan kota baik dari segi penyediaan maupun dari segi ekonominya. – Sistem Lingkungan, berhubungan dengan unsur-unsur biotik dan abiotik yang dihasilkan dari proses alam yang dikaitkan dengan air, udara dan zat-zat lain. Pengertian Kota Adanya pergerakan kegiatan ekonomi dan jasa merupakan ; daya dukung fasilitas perkotaan dimaksudkan untuk melihat kondisi tingkat pelayanan sarana dan prasarana perkotaan bagi kebutuhan aktivitas penduduk perkotaan dalam menunjang fungsi dan peran kawasan di wilayah perkotaan. <ul style="list-style-type: none"> – Jangkauan jarak yang mampu ditempuh – Ambang batas permintaan. – ambang yang didifinsikan pada tingkat permintaan minimal yang dibutuhkan – Strategi yang dilakukan untuk menetapkan lokasi pada tingkat pelayanan umum sehingga dapat memberikan pelayanan secara optimal 	Hasil perolehan dari teori ini adalah pengenalan pada suatu sistem penzonaan dalam penggunaan lahan perkotaan. Pengembangan wilayah Kabupaten Brebes terbagi menjadi 3 zona wilayah pengembangan. Di peroleh dari teori ini adalah ; Pergerakan kota merupakan aktivitas yang ada dalam ruang kota, baik ekononi maupun jasa pelayanan umum, diantaranya urban/ penduduk kota dan keberadaan sekolah.
2	Pengembangan Sekolah - Pengertian Pendidikan	<i>Dictionary of Education</i> (Dikti,1984:19)	Proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya dalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol.	Teori ini sebagai acian bahwa untuk mencapai tujuan pengembangan pendidikan maka pembelajaran di desain sesuai kebutuhan siswa serta memperhatikan

Lanjutan.

		<i>Crow and Crow.</i> (Suprpto, 1995).	<ul style="list-style-type: none"> - Proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. - Pendidikan klasik (<i>classical education</i>) - Pendidikan pribadi (<i>personalized education</i>) - Teknologi pendidikan (<i>kemampuan vocational</i>) 	kebutuhan-kebutuhan, mempergunakan komponen-komponen pendidikan yang ada guna mencapai hasil belajar yang bermutu, sehingga hasil akhir dari pembelajaran dapat tercapai SDM yang berkualitas dan siap bersaing dengan pasar global.
	- Teori Pendidikan	Sukmadinata, (1997:15-17).	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Baca Tulis Fungsional; menyediakan bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya. - Pendidikan <i>Vokasional</i>; Lulusan pendidikan menjadi tenaga kerja produktif. 	
	- Konsep Pendidikan	Ananda, (2005:48-51)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Profesional ; Apa yang berlaku pada pekerja buruh juga berlaku pada para profesional. - Pendidikan ke Arah Perubahan dan Pembangunan; Pendidikan agar mampu mengikuti perubahansosial dan pembangunan. - Pendidikan Kewarganegaraan dan Kedewasaan Politik; Pendidikan bagi warga negara, pendidikan warga negara dan kedewasaan politik. - Pendidikan Kultural dan Pengisian Waktu Luang; Seseorang disebut sebagai <i>educated man</i>, memahami dan menghargai sejarah, kesusastraan agama, filsafat hidup, seni dan musik bangsa sendiri 	
	- Pengembangan Pendidikan	Clayton (Baene, 1986:142), J.A. Toepfler, C.F dan Alessi, S.J (1990) Curriculum, Planning and Developing. Toronto : Allyn an	<ul style="list-style-type: none"> - Belajar adalah suatu proses yang melibatkan tingkah laku, rangkaian peristiwa dan juga hasil. - Belajar adalah hasil dari pengalaman - Belajar sangat tergantung pada apa yang dilakukan pembelajaran, - Hal akhir dari proses belajar adalah terjadinya beberapa perubahan, perilaku, potensi dan aktualisasi diri. <p>Perubahan dalam diri pelajar cenderung sebagai akibat dari perilakunya dalam sistem motivasi.</p>	

Lanjutan.

3	<p>– Teori Pendidikan Kejuruan</p> <p>Teori Hubungan Pengembangan Wilayah dan Pendidikan</p>	<p>Bacon, Inc (16 Teori Pendidikan Kejuruan dalam Prosser and Allen, 1925 dalam Slamet, PH 1994:9-11)</p> <p>Song Seng (2007:1-27)</p> <p>Popescu dan Diaconu (2009:475-480)</p> <p>Babatunde dan Adefabi (2005: 1-22)</p> <p>Kilpatrick (2004:1-15)</p>	<p>Pendidikan Kejuruan yang efektif adanya alat kerja yang dapat diterapkan di tempat kerja</p> <p>Pendidikan Kejuruan akan efektif dengan latihan langsung dan spesifik Menumbuhkan kebiasaan kerja yang efektif dengan pekerjaan yang nyata</p> <p>Pendidikan kejuruan memerankan peranan yang krusial dalam pembangunan ekonomi dan social dalam sebuah bangsa</p> <p>Pendidikan dan pembangunan mempunyai hubungan yang kuat pendidikan menjadi salah satu cara menuju kesejahteraan bangsa</p> <p>Mereka menguji pendidikan dengan dua cara. Pertama, ketika pendidikan menjadi input dalam fungsi produksi, dan kedua, pendidikan mempengaruhi penguasaan teknologi. Berdasarkan analisis, temuan studi menyimpulkan ada hubungan jangka panjang antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi</p> <p>Study tentang hubungan jangka panjang pendidikan dan pembangunan ekonomi di Nigeria</p> <p>Study tentang institusi pendidikan dan training sebagai modal social dalam pembangunan daerah/wilayah di Australia</p>	<p>Pentingnya sekolah kejuruan dalam pengembangan wilayah berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial</p> <p>Pemerintah perlu berinisiatif dan mendukung institusi-institusi yang bertanggungjawab dalam proses pendidikan</p> <p>Tenaga kerja yang terdidik mempunyai pengaruh signifikan dalam pertumbuhan ekonomi</p> <p>Institusi pendidikan dan training merupakan modal social yang bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan orang dan institusi pendidikan dalam memperoleh pengetahuan/ketrampilan</p>
---	--	--	--	--

Sumber : Hasil Analisis, 2008

BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH KABUPATEN BREBES

3.2 Potensi Wilayah Kabupaten Brebes

Luas wilayah Kabupaten Brebes adalah 1661,17 km², yang tersebar di 17 Kecamatan, 242 Desa dan 5 Kelurahan dengan topografi 5 Kecamatan merupakan daerah pantai, 9 Kecamatan dataran rendah dan 3 Kecamatan dataran tinggi serta di batas wilayah geografi yang terdiri dari ; wilayah utara adalah pantai utara Laut Jawa, timur Kota dan Kabupaten Tegal, selatan Kabupaten Banyumas dan barat Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Jarak terjauh dari utara ke selatan sejauh 58 Km dan dari barat sampai ke timur sejauh 50 Km.

Kabupaten Brebes diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi. Dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati dengan dibantu oleh Sekretaris Daerah dan perangkat pemerintah yang ada.

3.3 Potensi Wilayah

Dari luas wilayah yang ada terdiri dari ; lahan sawah 63.343 Ha, pekarangan/bangunan 18.557 Ha, tegalan/kebun 17.498 Ha, tambak/kolam/rawa-rawa 7.648 Ha, hutan rakyat/tanaman kayu-kayuan 3.883 Ha, hutan negara 48.620 Ha, lain lain 6.568 Ha.

3.2.1 Potensi Ekonomi

Luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk merupakan sumber kekuatan ekonomi. Dari 9 sektor potensi ekonomi memberikan kontribusi melalui PDRB saat ini merupakan andalan potensi ekonomi wilayah (BPS Kabupaten Brebes 2006).

3.2.1.1 Pertanian

Luas tanah sawah seluas 63.343 Ha dan lahan kering (belum diolah) seluas 102.675 Ha atau sama dengan 166.018, sedangkan luas lahan yang dipergunakan sebagai areal pertanian sebesar 63.343 Ha, tingkat produksi luas panen sebesar 88.410 Ha artinya ada 25.067 Ha tanah sawah yang telah menggunakan lahan kering, dengan hasil produksi sebesar 57.665 Kw. Dari data tersebut masih terdapat 102.675 Ha lahan yang belum diolah. Kontribusi yang masuk ke PDRB sebesar Rp. 4.612.886.106.210,-

Untuk tanaman pangan lahan kering didasarkan kriteria pada luas lahan dan tingkat produktivitasnya, sentra-sentra pengembangannya lihat Tabel III.1

TABEL III.1
SENTRA PENGEMBANGAN LAHAN
DI KABUPATEN BREBES

No.	SWP	Wilayah Pengembangan Lahan Sawah	Wilayah Pengembangan Lahan Kering
1.	SWP I	Kec. Songgom Kec. Jatibarang	Kec. Brebes Kec. Wanasari
2.	SWP II	Kec. Banjarharjo Kec. Larangan	Kec. Banjarharjo Kec. Ketanggungan
3.	SWP III	Kec. Paguyangan Kec. Bumiayu Kec. Tonjong	Kec. Salem Kec. Sirampog Kec. Paguyangan Kec. Bantarkawung

Sumber : Kabupaten Brebes Dalam Angka 2007

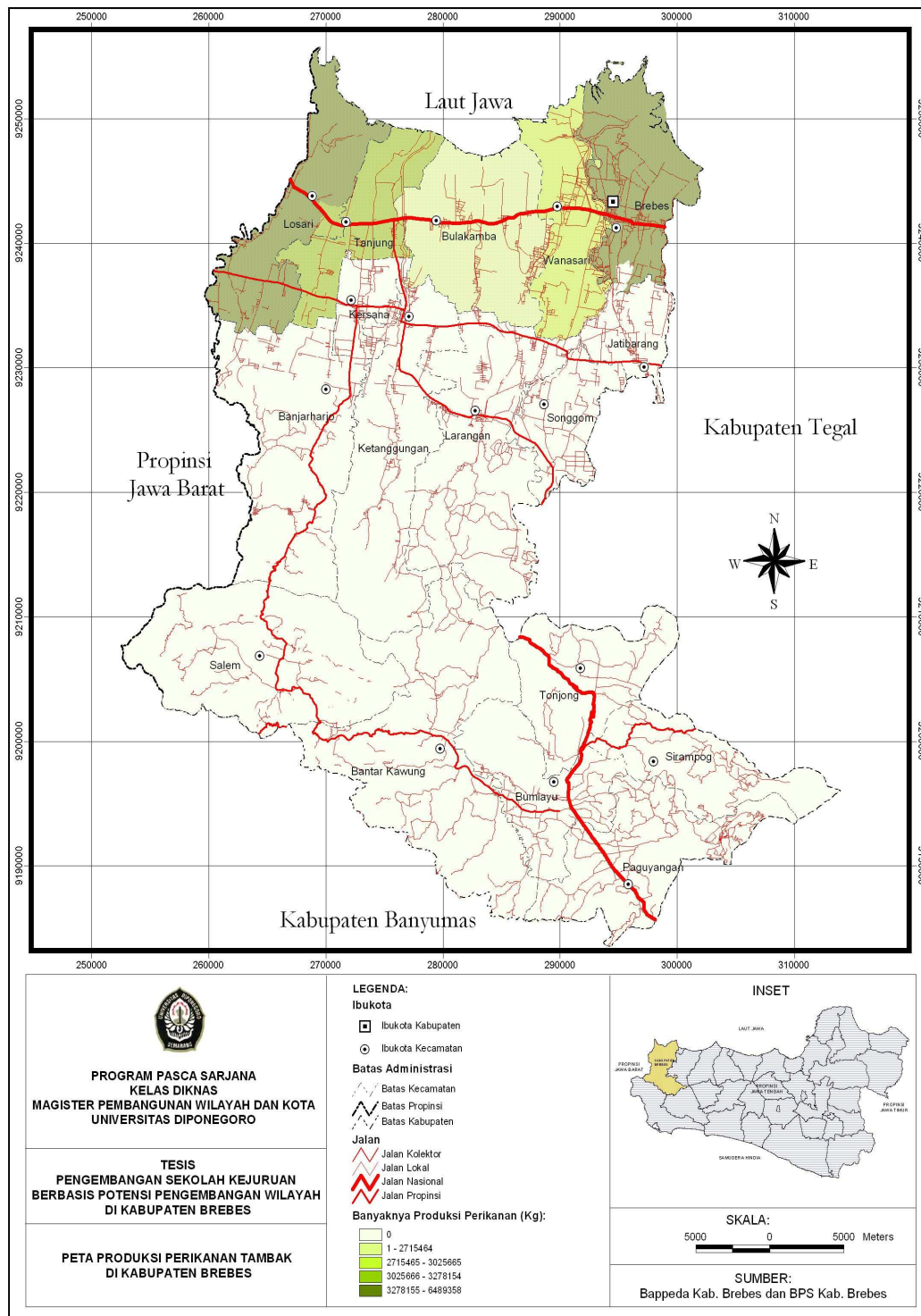
Kawasan perikanan di Kabupaten Brebes mencakup perikanan darat, laut dan tambak, dengan orientasi pengembangan pada pemanfaatann potensi.

Rencana yang akan dilaksanakan adalah:

1. Kawasan darat yang berbentuk kolam/empang, kali dan waduk.
 - a. Pusat pengembangan perikanan kolam di Kecamatan Salem dan Bantarkawung.
 - b. Pusat pengembangan perikanan waduk di Malahayu dan Penjalin.
2. Kawasan tambak dengan konservasi dan penataan kawasan tambak agar terjaga kualitas dan kuantitas produksi di Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari dan Brebes.
3. Kawasan laut dengan optimalisasi wilayah 0-4 mil laut, pengembangan dermaga ikan, TPI dan pasar ikan serta terciptanya pelabuhan laut yang lebih representatif.

Produksi ikan laut pada tahun 2007 mencapai 2.468.788 kg, dengan nilai rupiah sebanyak Rp. 4.346.731.000,- Tingkat kontribusi dari sektor pertanian yang masuk ke PDRB sebesar Rp. 4.612.886.106.210,-

Pada sub sektor perikanan tambak masih memiliki peluang potensi yang dapat dikembangkan, lihat Gambar 3.1.



Sumber : Hasil Analisis, 2008

GAMBAR 3.1
PETA PRODUKSI PERIKANAN
TAMBAK DI KABUPATEN BREBES

3.2.1.2 Pertambangan dan Penggalian

Kondisi alam yang beraneka ragam di Kabupaten Brebes merupakan sumber daya alam yang ada sangat berpotensi untuk diberdayakan, pada sektor pertambangan dan penggalian hanya mengandalkan pada 22 sungai besar yang ada dan 2 waduk. Kontribusi ke PDRB sebesar Rp. 102.673.927.790,-

3.2.1.3 Industri Pengolahan

Kegiatan industri di Kabupaten Brebes dibagi menjadi beberapa jenis kelompok dan cabang yaitu (1) kelompok industri formal cabang industri agro, (2) kelompok industri formal cabang tekstil (3) kelompok industri formal cabang mesin dan logam (4) kelompok industri formal elektronik dan aneka dan (5) kelompok industri non formal kimia, agro dan hasil hutan.

Nilai produksi di Kabupaten Brebes masih sangat rendah lihat Tabel

III.2

TABEL III.2
POTENSI KELOMPOK INDUSTRI DAN NILAI PRODUKSI
DI KABUPATEN BREBES 2007

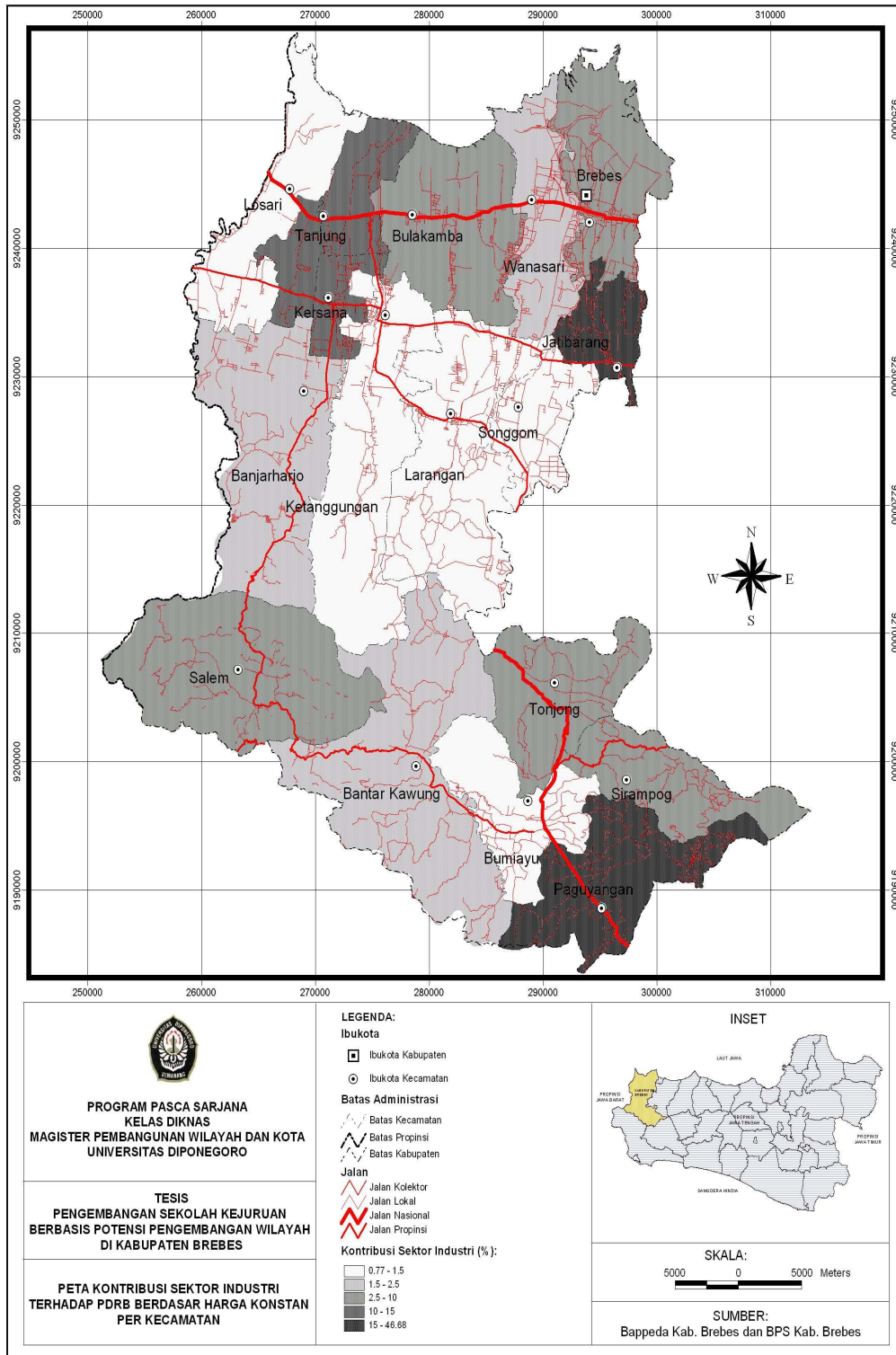
No.	Kelompok Usaha	Jmlh Unit Usaha	Jmlh Tenaga Kerja	Hasil Produk	Nilai Produksi (000)	%
1.	Kelompok Industri Formal Cabang Industri Agro	456	2.918	-	79.584.325	21,96
2.	Kelompok Industri Formal Cabang Tekstil	24	154	-	4.835.390	1,33
3.	Kelompok Industri Formal Cabang Mesin dan Logam	96	314	-	7.148.968	1,97
4.	Kelompok Industri Formal Elektronik dan Aneka	3.147	7.828	-	196.801.304	54,30
5.	Kelompok Industri Non Formal Kimia, Agro dan Hasil Hutan	509	1.222	-	74.097.000	20,44
J u m l a h		4.232	12.436	-	362.466.987	100

Sumber : Kabupaten Brebes Dalam Angka 2007

Pembangunan di sektor industri merupakan prioritas utama pada pembangunan ekonomi tetapi tanpa mengesampingkan sektor yang lain. Ada 2 jenis industri pengolahan yang dilakukan masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat ;

1. Industri migas, di Kabupaten Brebes tidak ada pengelolaan industri migas.
2. Industri non migas, berbagai macam industri non migas diantaranya adalah industri kerajinan dan lain-lain.

Kontribusi yang masuk ke PDRB sebesar Rp. 815,311,601.45. Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB per kecamatan tingkat penyebarannya tidak merata, lihat Gambar 3.2



Sumber : Hasil Analisis, 2008

GAMBAR 3.2

**PETA KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB
BERDASAR HARGA KONSTAN PER KECAMATAN**

3.2.1.4 Listrik, Gas dan Air

1. Listrik, dalam upaya mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan dan pengembangan listrik terus ditingkatkan. Ada 3 unit pelayanan jaringan listrik ; UPJ Jatibarang dengan memiliki 97.431 pelanggan, UPJ Brebes dengan memiliki 71.781 pelanggan dan UPJ Bumiayu dengan memiliki 5.757.099 pelanggan.
2. Air Bersih, air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia, sejalan dengan pertambahan penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhan air. Tingkat kebutuhan air berarti bertambah pula pelanggan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak bisa diimbangi dengan jumlah penyediaan karena air adalah sumber daya alam yang tidak bisa di tambah. Data yang ada terdapat 15.287 yang dikelola oleh Perusahaan Air Mimum (PDAM). Kontribusi ke PDRB sebesar Rp. 71.591.737.400,-

3.2.1.5 Bangunan

Kontribusi PDRB atas dasar harga yang berlaku bidang usaha bangunan sebesar Rp. 168.840.744.900,-

3.2.1.6 Perdagangan, Restoran dan Hotel

Kawasan pariwisata masih dalam lingkup pelayanan lokal, walaupun ada beberapa yang dapat dikembangkan untuk lebih dari lokal. Ada 7 jenis kawasan wisata alam yang potensial yaitu :

1. Wisata alam Telaga Renjeng dan Perkebunan Teh Kaligua, di Kecamatan Paguyangan
2. Waduk Penjalin Berlokasi di Kecamatan Paguyangan.
3. Waduk Malahayu. Berlokasi di Kecamatan Banjarharjo.
4. Pemandian air panas Cipanas Buaran, Lokasi di Kecamatan Bantarkawung.
5. Pemandian air panas Tirta Husada Kedungoleng, bertempat di Kecamatan Paguyangan.
6. Pantai Randusanga kulon, terletak kota Brebes.
7. Air terjun Curug Puteri dengan lokasi di Kecamatan Sirampog.

Kawasan pariwisata masih kurang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang yang membuat daya tarik wisatawan meliputi ; hiburan, penginapan dan juga prasarana kemudahan lainnya yang dapat diidentifikasi sebagai hotel/penginapan, rumah makan/restoran, kios toko dan bursa cinderamata, bioskop serta sarana hiburan lainnya.

Selama setahun terakhir sektor pariwisata mengalami kenaikan jumlah pengunjung dan pendapatan hasil penjualan karcis. Pada tahun 2007 jumlah pengunjung mencapai 267.075 orang dengan pendapatan penjualan sebesar Rp. 577.354.200,- Kelompok kegiatan yang dilakukan masyarakat pada sektor perdagangan, restoran dan perhotelan yaitu ; perdagangan besar dan kecil, hotel dan restoran. Kontribusi ke PDRB sebesar Rp. 1.759.675.840.920,-

3.2.1.7 Pengangkutan dan Komunikasi

1. Pengangkutan

Kendaraan bermotor adalah merupakan angkutan utama di Kabupaten Brebes. Jumlah kendaraan bermotor wajib uji dan yang telah diuji mencapai 5.742 kendaraan, yang terdiri dari kendaraan umum 1.919 dan bukan umum 3.823. Jumlah ini diluar kendaraan pribadi.

2. Komunikasi

Berbagai macam sarana komunikasi yang ada merupakan sarana untuk mempermudah hubungan antar sesama manusia dalam upaya untuk memudahkan interaksi. Tidak dapat dirinci secara pasti banyak dan jenisnya, pemahaman alat komunikasi adalah ; pos dengan jumlah surat yang dikirim dari dalam negeri sebanyak 902.440 buah, dan surat diterima sebanyak 1.046.062 buah, sedangkan pelanggan telpon rumah sebanyak 61.7407.

Kontribusi pengangkutan dan telekomunikasi yang masuk ke PDRB sebesar Rp. 310.400.310.650,-

3.2.1.8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Ada 5 jenis kegiatan yang terdiri dari ; bank, lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan. Kontribusi ke PDRB sebesar Rp. 214.345.851.750,-

3.2.1.9 Jasa-jasa

Ada 2 jenis kelompok kegiatan pada sektor jasa-jasa yang terdiri dari ; Pemerintahan umum dan swasta. Kontribusi yang masuk ke PDRB sebesar Rp. 346.331.134.960,-

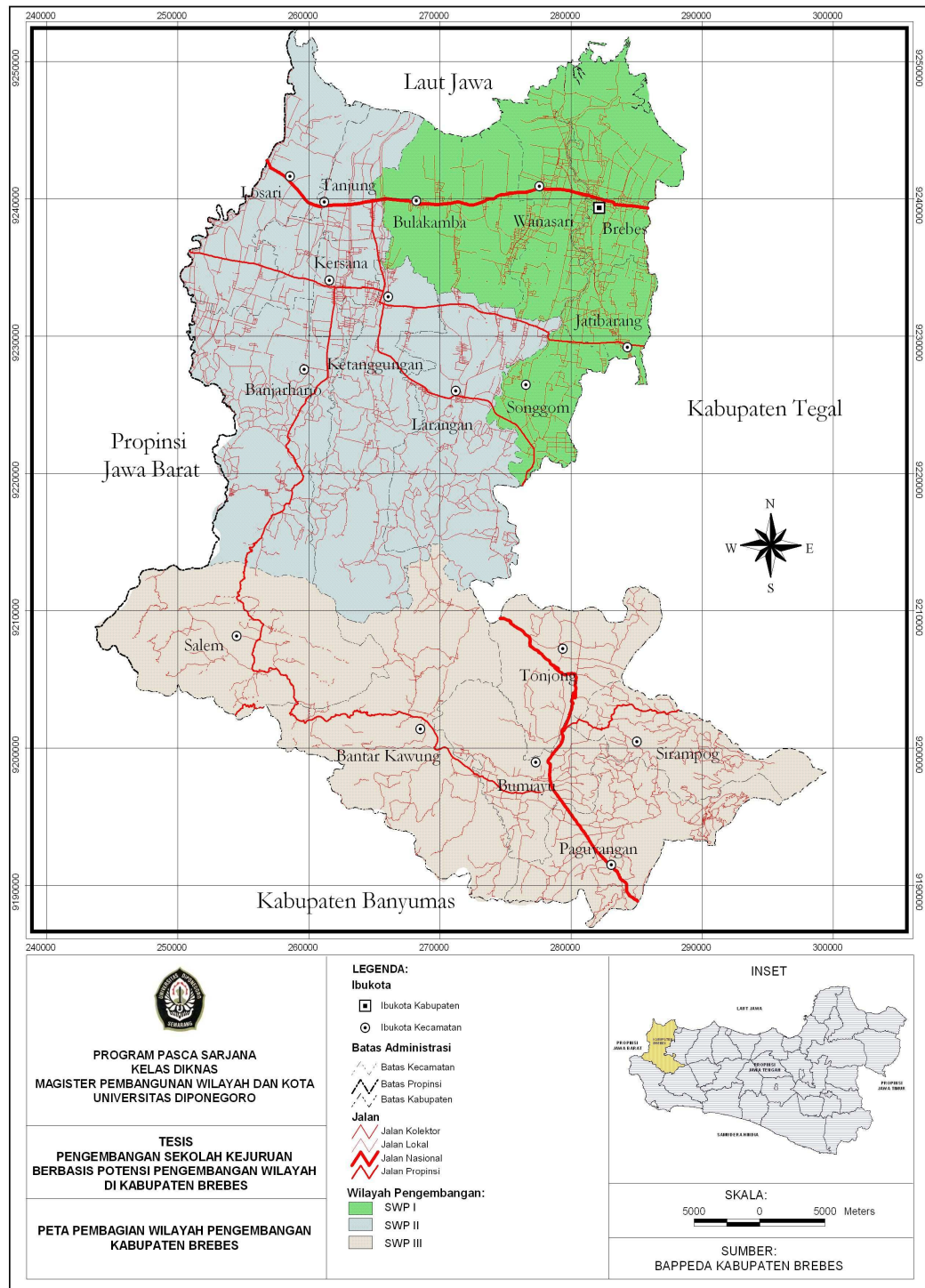
Dari 9 sektor tersebut diatas, ada 4 sektor lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDRB) yaitu :

1. Pertanian, sebesar Rp. 4,612,886,106.210,-
2. Industri, sebesar Rp. 815,311,601.450,-
3. Perdagangan dan Jasa, sebesar Rp. 1,759,675,840.920,-
4. Lainnya, sebesar Rp. 1.214.183.707.440,-

Secara umum sona potensi pengembangan dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan :

1. SWP I yang berbatasan langsung dengan laut Jawa memiliki potensi besar untuk sektor perikanan, baik perikanan darat maupun perikanan laut, agro industri pertanian dan peternakan agrowisata pantai.
2. SWP II memiliki potensi besar untuk sektor perdagangan dan industri pengolahan khususnya untuk hasil produksi pertanian dan perkebunan, perikanan serta perikanan baik perikanan darat maupun perikanan laut.
3. SWP III karena wilayahnya yang cukup luas dan masih subur sangat berpotensi untuk wilayah perdagangan, pertanian dan perkebunan, industri dan pariwisata.

Lihat Gambar 3.3



Sumber : Hasil Analisis, 2008

**GAMBAR 3.3
PETA PEMBAGIAN WILAYAH PENGEMBANGAN
DI KABUPATEN BREBES**

3.2.2 Potensi Tenaga Kerja

3.2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi tenaga kerja pada dasarnya adalah sumber daya manusia menyangkut mengenai jumlah penduduk dan angkatan kerja. Berdasarkan hasil registrasi jumlah penduduk tahun 2007 tercatat 1.736.401 jiwa. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk terus bertambah dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,34% sehingga walaupun jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus bertambah namun pertumbuhannya mempunyai kecenderungan menurun.

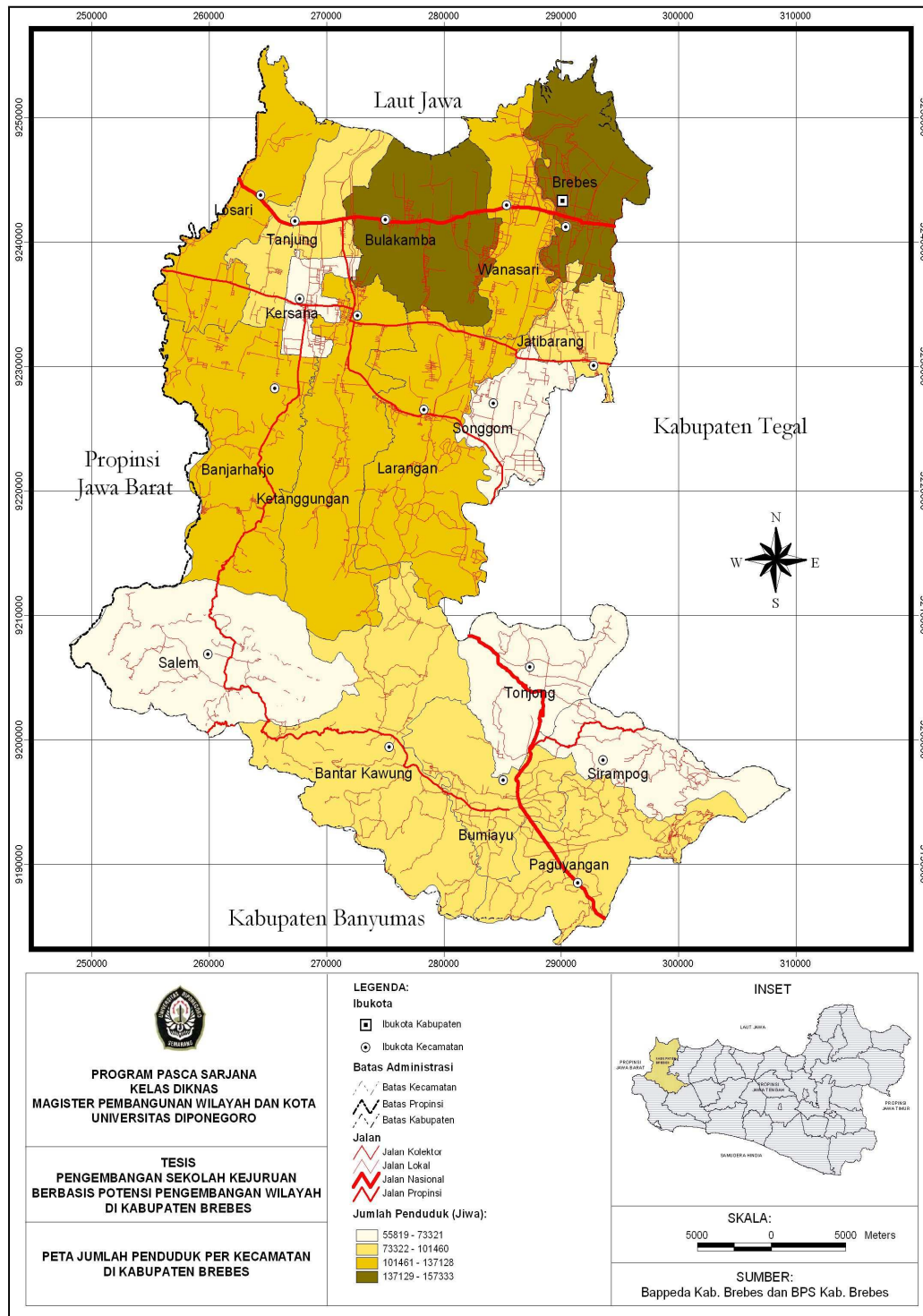
Dari jumlah penduduk tersebut, pada pembagian kelompok sebagai berikut : usia 0 - 4 tahun sebanyak 177.052 (10.26 %), usia 6 - 9 tahun sebanyak 198.161 (11.48 %), usia 10 – 14 tahun sebanyak 202.515 (11.48 %), usia 15 -19 tahun sebanyak 189.230 (10.97 %), usia 20 – 24 tahun sebanyak 149.336 (8.65 %), dan pada usia 25 – 29 tahun sebanyak 141.394 (8.19 %). Dengan pertambahan penduduk rata-rata tiap tahun 0,34 %. (BPS Kabupaten Brebes 2007), (Kabupaten Brebes Dalam Angka, 2007). Secara rinci lihat Tabel III.3.

TABEL III.3
JUMLAH PENDUDUK KESELURUHAN DAN
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA
DI KABUPATEN BRBES TAHUN 2007

No	Kecamatan	Penduduk																				
		Seluruhnya			Kelompok Usia																	
					Usia 0 - 4			Usia 5 - 9			Usia 10 - 14			Usia 15 - 19			Usia 20 - 24			Usia 25 - 29		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Salem	28.384	27.710	56.094	2.723	2.645	5.368	2.911	2.732	5.643	2.686	2.372	5.058	2.425	2.258	4.683	2.199	2.414	4.613	2.592	2.938	5.531
2	Bantarkawung	45.802	45.735	91.537	4.795	4.602	9.397	5.082	4.863	9.945	4.888	4.747	9.635	4.786	4.099	8.885	3.572	3.788	7.360	3.896	4.348	8.244
3	Bumayu	50.904	51.326	102.230	5.365	5.069	10.434	5.959	5.557	11.516	6.228	5.973	12.201	6.222	5.485	11.707	4.134	4.161	8.295	3.951	3.969	7.920
4	Paguyangan	45.021	45.011	90.032	5.291	4.957	10.248	5.794	5.492	11.286	5.494	5.103	10.597	5.002	4.195	9.197	3.611	3.800	7.411	3.576	3.666	7.242
5	Sirampog	29.723	30.850	60.573	3.194	3.151	6.345	3.775	3.655	7.430	3.978	3.967	7.945	3.693	3.553	7.246	2.321	2.508	4.829	2.205	2.408	4.614
6	Tanjong	34.154	34.583	68.747	3.570	3.313	6.883	4.408	4.383	8.791	4.641	4.343	8.984	3.773	3.261	7.034	2.365	2.366	4.731	2.282	2.803	5.085
7	Larangan	69.139	68.934	138.073	6.840	6.568	13.408	7.940	7.644	15.584	8.368	7.708	16.076	7.665	6.679	14.344	5.734	6.048	11.782	5.668	5.816	11.474
8	Ketanggungan	64.867	66.144	131.011	6.851	6.882	13.733	7.620	7.136	14.756	7.389	7.262	14.651	6.886	6.494	13.380	5.379	5.899	11.248	5.163	5.572	10.735
9	Banjarihajo	57.418	58.357	115.775	5.635	5.608	11.243	5.981	5.622	11.603	6.187	5.955	12.142	5.545	5.405	10.950	4.527	4.788	9.315	4.745	5.035	9.751
10	Losari	61.640	61.646	123.286	6.535	6.291	12.826	7.246	6.905	14.152	7.186	6.552	13.738	6.951	6.517	13.468	5.174	5.591	10.755	4.965	4.926	9.882
11	Tanjong	45.904	46.568	92.472	5.162	4.871	10.033	5.643	5.422	11.065	5.358	5.354	10.712	5.270	5.098	10.368	4.271	4.443	8.714	3.826	3.722	7.548
12	Kersana	31.570	31.005	62.575	3.429	3.127	6.556	3.572	3.393	6.965	3.363	3.149	6.512	3.605	3.269	6.874	2.728	2.782	5.510	2.872	2.553	5.225
13	Bubekamba	79.393	78.272	157.665	8.323	8.027	16.350	9.825	9.222	19.047	10.064	9.670	19.734	9.624	9.260	18.884	7.134	7.452	14.586	6.341	6.230	12.571
14	Wanasari	68.493	68.120	136.613	6.983	6.909	13.892	8.103	7.745	15.848	8.875	8.752	17.627	8.363	7.881	16.244	6.107	6.366	12.473	5.511	5.382	10.893
15	Songgom	36.947	36.437	73.384	3.886	3.731	7.617	4.829	4.586	9.415	4.677	4.529	9.206	4.239	3.504	7.743	2.650	2.827	5.477	2.718	2.871	5.589
16	Jatibarang	39.633	39.927	79.560	3.899	3.749	7.648	4.241	4.000	8.241	4.460	4.304	8.764	4.778	4.392	9.170	3.670	3.687	7.357	3.291	3.120	6.411
17	Brebes	77.171	77.613	154.784	7.748	7.583	15.331	8.678	8.205	16.883	9.262	9.071	18.333	9.714	9.339	19.053	7.315	7.365	14.680	6.283	6.306	12.589
Jumlah		867.163	869.238	1.736.401	90.169	86.883	177.052	101.587	96.574	198.161	103.684	98.821	202.515	98.941	90.689	189.230	73.091	76.245	149.336	69.483	71.906	141.384

Sumber : BPS Kabupaten Brebe7

Tingkat kepadatan dan penyebaran penduduk tidak merata per kecamatan dilihat pada Gambar 3.4.



Sumber: Hasil Analisis, 2008

**GAMBAR 3.4
PETA JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN
DI KABUPATEN BREBES**

3.2.2.2 Angkatan Kerja

Dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah angkatan kerja yang memiliki pendidikan tidak tamat SD sebanyak 411.817 orang, sedangkan yang memiliki pendidikan tamat SD sebanyak 457.004 orang, yang memiliki pendidikan tamat SLTP sebanyak 79.796 orang, yang memiliki pendidikan tamat SLTA sebanyak 63.364 orang, dan sebanyak 14.994 orang menamatkan pendidikan diploma dan di atasnya. Lihat Tabel III.4

TABEL III.4
KONDISI PENDUDUK DAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BREBES

No.	Komponen	Jumlah
1	Total penduduk	1.725.708
2	Penduduk usia 7-12 tahun	241.297
3	Penduduk usia 13-15 tahun	119.684
4	Penduduk 16-18 tahun	114.142
5	Tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun>	
	Tidak/belum pernah sekolah	276.364
	Tidak/belum tamat SD	570.364
	Tamat SD	472.185
	Tamat SLTP	138.547
	Tamat SLTA	75.831
	Tamat Diploma 1 dan 2	5.518
	Tamat Diploma 3	2.884
	Tamat Sarjana	10.148
	Tidak terjawab	176.152
6	Tingkat kependidikan membaca	
	Dapat membaca dan menulis	1.706.660
	Buta aksara	21.048
7	Angkatan kerja	
	Bekerja	745.538
	Mencari pekerjaan	59.285
8	Bukan angkatan kerja	
	Bersekolah	210.348
	Mengurus rumah tangga	252.217
	Lainnya	87.002
9	Penduduk miskin	
	Kota	243.452
	Desa	452.123

Sumber : BPS Kabupaten Brebes 2007

Jumlah angkatan kerja sesuai dengan tingkat pendidikan di Kabupaten Brebes masih sangat rendah, dibanding dengan besarnya jumlah penduduk, data yang ada dari BPS menunjukkan jumlah angka angkatan kerja menurut tingkat pendidikan lihat Tabel III.5

TABEL III.5
JUMLAH ANGKATAN KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI
KABUPATEN BREBES TAHUN 2006

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	ANGKATAN KERJA
1	Tidak tamat SD	411.817
2	Tamat SD	457.004
3	Tamat SLTP	79.796
4	Tamat SLTA	63.364
5	Diploma Ke atas	14.994
Jumlah Angkatan Kerja		1.026.975

Sumber : BPS Kabupaten Brebes2007

Besarnya angkatan kerja yang berpendidikan rendah terkait erat dengan kondisi geografis Kabupaten Brebes yang sebagian besar untuk sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor kegiatan ekonomi yang dapat menampung banyak tenaga kerja tanpa memandang tingkat pendidikan. Hal ini juga dimungkinkan oleh faktor lain bahwa penduduk Kabupaten Brebes yang memiliki pendidikan lebih tinggi banyak yang berdomisili di daerah lain yang lebih maju.

3.1 Kondisi Pendidikan

3.3.1 Potensi Pendidikan

Pada tingkat sekolah menengah, jumlah SMA, SMK, dan MA sebanyak 83, siswa baru tingkat I sebesar 12.234, siswa seluruhnya sebanyak 32.480 dan lulusan sebanyak 8.118. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 857. Guru yang mengajar di SMA , SMK dan MA sebanyak

2.220. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA , SMK dan MA terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 51, lapangan olahraga sebanyak 52 ruang, UKS sebanyak 38 laboratorium sebanyak 49 keterampilan sebanyak 19 BP sebanyak 69, serba guna sebanyak 19. Bengkel sebanyak 12 dan ruang praktik sebanyak 20. Data pokok SMA, MA dan SMK tahun 2007 tersebut lihat Tabel III.8

TABEL III.6
DATA POKOK SMA , MA DAN SMK
DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2007

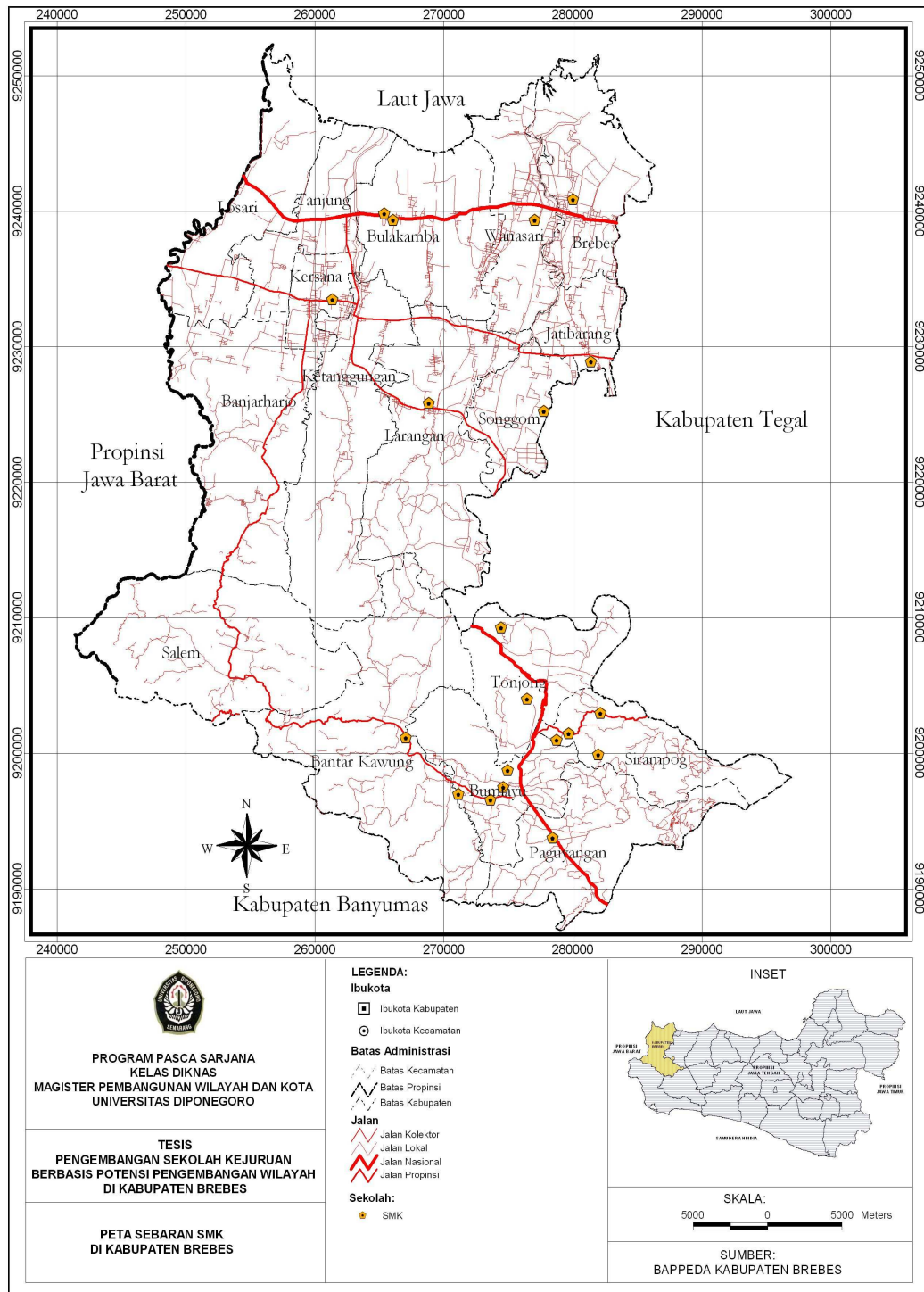
No.	Komponen	SMA	MA	SMK	SM+MA
1.	Sekolah	32	21	30	83
2.	Siswa Baru Tk. 1	6.101	1.670	4.463	12.234
3.	Siswa	16.945	4.340	11.195	32.480
4.	Lulusan	4.835	973	2.310	8.118
5.	Ruang Kelas				
	a. Baik	410	105	278	852
	b. Rusak Ringan	16	15	19	50
	c. Rusak Berat	5	7	2	14
6.	Kelas	418	136	304	868
7.	Guru				
	a. Layak mengajar	831	309	409	1.549
	b. Semi layak	126	95	223	444
	c. Tidak layak	47	59	121	227
8.	Fasilitas				
	a. Perpustakaan	28	10	16	54
	b. Lapangan olahraga	24	13	15	52
	c. UKS	19	6	13	38
	d. Laboratorium	33	9	7	49
	e. Keterampilan	9	5	5	19
	f. BP	31	18	20	69
	g. Serbaguna	10	2	7	19
	h. Bengkel	1	0	11	12
	i. Ruang Praktik	0	1	19	20

Sumber: Profil Dinas P dan K Ka.b Brebes, 2007

3.3.2 Kondisi Sekolah Kejuruan

Sekolah Kejuruan atau SMK pada tahun 2007 mencapai 30 sekolah, baik sekolah kejuruan swasta maupun negeri dengan kelulusan sebesar 2.310

siswa. Ruang kelas yang dimiliki sebanyak 304 ruang, sedangkan guru yang mempunyai kredibilitas dalam mengajar sebanyak 409 guru. Adapun fasilitas yang dimiliki adalah ruang perpustakaan sebanyak 16 ruang , untuk ruang laboratorium sebanyak 7 ruang, ruang ketrampilan sebanyak 5 ruang, ruang bengkel sebanyak 11 dan ruang praktik sebanyak 19 ruang. Terdapat tidak meratanya tingkat sebaran SMK di Kabupaten Brebes, lihat Gambar 3.5



Sumber : Hasil Analisis, 2008

**GAMBAR 3.5
PETA SEBARAN SMK
DI KABUPATEN BREBES**

Jenis kelompok pendidikan SMK di Kabupaten Brebes terdapat 2 kelompok besar yaitu kelompok program jurusan Teknik Mesin/Teknik Industri (Teknik Mesin Otomotif dan Industri) dan Bisnis/Menejemen (Akuntansi, Administrasi Kantor dan Penjualan) ditambah 1 kelompok kecil jurusan Pertanian (Teknologi Pertanian) 2 kelas sebanyak 86 siswa, tempat sekolahnya menjadi satu dengan SMK Bulakamba Kecamatan Bulakamba, merupakan embrio sekolah kejuruan dengan program jurusan teknologi pertanian. Jumlah siswa SMK menurut kelompok tidak merata, lihat Tabel III.7

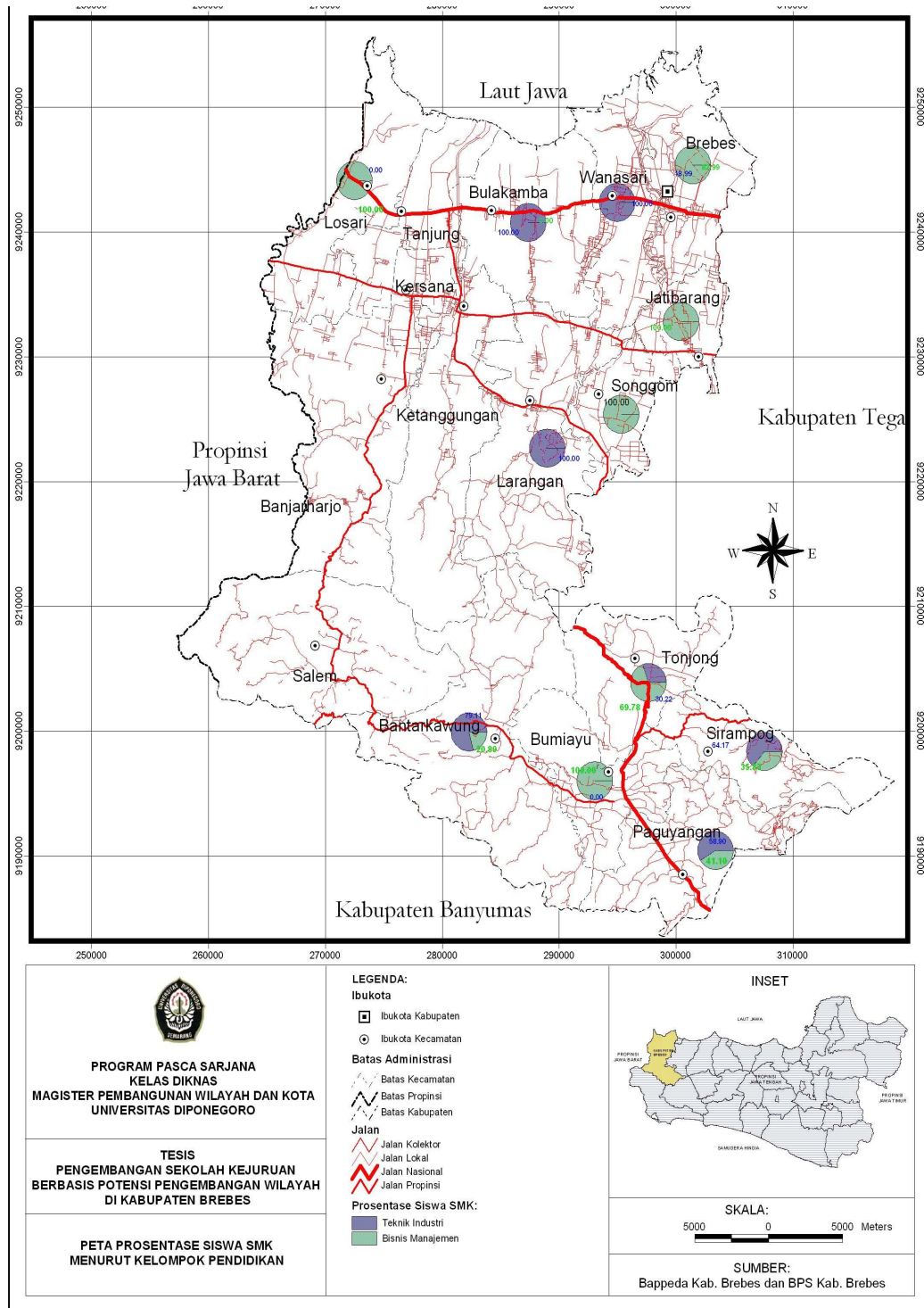
TABEL III.7
JUMLAH SISWA MENURUT KELOMPOK
TAHUN 2007

No	Kabupaten	Teknik/ Industri	Pertan/ Kehutanan	Bisnis/ Manajem	Pariwisata	Kesejah Masy.	Seni/ Kerajin
1	Bantarkawung	196		150			
2	Bumiayu	371		693			
3	Paguyangan	633		167			
4	Sirampog	612		1.023			
5	Tonjong	696		714			
6	Larangan	1.017					
7	Losari			108			
8	Bulakamba	1.398	86				
9	Wanasari	81					
10	Songgom	37		273			
11	Jatibarang	63		63			
12	Kersana	567					
13	Brebes	450		1.788			
Jumlah		6.120	86	4.979			
Jumlah Siswa SMK		11.195 siswa					

Sumber: Profil Dinas P dan K Ka.b Brebes, 2007

Dari jumlah SMK yang ada hanya 14 SMK (46,66 %) yang telah melaksanakan pendidikan sistem ganda, hal ini membuktikan masih kurangnya relevansi antara SMK dengan dunia industri atau dunia kerja karena tidak ada industri besar. Kondisi seperti ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara

SMK dengan dunia usaha. Hal tersebut dibuktikan dari minimnya persentase lulusan yang dapat diserap pada mata pencaharian di masyarakat. Lihat Gambar 3.6 berikut :



Sumber : Hasil Analisis, 2008

GAMBAR 3.6
PETA PROSENTASE SISWA SMK MENURUT KELOMPOK
PENDIDIKAN DI KABUPATEN BRBES

3.3.3 Kebutuhan Sekolah Kejuruan

Kebijakan pembangunan yang dilakukan mengupayakan secara maksimal memanfaatkan dan mengolah sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sekolah kejuruan adalah salah satu bentuk sarana pendidikan untuk mewujudkan, mencetak dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keahlian dan ketrampilan mengolah sumber daya alam.

Kondisi yang ada masih kurangnya jumlah sekolah kejuruan SMK dibanding dengan sekolah umum SMA/MA dan terbatasnya program jurusan. Melihat potensi, kondisi eksisting, dan pentingnya keterkaitan pengembangan wilayah dengan kondisi makro regional, serta upaya antisipasi globalisasi dan otonomi daerah, maka untuk mencapai tujuan umum penataan ruang wilayah sinergi dengan pengembangan sekolah kejuruan dengan mewujudkan SMK maka konsep pengembangan wilayah adalah sebagai berikut :

1. Mengarahkan menjadi wilayah pengembangan industrialisasi pedesaan dalam arti luas, yaitu multi sektor (ekonomi, sosial, dan budaya) dan multi kawasan (pegunungan, dataran, dan pesisir/ pantai).
2. Industrialisasi pedesaan tersebut merupakan usaha pengembangan proses produksi yang berbasis pada kekuatan pertanian dan atau produk pedesaan lainnya yang mengarah pada pemanfaatan potensi sumberdaya manusia lokal.

3. Pengembangan sektor pertanian ditingkatkan menjadi basis bagi kegiatan perekonomian pedesaan, disamping untuk kebutuhan primer yang berlangsung.
4. Mengembangkan pusat pelayanan pedesaan berupa kota-kota pusat pedesaan (*agropolitan*) yang mampu mendorong modernisasi pedesaan dan potensi produk yang mempunyai orientasi pasar ke luar wilayah. Agropolitan mempunyai peran dalam mendukung keterkaitan kota dan desa (*rural-urban linkage*). (RTRW Kabupaten Brebes, 2008-2027;IV-6).

Sumber daya lokal dapat memenuhi permintaan pasar tenaga kerja untuk mengisi industrialisasi pedesaan melalui jenjang pendidikan sekolah kejuruan yaitu SMK dengan program sesuai dengan kondisi wilayah dan multi sektor dan multi kawasan.

3.4 Landasan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

3.4.1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

SMK adalah salah satu subsistem dari sistem pendidikan nasional. Tugas utamanya adalah untuk mempersiapkan lulusannya memasuki dunia kerja, mengisi keperluan tenaga kerja terampil tingkat menengah. SMK adalah satu-satunya subsistem pendidikan formal yang secara sengaja diadakan untuk tujuan berikut :

1. Memberi bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai bekal bagi lulusannya untuk memasuki dunia kerja.

2. Memberi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar bagi lulusannya sebagai bekal dasar untuk mengembangkan kualitas dirinya secara berkelanjutan melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal, atau secara informal.

SMK dalam fungsinya sebagai subsistem dari sistem pengembangan sumber daya manusia, adalah sebagai berikut :

1. Mentransformasi peserta didik (peserta didik SMK) dari status sebagai manusia beban (yang harus hidup tetapi belum berpenghasilan) menjadi sumber daya manusia aset (yang berpenghasilan sehingga mampu menghidupi diri sendiri bahkan bisa ikut menghidupi orang lain).
2. Menyiapkan lulusan dengan kompetensi keahlian (profesi) yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, untuk mengisi kebutuhan pembangunan dan industrialisasi.
3. Menyiapkan lulusan yang memiliki kualitas unggul, sehingga mampu berperan sebagai faktor keunggulan kompetitif bagi industri Indonesia menghadapi persaingan global.
4. Menghasilkan sebagian lulusan yang memiliki bekal kewirausahaan sehingga mampu menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain.

Agar SMK mampu memerankan fungsi gandanya itu, maka pola penyelenggaraan pendidikan pada SMK mengikuti pola penyelenggaraan PSG, dengan paradigma sebagai berikut :

1. Program pendidikan (kurikulum) SMK dilaksanakan di dua tempat. Sebagian dilaksanakan di sekolah dan sebagian lainnya dilaksanakan di dunia kerja berupa program praktik kerja industri. Pelaksanaan dengan menggunakan pola penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada SMK adalah :
 - a. Praktikum (di sekolah) dan
 - b. Praktek Kerja Industri (Prakerin)
2. Program pendidikan pada SMK, menjadi program bersama (*joint program*) antara sekolah dan industri. Untuk mendapatkan kompetensi profesi melalui kegiatan praktik kerja industri, kegiatan pendidikan di dunia kerja (prakerin) harus dilaksanakan pada lini produksi dengan mengerjakan pekerjaan produksi yang sesungguhnya.

3.4.2 Renstra Depdiknas

Pendidikan Kejuruan melalui pengembangan SMK bertaraf internasional yang menghasilkan tamatan yang memiliki jati diri bangsa mampu mengembangkan keunggulan lokal dan bersaing di pasar global. Tujuan Kualitas pendidikan memiliki daya saing internasional (Renstra Depdiknas, 2005-2011:67-69) adalah :

1. Pendirian lembaga sertifikasi Profesi.
2. Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tamatan SMK.
3. Meningkatkan peran serta dunia usaha industri dalam penyelenggaraan SMK.
4. Meningkatkan sistem manajemen mutu di SMK.

5. Mengembangkan SMK sebagai tempat uji kompetensi (TUK).
6. Meningkatkan Unit Produksi di SMK.
7. Meningkatkan Kerjasama Internasional.
8. Meningkatkan manajemen SMK dengan menerapkan prinsip Good Governance.
9. Keterlibatan MPKN, dan MPKP dalam lomba keterampilan siswa (LKS) tingkat propinsi dan tingkat nasional.
10. Menempatkan siswa magang di industri-industri di luar negeri.
11. Mengikuti siswa pada Asian Skill Competition (ASC).
12. Mengikutkan siswa pada World Skill Competition (WSC).

BAB IV

ANALISIS PENGEMBANGAN SEKOLAH KEJURUAN BERBASIS PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH

4.1 Analisis Potensi Wilayah

Mengingat kondisi geografis Kabupaten Brebes dengan wilayah yang cukup luas dan memanjang mulai dari pantai Utara hingga ke Selatan daerah pegunungan, maka kebijakan pemerintah Kabupaten Brebes bidang pembangunan telah menetapkan rencana program pembangunan dalam bentuk Rencana Pembagian Satuan Wilayah Pembangunan (SWP). (RTRW, Bappeda Kabupaten Brebes. 2005-2027).

Rencana pembagian satuan wilayah pembangunan dilakukan dengan didasarkan pada skenario terpilih yang telah diungkapkan dalam konsep pengembangan tata ruang wilayah dan juga didasarkan pada karakteristik wilayah secara keseluruhannya. Berdasarkan hal tersebut, maka SWP ditentukan sebagai berikut:

1. **SWP I** terdiri dari Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Losari. Kecamatan-Kecamatan yang masuk dalam SWP I pada dasarnya merupakan wilayah kecamatan yang mendapatkan pengaruh langsung dari Jalan Arteri Primer Pantura, pusat dari SWP I adalah; Kota Brebes.

Berdasarkan karakter perkembangannya kawasan SWP I dibagi menjadi 2 (dua) Sub SWP, yaitu:

- a. Sub Satuan Wilayah pembangunan (SSWP) I.1.: meliputi wilayah Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba. Arahana kegiatan SSWP ini adalah kegiatan pemerintahan kabupaten, perdagangan jasa, transportasi, industri, pusat permukiman, pengelolaan konservasi kawasan pesisir, dan pertanian. Pengelolaan kawasan diarahkan pada usaha keterpaduan antar fungsi (terutama pemerintahan, perdagangan-jasa, permukiman industri, permukiman perkotaan, pertanian, dan pelestarian kawasan pesisir) dalam kawasan perkotaan. Kota pusat pelayanan SSWP ini adalah Kota Brebes.
 - b. Sub Satuan Wilayah pembangunan (SSWP) I.2.: meliputi wilayah Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Losari. Arahana kegiatan SSWP ini adalah kegiatan perdagangan-jasa, transportasi, pengelolaan-konservasi kawasan pesisir dan pertanian. Kota pusat pelayanan SSWP ini adalah Kota Tanjung.
2. **SWP II** terdiri atas Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo. Kecamatan-Kecamatan yang masuk dalam SWP II pada dasarnya merupakan wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes bagian tengah, pusat dari SWP II adalah Kota Ketanggungan.
- Berdasarkan karakter perkembangannya kawasan SWP II dibagi menjadi 2 (dua) Sub SWP, yaitu:
- a. Sub Satuan Wilayah pembangunan (SSWP) II.1.: meliputi wilayah Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan.

Arahan kegiatan SSWP II.1 adalah kegiatan pertanian lahan basah, agribisnis, industri kecil, hutan produksi. Kota pusat pelayanan SSWP ini adalah Kota Jatibarang.

- b. Sub Satuan Wilayah pembangunan (SSWP) II.2.: meliputi wilayah Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo. Arahan kegiatan SSWP II.2 adalah kegiatan perdagangan jasa, transportasi, industri kecil, pertanian lahan basah, hutan produksi, konservasi Sumber Daya Air. Kota pusat pelayanan SSWP ini adalah Kota Ketanggungan.

3. **SWP III** terdiri atas Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Bantarkawung, dan Kecamatan Salem. Kecamatan-Kecamatan yang masuk dalam SWP III pada dasarnya merupakan wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes bagian selatan, pusat dari SWP III adalah Kota Bumiayu. Berdasarkan karakter perkembangannya kawasan SWP III dibagi menjadi 2 (dua) Sub SWP, yaitu:

- a. Sub Satuan Wilayah pembangunan (SSWP) III.1.: meliputi wilayah Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Paguyangan. Arahan kegiatan SSWP III.1 adalah kegiatan perdagangan jasa, transportasi, konservasi alam, konservasi Sumber Daya Air, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan, agribisnis, hutan rakyat, industri (termasuk agro industri), dan konservasi alam. Pusat pelayanan SSWP ini adalah Kota Bumiayu.

- b. Sub Satuan Wilayah pembangunan (SSWP) III.2.: meliputi wilayah Kecamatan Bantarkawung, dan Kecamatan Salem. Arah kegiatan SSWP III.2 adalah kegiatan pertanian lahan kering, agro industri, konservasi alam, konsevasi sumberdaya air. Kota pusat pelayanan SSWP ini adalah Kota Salem.

Penetapan satuan pengembangan wilayah dan pengembangan potensi wilayah sesuai dengan masing-masing SWP, maka bidang usaha potensi wilayah lihat Tabel IV.1

TABEL IV.1
POTENSI WILAYAH MENURUT SWP

NO.	SWP	POTENSI WILAYAH (RTRW 2005-2027)
1.	SWP I	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan dan Jasa • Industri • Pengelolaan-Konservasi Kawasan Pesisir • Pertanian • Kelautan/perikanan laut • Transportasi,
2.	SWP II	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian Agrobisnis • Industri Kecil • Hutan Produksi • Perdagangan dan Jasa • Pariwisata • Pertanian lahan basah, • Transportasi, • Konsevasi sumberdaya air.
3.	SWP III	<ul style="list-style-type: none"> • Konservsi Sumber Daya Air • Pertanian • Perkebunan • Agrobisnis • Pariwisata • Industri • Konservasi alam, • Perdagangan-jasa • Transportasi • Hutan rakyat

Sumber : Hasil Analisis, 2008

4.1.1 Analisis Potensi Ekonomi

Berdasarkan perhitungan PDRB tahun 2007 menurut harga yang berlaku tahun 2000 bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Brebes mencapai 4.71%. Ditinjau dari kontribusi sektoral, sampai dengan tahun 2007 sektor pertanian masih merupakan sektor dominan, dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai lebih dari 50%.

Dilihat dari klasifikasi sektoral, peringkat empat besar penyumbang PDRB Kab. Brebes yaitu:

- (1) Pertanian dengan kontribusi sebesar 54.90%,
- (2) Perdagangan, Restoran dan Hotel dengan kontribusi sebesar 20.96 %,
- (3) Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 9.70%,
- (4) Jasa-jasa lain sebesar 4,12%.

Kontribusi sektoral ini secara tidak langsung menggambarkan potensi wilayah yang ada, lihat Tabel IV.2

TABEL. IV.2
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
DI KABUPATEN BREBES ATAS DASAR HARGA BERLAKU
(TAHUN 2004-2006)

No	Lapangan Usaha	Kontribusi PDRB (000)	Persentase
1	Pertanian	4.612.886.106,21	54,90
2	Pertambangan dan Penggalian	102.673.927,79	1,22
3	Industri Pengolahan	815.311.601,45	9,70
4	Listrik, gas Dan Air	71.591.737,40	0,85
5	Bangunan	168.840.744,90	2,01
6	Perdagangan, Restoran dan Hotel	1.759.675.840,92	20,96
7	Angkutan dan Komunikasi	310.400.310,65	3,69
8	Bank dan Lembaga Keuangan	214.345.851,75	2,55
9	Jasa-jasa	346.331.134,96	4,12
Total		8.402.057.256,02	100

Sumber : PDRB Kabupaten Brebes, 2007

Jika Dilihat dari Sub Wilayah Pembangunan yang ada, SWP I mendominasi PDRB dengan kontribusi sebesar 44.20%, disusul dengan SWP III dengan kontribusi sebesar 35.39% dan terakhir SWP II dengan kontribusi sebesar 20,41%. Dominasi PDRB pada SWP I diakibatkan karena Kota Brebes ibu kota kabupaten sebagai pusat pemerintahan sehingga lalu lintas kegiatan terkonsentrasi di kota Brebes, distribusi menurut SWP, lihat Tabel IV.3

TABEL. IV.3
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB MENURUT SWP DI
KABUPATEN BREBES ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU
(TAHUN2004-2006)

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000
1	Pertanian	54,90	55,95
2	Pertambangan dan Penggalian	1,22	1,22
3	Industri Pengolahan	9,70	10,48
4	Listrik, gas Dan Air	0,85	0,84
5	Bangunan	2,01	1,90
6	Perdagangan, Restoran dan Hotel	20,94	20,46
7	Angkutan dan Komunikasi	3,69	2,53
8	Bank dan Lembaga Keuangan	2,55	2,57
9	Jasa-jasa	4,12	4,06

Sumber : PDRB Kabupaten Brebes, 2007

Kontribusi tiga sektor penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Brebes menurut Sub Wilayah Pembangunan yang ada adalah sebagai berikut:

1. SWP I: Kontribusi sektor pertanian sebesar 15.67%, sektor Industri pengolahan sebesar 2.35% dan sektor perdagangan sebesar 12.26%.
2. SWP II: Kontribusi sektor pertanian sebesar 16.38%, sektor Industri pengolahan sebesar 3.02% dan sektor perdagangan sebesar 4.67%.
3. SWP III: Kontribusi sektor pertanian sebesar 22.73%, sektor Industri pengolahan sebesar 4.33% dan sektor perdagangan sebesar 4.01%.

Diantara ketiga SWP, untuk sektor pertanian SWP III memiliki kontribusi paling besar penyumbang PDRB Kabupaten, untuk sektor industri pengolahan SWP III juga memiliki kontribusi terbesar penyumbang PDRB Kabupaten.

Sedangkan untuk sektor perdagangan SWP I memiliki kontribusi paling besar penyumbang PDRB Kabupaten Brebes, distribusi persentase PDRB menurut SWP, lihat Tabel IV.4

TABEL. IV.4
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB MENURUT SWP DAN SEKTOR
DI KABUPATEN BREBES ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU
(TAHUN 2004-2006)

No	Wilayah Pembangunan	Pertanian	Industri	Perdagangan
1	SWP I	15,67	2,35	12,26
2	SWP II	16,38	3,02	4,67
3	SWP III	22,73	4,33	4,01
	Jumlah	54,78	9,70	20,94

Sumber : PDRB Kabupaten Brebes, 2007

Empat sektor ekonomi terbesar dalam kontribusinya pada PDRB tersebut diatas adalah merupakan potensi wilayah yang akan dianalisis secara mendalam.

4.1.1.1 Potensi Pertanian

Potensi pertanian, (RTRW Kabupaten Brebes 2008-2027; VI-20-VI-25) pada wilayah yang dapat dijadikan sebagai sentra-sentra pengembangan pertanian tanaman pangan padi. Dengan didasarkan kriteria prosentase luas lahan meliputi:

1. Lahan basah (sawah) dan produktivitas tanaman padi adalah;

Kecamatan Paguyangan, Banjarharjo, Bulakamba, Tanjung, Ketanggungan, Losari dan Larangan. Sedangkan untuk pengembangan pertanian secara umum dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Brebes.

2. Lahan kering sebagai sentra-sentra pengembangan pertanian tanaman pangan padi gogo adalah; Kecamatan Salem, Bantarkawung, Tonjong, Ketanggungan, dan Banjarharjo.

Hasil analisis pada sektor pertanian menunjukkan belum adanya pengolahan secara maksimal pada areal pertanian, hal ini nampak pada luas area tanah sawah 166.018 Ha, hanya dipergunakan untuk (sawah lahan basah 63.343 Ha dan sawah lahan kering 25.067 Ha) areal pertanian 88.410 Ha. Sehingga masih ada lahan yang belum tergarap seluas 77.608 Ha (46.75%). Apabila pengolahan area lahan pertanian dapat dimaksimalkan maka dapat dipastikan kontribusi pada PDRB pun akan meningkat pula.

Sektor pertanian tanaman pangan didasarkan kriteria pada luas lahan dan tingkat produktivitasnya, maka searah dengan kebijakan pengembangan potensi wilayah telah di tetapkan sentra-sentra pengembangannya, lihat Tabel IV.5

TABEL IV.5
SENTRA PENGEMBANGAN LAHAN
DI KABUPATEN BREBES

SWP	Wilayah Pengembangan Lahan Sawah	Ha		Wilayah Pengembangan Lahan Kering	Ha	
		Luas	%		Luas	%
I	Kec. Songgom	9.477	10,97	Kec. Brebes	2.509	10,01
	Kec. Jatibarang	9.198	10,64			
II	Kec. Banjarharjo	15.525	17,97	Kec. Banjarharjo	5.528	22,05
	Kec. Larangan	10.984	12,70	Kec. Ketanggungan	6.309	25,17
III	Kec. Paguyangan	15.679	18,14	Kec. Bumiayu Kec. Tonjong	7.080	28,24
	Kec. Bumiayu	15.984	18,49		3.641	14,53
	Kec. Tonjong	9.583	11,09			
		86.410			25.067	

Sumber : Kabupaten Brebes Dalam Angka 2007

4.1.1.2 Potensi Perdagangan, Restoran Dan Hotel

Pada sektor ini merupakan salah satu sub pengembangan potensi wilayah yang telah direncanakan, adapun potensi pengembangannya mencakup, perdagangan besar, hotel dan restoran, terkait dengan sektor ini adalah bidang pariwisata, dengan orientasi pengembangan pada pemanfaatann potensi. RTRW Kabupaten Brebes (2008-2027; VI-29-VI-30). Rencana yang akan dilaksanakan adalah:

1. Perdagangan dan Jasa
2. Pengelolaan Konservasi Kawasan Pesisir
3. Agrobisnis
4. Pariwisata
5. Konservsi Sumber Daya Air

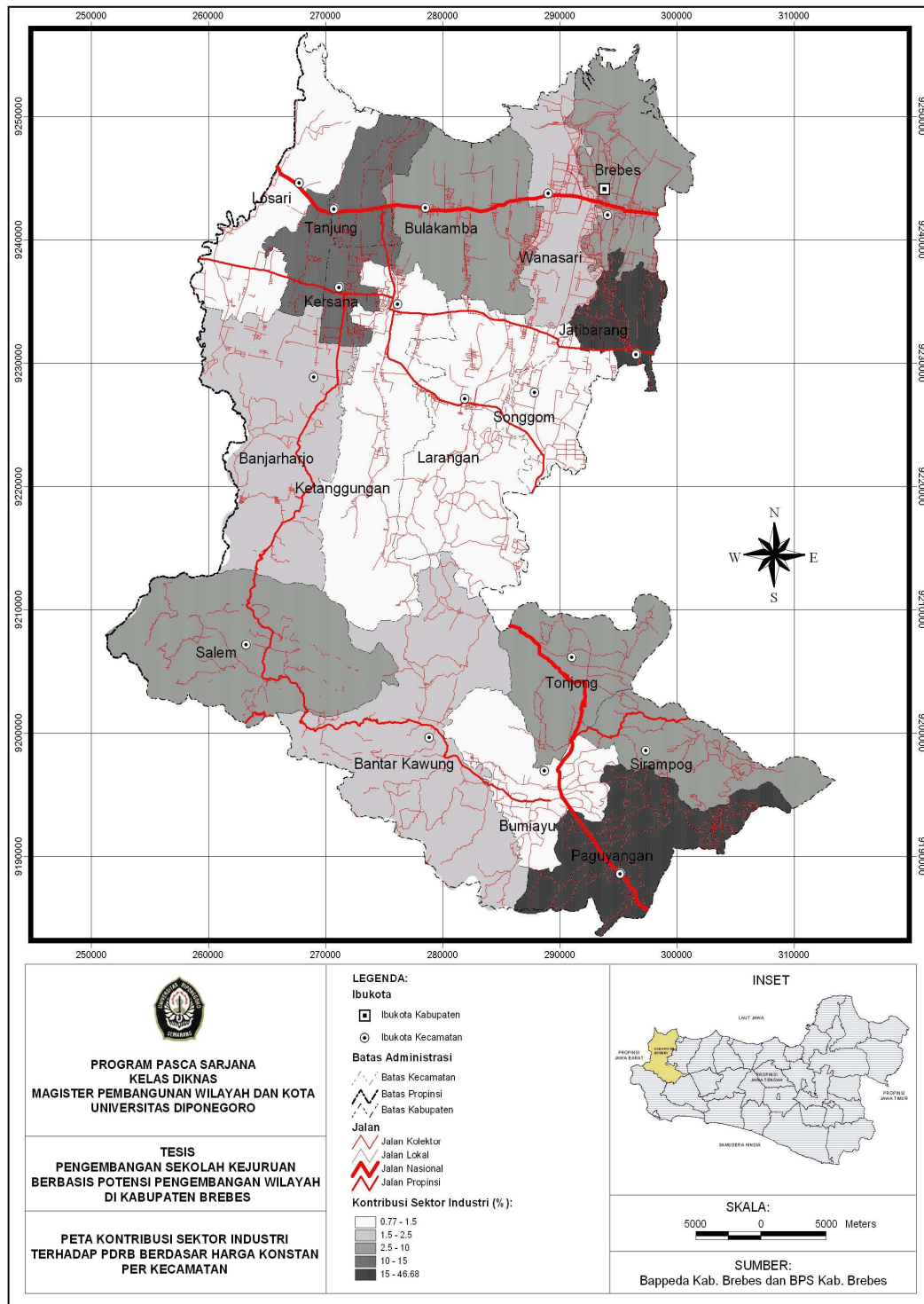
Kontribusi pada sektor Perdagangan, Restoran Dan Hotel sebesar Rp.1.759.675.840.92 atau sebesar 20,96%, kondisi ini masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi wilayah.

4.1.1.3 Potensi Industri Pengolahan

Pengembangan industri besar dan kecil di kabupaten Brebes diorientasikan pada pembentukan lokasi industri untuk industri menengah dan besar, sedangkan untuk industri kecil dengan membuat sentra-sentra industri. Pengembangan kawasan industri meliputi industri kecil dan industri besar, dengan pertimbangan-pertimbangan potensi alam yang mendukung dan aksesibilitas yang mudah untuk dikembangkan. RTRW Kabupaten Brebes (2008-2027; VI-31-VI-32).

Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB sebesar; Rp.815.311.601.450, atau 9,70%, nilai ini masih dapat ditingkatkan dengan penetapan kawasan industri.

Kontribusi pada sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tiap kecamatan lihat gambar 4.1.



Sumber : Hasil Analisis, 2008

**GAMBAR 4.1
PETA KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB
DI KABUPATEN BREBES**

4.1.1.4 Jasa-Jasa Lain

Pada sektor ini menduduki urutan ke empat dalam kontribusi pada PDRB, sektor ini merupakan salah satu sub pengembangan potensi wilayah yang telah direncanakan, adapun potensi pengembangannya mencakup semua sektor yang terkait pada lapangan usaha yang lain dengan orientasi pengembangan pada pemanfaatann potensi. RTRW Kabupaten Brebes (2008-2027; VI-29-VI-30). Rencana yang akan dilaksanakan adalah:

1. Perdagangan dan Jasa
2. Pengelolaan Konservasi Kawasan Pesisir
3. Agrobisnis
4. Pariwisata
5. Konservsi Sumber Daya Air

Kontribusi pada sektor Perdagangan, Restoran Dan Hotel, sebesar Rp.346.331.134.960 atau sebesar 4,12%, kondisi ini masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi wilayah mengingat sektor jasa-jasa adalah merupakan sektor pendukung dari sektor sektor yang lain, sehingga apabila sektor lain mengalami peningkatan maka secara berkelanjutan sektor jasa-jasa mengikuti peningkatan pula.

4.1.1.5 Temuan Analisis Potensi Wilayah

Untuk mengetahui tingkat potensi wilayah pada potensi ekonomi, yaitu dengan menggunakan komponen potensi angkatan kerja dan potensi tenaga kerja per kecamatan dan per kabupaten maka dilakukan pembobotan nilai dengan

menggunakan metode analisis *Location Quotient* (LQ). Rincian perhitungan analisis LQ, potensi wilayah pada 4 sektor lapangan usaha kontribusi terbesar pada PDRB, lihat Tabel IV.6

TABEL IV.6
ANALISIS POTENSI WILAYAH
DENGAN MENGGUNAKAN PERHITUNGAN LQ

No	Kecamatan	Lapangan Usaha	Si (Tenaga Kerja sektor I Kecamatan)	Ni (Tenaga Kerja Sektor i Kab. Brebes)	S (Jumlah Tenga Kerja Kecamatan)	N (Tenaga Kerja Kab. Brebes)	LQ	Kriteria
1	SWP I Songgom	Pertanian	49,021	601,596	54,728	1,095,404	1.63	Basis
		Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel dan Restoran	474	54,442	54,728	1,095,404	0.17	Non basis
		Jasa lain-lain	1,540	248,876	54,728	1,095,404	0.12	Non basis
		Jasa lain-lain	3,693	75,473	54,728	1,095,404	0.98	Non basis
2	Jatibarang	Pertanian	24,864	601,596	44,613	1,095,404	1.01	Basis
		Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel dan Restoran	3,010	54,442	44,613	1,095,404	1.36	Basis
		Jasa lain-lain	9,769	248,876	44,613	1,095,404	0.96	Non basis
		Jasa lain-lain	6,970	75,473	44,613	1,095,404	2.27	Basis
3	Bulakamba	Pertanian	105,372	601,596	134,538	1,095,404	1.43	Basis
		Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,085	54,442	134,538	1,095,404	1.06	Basis
		Jasa lain-lain	8,484	248,876	134,538	1,095,404	0.28	Non basis
		Jasa lain-lain	13,597	75,473	134,538	1,095,404	1.47	Basis
4	Wanasari	Pertanian	59,627	601,596	73,190	1,095,404	1.48	Basis
		Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,851	54,442	73,190	1,095,404	0.51	Non basis
		Jasa lain-lain	3,505	248,876	73,190	1,095,404	0.21	Non basis
		Jasa lain-lain	8,207	75,473	73,190	1,095,404	1.63	Basis
5	Brebes	Pertanian	53,672	601,596	93,107	1,095,404	1.05	Basis
		Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel dan Restoran	3,989	54,442	93,107	1,095,404	0.86	Non basis
		Jasa lain-lain	10,549	248,876	93,107	1,095,404	0.50	Non basis
		Jasa lain-lain	24,897	75,473	93,107	1,095,404	3.88	Basis
6	SWP II Larangan	Pertanian	66,622	601,596	85,264	1,095,404	1.42	Basis
		Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,146	54,442	85,264	1,095,404	0.27	Non basis
		Jasa lain-lain	6,087	248,876	85,264	1,095,404	0.31	Non basis
		Jasa lain-lain	11,409	75,473	85,264	1,095,404	1.94	Basis
7	Ketanggungan	Pertanian	64,509	601,596	86,177	1,095,404	1.36	Basis
		Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel dan Restoran	3,909	54,442	86,177	1,095,404	0.91	Non basis
		Jasa lain-lain	6,500	248,876	86,177	1,095,404	0.33	Non basis
		Jasa lain-lain	11,259	75,473	86,177	1,095,404	1.90	Basis

Lanjutan

8	Banjarharjo	Pertanian	54,286	601,596	76,267	1,095,404	1.30	Basis
		Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,010	54,442	76,267	1,095,404	0.27	Non basis
		Jasa lain-lain	2,795	248,876	76,267	1,095,404	0.16	Non basis
9	Kersana	Pertanian	18,176	75,473	76,267	1,095,404	3.46	Basis
		Pertanian	29,246	601,596	39,218	1,095,404	1.36	Basis
		Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,537	54,442	39,218	1,095,404	0.79	Non basis
10	Losari	Jasa lain-lain	2,449	248,876	39,218	1,095,404	0.27	Non basis
		Pertanian	5,986	75,473	39,218	1,095,404	2.22	Basis
		Pertanian	53,815	601,596	90,213	1,095,404	1.09	Basis
11	Tanjung	Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel dan Restoran	3,162	54,442	90,213	1,095,404	0.71	Non basis
		Jasa lain-lain	3,743	248,876	90,213	1,095,404	0.18	Non basis
		Jasa lain-lain	29,493	75,473	90,213	1,095,404	4.74	Basis
12	SWP III Salem	Pertanian	44,127	601,596	57,261	1,095,404	1.40	Basis
		Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,658	54,442	57,261	1,095,404	0.58	Non basis
		Jasa lain-lain	4,399	248,876	57,261	1,095,404	0.34	Non basis
13	Bantarkawung	Jasa lain-lain	7,077	75,473	57,261	1,095,404	1.79	Basis
		Pertanian	22,301	601,596	28,198	1,095,404	1.44	Basis
		Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel dan Restoran	357	54,442	28,198	1,095,404	0.25	Non basis
14	Bumiayu	Jasa lain-lain	2,442	248,876	28,198	1,095,404	0.38	Non basis
		Pertanian	3,098	75,473	28,198	1,095,404	1.59	Basis
		Pertanian	47,547	601,596	63,675	1,095,404	1.36	Basis
15	Paguyangan	Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,852	54,442	63,675	1,095,404	0.59	Non basis
		Jasa lain-lain	3,412	248,876	63,675	1,095,404	0.24	Non basis
		Jasa lain-lain	10,864	75,473	63,675	1,095,404	2.48	Basis
16	Sirampog	Pertanian	27,865	601,596	49,036	1,095,404	1.03	Basis
		Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,636	54,442	49,036	1,095,404	0.67	Non basis
		Jasa lain-lain	1,127	248,876	49,036	1,095,404	0.10	Non basis
17	Tonjong	Jasa lain-lain	18,408	75,473	49,036	1,095,404	5.45	Basis
		Pertanian	33,365	601,596	42,309	1,095,404	1.44	Basis
		Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,471	54,442	42,309	1,095,404	0.70	Non basis
18	Tonjong	Jasa lain-lain	2,416	248,876	42,309	1,095,404	0.25	Non basis
		Pertanian	5,057	75,473	42,309	1,095,404	1.73	Basis
		Pertanian	27,756	601,596	38,050	1,095,404	1.33	Basis
19	Tonjong	Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,276	54,442	38,050	1,095,404	0.67	Non basis
		Jasa lain-lain	2,938	248,876	38,050	1,095,404	0.34	Non basis
		Jasa lain-lain	6,080	75,473	38,050	1,095,404	2.32	Basis
20	Tonjong	Pertanian	27,462	601,596	39,560	1,095,404	1.26	Basis
		Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,947	54,442	39,560	1,095,404	0.99	Non basis
		Jasa lain-lain	1,867	248,876	39,560	1,095,404	0.21	Non basis
21	Tonjong	Jasa lain-lain	8,284	75,473	39,560	1,095,404	3.04	Basis

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Hasil dari analisis LQ yang memiliki kriteria perlu pengembangan / yang memiliki potensi (basis), lihat Tabel IV.7

TABEL IV.7
TINGKAT POTENSI EKONOMI DENGAN KRITERIA BASIS
HASIL ANALISIS LQ

SWP	Kecamatan		Kriteria	Lapangan Usaha
I	1	Songgom	Basis	Pertanian
	2	Jatibarang	Basis	Pertanian
	3	Bulakamba	Basis	Industri Pengolahan
			Basis	Jasa lain-lain
			Basis	Pertanian
4	Wanasari	Basis	Industri Pengolahan	
		Basis	Jasa lain-lain	
5	Brebek	Basis	Pertanian	
		Basis	Jasa lain-lain	
II	6	Larangan	Basis	Pertanian
	7	Ketanggungan	Basis	Jasa lain-lain
			Basis	Pertanian
	8	Banjarharjo	Basis	Jasa lain-lain
			Basis	Pertanian
	9	Kersana	Basis	Jasa lain-lain
			Basis	Pertanian
	10	Losari	Basis	Jasa lain-lain
			Basis	Pertanian
	11	Tanjung	Basis	Jasa lain-lain
			Basis	Pertanian
III	12	Salem	Basis	Pertanian
	13	Bantarkawung	Basis	Jasa lain-lain
			Basis	Pertanian
	14	Bumiayu	Basis	Jasa lain-lain
			Basis	Pertanian
	15	Paguyangan	Basis	Jasa lain-lain
			Basis	Pertanian
16	Sirampog	Basis	Jasa lain-lain	
		Basis	Pertanian	
17	Tonjong	Basis	Jasa lain-lain	
		Basis	Pertanian	

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Semua kecamatan pada semua SWP memiliki kriteria basis pada lapangan usaha pertanian dan jasa-jasa lain, kecuali Kecamatan Jatibarang dan Kecamatan Bulakamba ada 3 sektor potensi ekonomi yang perlu pengembangan {basis) yaitu Pertanian, Industri Pengolahan dan Jasa-jasa lain.

4.1.2 Tenaga Kerja

4.1.2.1 Kependudukan

Analisis kependudukan dilakukan untuk melihat komposisi jumlah penduduk menurut kelompok usia sekolah, khususnya usia SLTA. Dalam hal ini Analisis yang harus dilakukan dalam aspek kependudukan adalah (1) Analisis Pemecahan Usia Penduduk dan (2) Proyeksi pertumbuhan penduduk adalah sebagai berikut:

1. Pemecahan Usia Penduduk

Data yang diperoleh melalui BPS adalah data kelompok usia 5 tahunan tanpa melihat kelompok usia sekolah, sedangkan kebutuhan data usia sekolah SLTA (SMA/MA dan SMK) per tahunan diperlukan terlebih dahulu pemecahan data per tahun. Pemecahan data penduduk per tahun ini diperoleh dari data BPS berdasar usia yang ada yaitu kelompok usia 15 -19 tahun menjadi interval usia 16-18 tahun. Metode yang digunakan dalam menganalisis kependudukan untuk mengetahui potensi usia sekolah SLTA yaitu dengan cara memecah usia penduduk dengan alat Analisis yang dipakai yaitu *Metode Sprague Multiplier*. Lihat Tabel IV.8

TABEL IV.8
JUMLAH PENDUDUK KESELURUHAN DAN
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA
KABUPATEN BRBES TAHUN 2007

No	Kecamatan	Penduduk																				
		Seluruhnya			Kelompok Usia																	
					Usia 0 - 4			Usia 5 - 9			Usia 10 - 14			Usia 15 - 19			Usia 20 - 24			Usia 25 - 29		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Salem	28.384	27.710	56.094	2.723	2.645	5.368	2.911	2.732	5.643	2.686	2.372	5.058	2.425	2.258	4.683	2.199	2.414	4.613	2.592	2.909	5.501
2	Bantarkawung	45.802	45.735	91.537	4.795	4.602	9.397	5.062	4.863	9.925	4.898	4.747	9.645	4.786	4.099	8.885	3.572	3.788	7.360	3.696	4.348	8.044
3	Bumiayu	50.904	51.326	102.230	5.365	5.069	10.434	5.959	5.557	11.516	6.228	5.973	12.201	6.222	5.485	11.707	4.134	4.161	8.295	3.951	3.969	7.920
4	Paguyangan	46.021	46.001	92.022	5.231	4.957	10.188	5.794	5.492	11.286	5.494	5.103	10.597	5.002	4.195	9.197	3.611	3.800	7.411	3.576	3.966	7.542
5	Sirampog	29.723	30.850	60.573	3.194	3.151	6.345	3.775	3.655	7.430	3.978	3.957	7.935	3.693	3.553	7.246	2.321	2.508	4.829	2.206	2.408	4.614
6	Tanjong	34.154	34.593	68.747	3.570	3.313	6.883	4.408	4.393	8.801	4.641	4.343	8.984	3.773	3.261	7.034	2.365	2.366	4.731	2.292	2.803	5.095
7	Larangan	69.139	68.934	138.073	6.840	6.568	13.408	7.940	7.644	15.584	6.568	7.708	16.276	7.665	6.679	14.344	5.734	6.048	11.782	5.668	5.816	11.474
8	Kelanggungan	64.667	66.144	131.011	6.851	6.682	13.533	7.620	7.136	14.756	7.569	7.262	14.831	6.886	6.494	13.380	5.379	5.869	11.248	5.163	5.572	10.735
9	Banjarnharjo	57.418	58.357	115.775	5.635	5.608	11.243	5.981	5.622	11.603	6.187	5.955	12.142	5.545	5.405	10.950	4.527	4.788	9.315	4.746	5.005	9.751
10	Losari	61.640	61.646	123.286	6.535	6.291	12.826	7.246	6.906	14.152	7.186	6.552	13.738	6.951	6.517	13.468	5.174	5.581	10.755	4.966	4.926	9.892
11	Tanjung	45.904	46.568	92.472	5.162	4.871	10.033	5.643	5.422	11.065	5.358	5.354	10.712	5.270	5.098	10.368	4.271	4.443	8.714	3.826	3.722	7.548
12	Kersana	31.570	31.005	62.575	3.429	3.127	6.556	3.572	3.393	6.965	3.363	3.149	6.512	3.605	3.269	6.874	2.728	2.782	5.510	2.672	2.553	5.225
13	Bulakamba	79.393	78.272	157.665	8.323	8.027	16.350	9.825	9.222	19.047	10.084	9.670	19.754	9.624	9.260	18.884	7.134	7.452	14.586	6.341	6.230	12.571
14	Wanasari	68.493	68.120	136.613	6.983	6.909	13.892	8.103	7.746	15.849	8.875	8.752	17.627	8.363	7.881	16.244	6.107	6.386	12.473	5.511	5.382	10.893
15	Songgom	36.947	36.437	73.384	3.886	3.731	7.617	4.829	4.586	9.415	4.877	4.529	9.406	4.239	3.504	7.743	2.850	2.827	5.677	2.718	2.871	5.589
16	Jaitbarang	39.633	39.927	79.560	3.899	3.749	7.648	4.241	4.000	8.241	4.460	4.324	8.784	4.778	4.392	9.170	3.670	3.687	7.357	3.291	3.120	6.411
17	Brebes	77.171	77.613	154.784	7.748	7.583	15.331	8.678	8.205	16.883	9.262	9.071	18.333	9.714	9.339	19.053	7.315	7.365	14.680	6.283	6.306	12.589
Jumlah		867.163	869.238	1.736.401	90.169	86.883	177.052	101.587	96.574	198.161	103.694	98.821	202.515	98.541	90.689	189.230	73.091	76.245	149.336	69.488	71.906	141.394

Sumber : BPS Kabupaten Brebes

Rumus yang digunakan dalam perhitungan pemecahan adalah :

$$Fa = Sla \times F-2 + S2a \times F-1 + S3a \times F0 + S4a \times F1 + S5a \times F2$$

Bilangan pengali Sprague lihat Tabel IV.9

TABEL IV.9
BILANGAN PENGALI SPRAGUE USIA 16-18

Tabel	Usia	F-3	F-2	F-1	F0	F1	F2	F3
Tabel 3 (10-14 tahun) s.d (70-74 tahun)	Fa	-	-0,0128	0,0848	0,1504	-0,0240	0,0016	-
	Fb	-	-0,0016	0,0144	0,2224	-0,0416	0,0004	-
	Fc	-	0,0064	-0,0336	0,2544	-0,0336	0,0064	-
	Fd	-	0,0004	-0,0416	0,2224	0,0144	-0,0016	-
	Fe	-	0,0016	-0,0240	0,1504	0,0848	-0,0128	-

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Hasil perhitungan lihat Tabel IV.10.

TABEL IV.10
HASIL PEMECAHAN USIA 16-18 TAHUN PADA TAHUN 2007

No	Kecamatan	Penduduk											
		Menurut Usia									Usia 16-18		
		Usia 16			Usia 17			Usia 18					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Salem	529	475	1.004	518	464	982	492	448	940	1.539	1.387	2.926
2	Bantarkawung	1.034	861	1.895	1.012	840	1.852	961	812	1.773	3.007	2.513	5.520
3	Bumiayu	1.331	1.184	2.515	1.303	1.156	2.459	1.237	1.117	2.354	3.871	3.457	7.328
4	Paguyangan	1.078	880	1.958	1.056	859	1.915	1.002	830	1.832	3.136	2.569	5.705
5	Sirampog	827	776	1.603	810	757	1.567	769	732	1.501	2.406	2.265	4.671
6	Tonjong	787	686	1.473	771	669	1.440	732	647	1.379	2.290	2.002	4.292
7	Larangan	1.598	1.397	2.995	1.565	1.362	2.927	1.485	1.317	2.802	4.648	4.076	8.724
8	Ketanggungan	1.492	1.386	2.878	1.461	1.352	2.813	1.386	1.307	2.693	4.339	4.045	8.384
9	Banjarharjo	1.196	1.162	2.358	1.171	1.133	2.304	1.112	1.095	2.207	3.479	3.390	6.869
10	Losari	1.471	1.380	2.851	1.441	1.346	2.787	1.367	1.301	2.668	4.279	4.027	8.306
11	Tanjung	1.120	1.064	2.184	1.097	1.038	2.135	1.041	1.004	2.045	3.258	3.106	6.364
12	Kersana	791	688	1.479	775	672	1.447	735	649	1.384	2.301	2.009	4.310
13	Bulakamba	2.081	1.986	4.067	2.038	1.937	3.975	1.934	1.873	3.807	6.053	5.796	11.849
14	Wanasari	1.809	1.704	3.513	1.771	1.662	3.433	1.681	1.607	3.288	5.261	4.973	10.234
15	Songgom	921	731	1.652	902	713	1.615	856	690	1.546	2.679	2.134	4.813
16	Jatibarang	1.020	922	1.942	999	899	1.898	948	869	1.817	2.967	2.690	5.657
17	Brebes	2.127	2.012	4.139	2.083	1.963	4.046	1.977	1.897	3.874	6.187	5.872	12.059
	Jumlah	21.212	19.294	40.506	20.773	18.822	39.595	19.715	18.195	37.910	61.700	56.311	118.011

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Hasil dari perhitungan pemecahan data dilihat dari komposisinya jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 118.011 orang memiliki persentase sebesar 6.80%.

2. Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk dilakukan untuk menganalisis kebutuhan akan sarana pendidikan pada masa yang akan datang, oleh karena itu diperlukan data proyeksi jumlah penduduk mulai tahun 2008 sampai dengan 2012 serta proyeksi jumlah penduduk usia 16-18 pada tahun yang sama. Perhitungan proyeksi penduduk ini dilakukan dengan asumsi pertumbuhan penduduk mengikuti fungsi eksponensial, yaitu dengan menggunakan rumus:

$$P_t = P_0(1+r)^n$$

Keterangan :

P_t = Jumlah penduduk tahun proyeksi

P_0 = Jumlah penduduk tahun dasar

r = Laju rata-rata pertumbuhan Penduduk

n = Selisih tahun proyeksi dengan tahun awal

Untuk melakukan proyeksi dengan menggunakan rumus eksponensial di atas diperlukan parameter r dalam hal ini laju rata-rata pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data kependudukan dari BPS mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 dapat dihitung rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun yaitu 0.35%. Dengan memasukkan nilai $r = 0.35$ maka diproyeksikan jumlah penduduk kabupaten Brebes lima tahun mendatang lihat Tabel IV.11

TABEL IV.11
HASIL PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2008-2012

No	Kecamatan	Penduduk																	
		2007			2008			2009			2010			2011			2012		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	
1	Salem	28.384	27.710	56.094	28.464	27.801	56.265	28.556	27.891	56.447	28.648	27.982	56.630	28.741	28.073	56.813	28.834	28.164	
2	Bantarkawung	45.802	45.735	91.537	45.931	45.885	91.816	46.079	46.034	92.113	46.226	46.184	92.412	46.378	46.334	92.711	46.527	46.484	
3	Bumiayu	50.904	51.326	102.230	51.047	51.494	102.542	51.212	51.662	102.874	51.378	51.830	103.207	51.544	51.998	103.542	51.710	52.167	
4	Paguyangan	46.021	46.001	92.022	46.151	46.152	92.302	46.300	46.302	92.602	46.449	46.452	92.902	46.599	46.603	93.203	46.750	46.755	
5	Sirampog	29.723	30.850	60.573	29.807	30.951	60.758	29.903	31.052	60.955	30.000	31.153	61.152	30.097	31.254	61.350	30.194	31.355	
6	Tonjong	34.154	34.593	68.747	34.250	34.706	68.957	34.361	34.819	69.180	34.472	34.932	69.404	34.583	35.046	69.629	34.695	35.160	
7	Larangan	69.139	68.934	138.073	69.334	69.160	138.494	69.558	69.385	138.942	69.782	69.610	139.393	70.008	69.837	139.844	70.234	70.063	
8	Ketanggungan	64.867	66.144	131.011	65.050	66.361	131.411	65.260	66.577	131.836	65.471	66.793	132.264	65.682	67.010	132.692	65.894	67.228	
9	Banjarnharjo	57.418	58.357	115.775	57.580	58.548	116.128	57.766	58.739	116.504	57.952	58.930	116.882	58.140	59.121	117.261	58.327	59.313	
10	Losari	61.640	61.646	123.286	61.813	61.848	123.662	62.013	62.049	124.062	62.214	62.251	124.464	62.415	62.453	124.868	62.616	62.656	
11	Tanjung	45.904	46.568	92.472	46.033	46.721	92.754	46.182	46.873	93.055	46.331	47.025	93.356	46.481	47.178	93.659	46.631	47.331	
12	Kersana	31.570	31.005	62.575	31.659	31.107	62.766	31.761	31.208	62.969	31.864	31.309	63.173	31.967	31.411	63.378	32.070	31.513	
13	Bulakamba	79.393	78.272	157.665	79.616	78.529	158.145	79.874	78.784	158.658	80.132	79.040	159.172	80.391	79.297	159.688	80.650	79.554	
14	Wanasari	68.493	68.120	136.613	68.686	68.343	137.029	68.908	68.566	137.473	69.130	68.788	137.919	69.354	69.012	138.366	69.578	69.236	
15	Songgom	36.947	36.437	73.384	37.051	36.557	73.607	37.171	36.675	73.846	37.291	36.794	74.085	37.411	36.914	74.325	37.532	37.034	
16	Jatibarang	39.633	39.927	79.560	39.745	40.058	79.803	39.873	40.188	80.061	40.002	40.319	80.321	40.131	40.450	80.581	40.261	40.581	
17	Brabes	77.171	77.613	154.784	77.388	77.868	155.256	77.638	78.121	155.759	77.889	78.374	156.264	78.141	78.629	156.770	78.393	78.885	
	Jumlah	867.163	869.238	1.736.401	869.604	872.089	1.741.693	872.414	874.923	1.747.336	875.233	877.766	1.752.999	878.061	880.619	1.758.679	880.898	883.480	

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Sedangkan untuk penduduk komposisi usia 16-18 tahun diproyeksikan
lihat Tabel IV.12

TABEL IV.12
PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN
TAHUN 2008-2012

No	Kecamatan	Penduduk Kelompok umur 16 - 18																	
		2007			2008			2009			2010			2011			2012		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Salem	1.539	1.387	2.926	28.645	27.978	56.623	28.738	28.069	56.806	28.831	28.160	56.991	28.924	28.252	57.175	29.017	28.343	57.360
2	Bantarkawung	3.007	2.513	5.520	45.908	45.862	91.770	46.066	46.011	92.077	46.205	46.161	92.366	46.354	46.311	92.665	46.504	46.461	92.965
3	Bumiayu	3.871	3.457	7.328	51.668	52.121	103.789	51.835	52.230	104.125	52.003	52.460	104.463	52.171	52.631	104.801	52.339	52.802	105.141
4	Paguyangan	3.136	2.569	5.705	46.004	46.005	92.009	46.152	46.155	92.307	46.302	46.305	92.606	46.451	46.455	92.906	46.601	46.606	93.207
5	Sirampog	2.406	2.265	4.671	30.052	31.206	61.258	30.149	31.307	61.457	30.247	31.409	61.656	30.344	31.511	61.855	30.442	31.614	62.056
6	Tanjong	2.230	2.002	4.232	34.263	34.719	68.982	34.373	34.832	69.206	34.485	34.945	69.430	34.596	35.059	69.655	34.708	35.173	69.881
7	Larangan	4.648	4.076	8.724	69.688	69.513	139.201	69.913	69.739	139.652	70.139	69.966	140.105	70.365	70.193	140.559	70.593	70.421	141.014
8	Ketanggungan	4.339	4.045	8.384	65.041	66.352	131.393	65.251	66.568	131.819	65.462	66.784	132.246	65.673	67.001	132.675	65.886	67.219	133.104
9	Banjarnharjo	3.479	3.390	6.869	57.618	58.587	116.205	57.804	58.778	116.582	57.991	58.969	116.969	58.178	59.160	117.338	58.366	58.352	117.719
10	Losari	4.279	4.027	8.306	62.219	62.253	124.472	62.420	62.456	124.875	62.621	62.659	125.280	62.824	62.862	125.686	63.027	63.067	126.093
11	Tanjung	3.258	3.106	6.364	46.101	46.790	92.891	46.250	46.942	93.192	46.400	47.094	93.494	46.550	47.247	93.797	46.700	47.401	94.101
12	Kersana	2.301	2.009	4.310	30.400	29.869	60.269	30.498	29.966	60.464	30.596	30.064	60.660	30.695	30.162	60.857	30.794	30.260	61.054
13	Bulakamba	6.053	5.796	11.849	80.060	78.967	159.027	80.319	79.223	159.542	80.579	79.481	160.069	80.839	79.739	160.578	81.100	79.998	161.098
14	Wanasari	5.261	4.973	10.234	68.922	68.579	137.501	69.145	68.802	137.947	69.368	69.025	138.394	69.593	69.249	138.842	69.817	69.475	139.292
15	Songgom	2.679	2.134	4.813	36.951	36.458	73.409	37.070	36.576	73.647	37.190	36.695	73.886	37.310	36.815	74.125	37.431	36.934	74.365
16	Jatibarang	2.967	2.690	5.657	40.388	40.706	81.094	40.518	40.839	81.357	40.649	40.971	81.620	40.781	41.104	81.885	40.912	41.238	82.150
17	Brebes	6.187	5.872	12.059	78.166	78.651	156.817	78.419	78.906	157.325	78.672	79.163	157.835	78.927	79.420	158.346	79.182	79.678	158.860
	Jumlah	61.700	56.311	118.011	872.094	874.616	1.746.710	874.912	877.459	1.752.370	877.739	880.310	1.758.049	880.575	883.171	1.763.746	883.420	886.041	1.769.461

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Pertambahan penduduk usia 16-18 tahun selama dekade 5 tahun kedepan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertambahan tiap tahun sebanyak 5.660 penduduk, atau 0.32%. Pertambahan penduduk tiap tahun ini merupakan suatu tantangan untuk dapat memenuhi sarana prasarana pendidikan yang memadai, inilah arti pentingnya pengembangan sekolah kejuruan.

4.1.2.2 Angkatan Kerja

Asumsi usia kerja angkatan kerja adalah usia diatas 10 tahun, dari jumlah penduduk Kabupaten Brebes pada tahun 2007 tercatat 1.736.410 jiwa, yang termasuk usia kerja (10 tahun ke atas) sebanyak 1.367.249 orang atau sebesar 78,74%, terdiri. sedangkan penduduk yang termasuk usia 15 tahun ke atas sebanyak 1.156.970 orang atau sebesar 66,63%.

Perkembangan penduduk yang diikuti struktur dan komposisinya berpengaruh pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Secara umum kegiatan penduduk usia kerja meliputi kegiatan-kegiatan: berkerja, mencari kerja, sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Pada tahun 2007 penduduk Kabupaten Brebes :

1. Bekerja tercatat sebanyak 997.741 orang, atau 57,46%,
2. Mencari pekerjaan sebanyak sebanyak 53.134 orang, atau, 3,06%,
3. Bersekolah sebanyak 308.386 orang, atau 17,76%,
4. Mengurus rumah tangga sebanyak 244.834 orang, atau 14,10%, dan
5. Sisanya mempunyai kegiatan lainnya 132.314 orang, atau 7,62%.

Dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah angkatan kerja serta persentasenya lihat Tabel IV.13

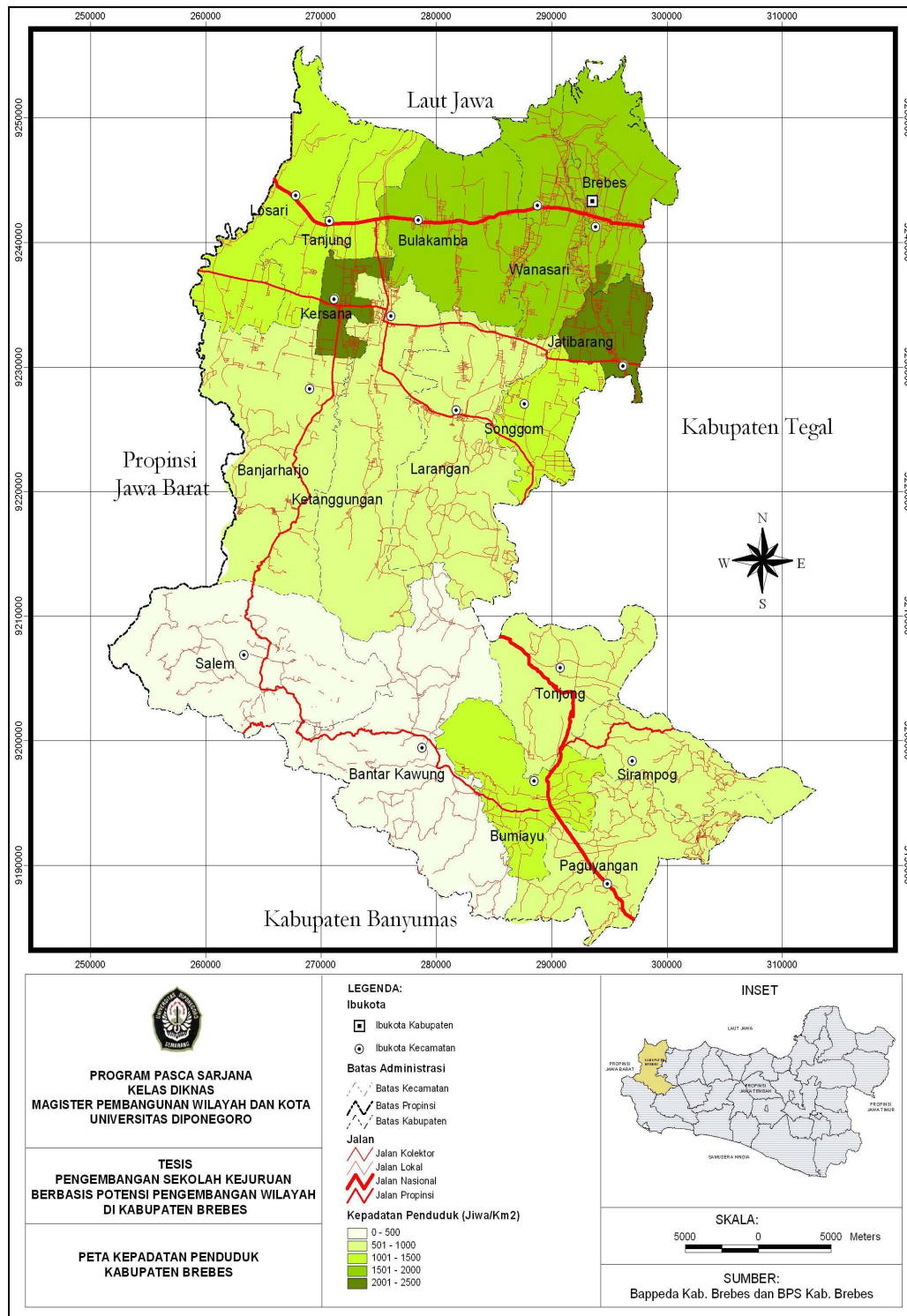
TABEL IV.13
PERSENTASE ANGKATAN KERJA
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2007

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	ANGKATAN KERJA	PERSENTASE
1	Tidak tamat SD	411.817	10,10
2	Tamat SD	457.004	44,50
3	Tamat SLTP	79.796	7,77
4	Tamat SLTA	63.364	6,7
5	Diploma Ke atas	14.994	1,48

Sumber : BPS Kabupaten Brebes, 2007

Besarnya angkatan kerja yang berpendidikan rendah terkait erat dengan kondisi geografis Kabupaten Brebes yang sebagian besar untuk sektor pertanian.

Sektor pertanian merupakan sektor kegiatan ekonomi yang dapat menampung banyak tenaga kerja tanpa memandang tingkat pendidikan. Hal ini juga dimungkinkan oleh faktor lain bahwa penduduk Kabupaten Brebes yang memiliki pendidikan lebih tinggi lebih banyak yang berdomisili di daerah lain yang lebih maju. Tingkatan kepadatan penduduk secara jelas lihat gambar 4.5



Sumber : Hasil Analisis, 2008

Gambar 4.2
PETA KEPADATAN PENDUDUK
DI KABUPATEN BREBES

4.2 Analisis Kondisi Pendidikan Dan Kebutuhan Pendidikan

Pendidikan memiliki arti penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terlebih dalam era informasi seperti sekarang. Karenanya sistem pendidikan yang baik dan berkualitas yang mengacu pada kemampuan kecakapan hidup nampaknya mutlak diperlukan. Analisis kependidikan, dalam hal ini merupakan salah satu upaya untuk menilai sistem pendidikan yang ada, utamanya rasio antara Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

4.2.1 Analisis Kondisi Pendidikan

Indikator-indikator yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan antara lain (Achmad, 2008):

- a. Angka partisipasi pendidikan, yang mengindikasikan tingkat partisipasi penduduk dalam mengakses program pendidikan, yang terdiri dari ;
 - 1) Angka Partisipasi Sekolah (APS), yang mengindikasikan seberapa besar akses dari penduduk usia sekolah dapat menikmati pendidikan formal di sekolah.
 - 2) Angka Partisipasi Murni (APM), yang mengindikasikan proporsi anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu.
 - 3) Angka Partisipasi Kasar (APK), mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikannya.
- b. Rasio murid dan kelas/sekolah yang mengindikasikan seberapa jauh jumlah kelas/sekolah telah mencukupi kebutuhan.

Indikator yang paling utama untuk melihat pemerataan pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK mencerminkan persentase siswa suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah anak usia sekolah pada jenjang tersebut, sedangkan APM mencerminkan persentase siswa kelompok usia tertentu pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah anak usia sekolah pada jenjang tersebut. APK dan APM berkaitan erat dengan jumlah kebutuhan unit sekolah untuk menampung anak usia sekolah di setiap jenjang pendidikan (Murdiani, 2009). Di samping itu beberapa indikator yang juga bisa digunakan untuk melihat tingkat pemerataan adalah Rasio Murid per Sekolah, Rasio Murid per Kelas, rasio Murid per Guru.

Sampai dengan tahun 2007 jumlah SMA/MA di Kabupaten Brebes tercatat sebanyak 55 sekolah, dengan jumlah kelas 572 buah, Guru 1.598 orang, Siswa 21.262 orang dan siswa usia 16-18 sebanyak 15.669 orang. Sementara itu untuk SMK sampai dengan tahun 2007 tercatat sebanyak 37 sekolah, dengan jumlah kelas 412 buah, Guru 965 orang, siswa 13.240 orang dan siswa usia 16-18 sebanyak 8.955 orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perbandingan antara SMK dengan SMA/MA adalah sekitar 40:60 lihat Tabel IV.14

TABEL IV.14
JUMLAH SEKOLAH, KELAS, GURU, SISWA, SISWA USIA 16-18
SMA/MA DAN SMK DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2007

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 16-18	SMA/MA					SMK				
			SEKLH	KLS	GURU	SISWA	SISWA 16-18	SEKLH	KLS	GURU	SISWA	SISWA 16-18
1	Salem	2,926	2	18	51	644	404	0	0	0	0	0
2	Bantarkawung	5,520	2	21	52	673	515	4	16	73	393	275
3	Bumiayu	7,328	8	105	278	3,778	2,954	6	63	167	2,148	1,301
4	Paguyangan	5,705	2	19	54	660	479	4	45	82	1,112	844
5	Sirampog	4,671	7	51	207	2,139	1,589	5	51	121	1,928	1,398
6	Tonjong	4,292	2	11	37	366	245	2	26	72	1,273	891
7	Larangan	8,724	3	22	75	1,112	832	2	34	66	134	911
8	Ketanggungan	8,384	4	27	85	773	556	0	0	0	0	0
9	Banjarharjo	6,869	1	20	44	852	670	0	0	0	0	0
10	Losari	8,306	2	24	57	715	515	2	5	31	169	84
11	Tanjung	6,364	2	25	57	957	688	1	8	18	42	29
12	Kersana	4,310	2	20	46	716	531	1	10	17	360	226
13	Bulakamba	11,849	3	36	75	1,165	845	3	36	118	1,609	1,135
14	Wanasari	10,234	2	16	46	630	438	1	45	14	72	62
15	Songgom	4,813	3	8	51	167	133	1	8	21	258	173
16	Jatibarang	5,657	2	20	55	770	504	1	6	19	144	105
17	Brebes	12,059	8	129	328	5,145	3,771	4	59	146	2,392	1,521
	Jumlah	118,011	55	572	1,598	21,262	12,718	37	412	965	12,034	8,955

Sumber : Hasil Analisis, 2008

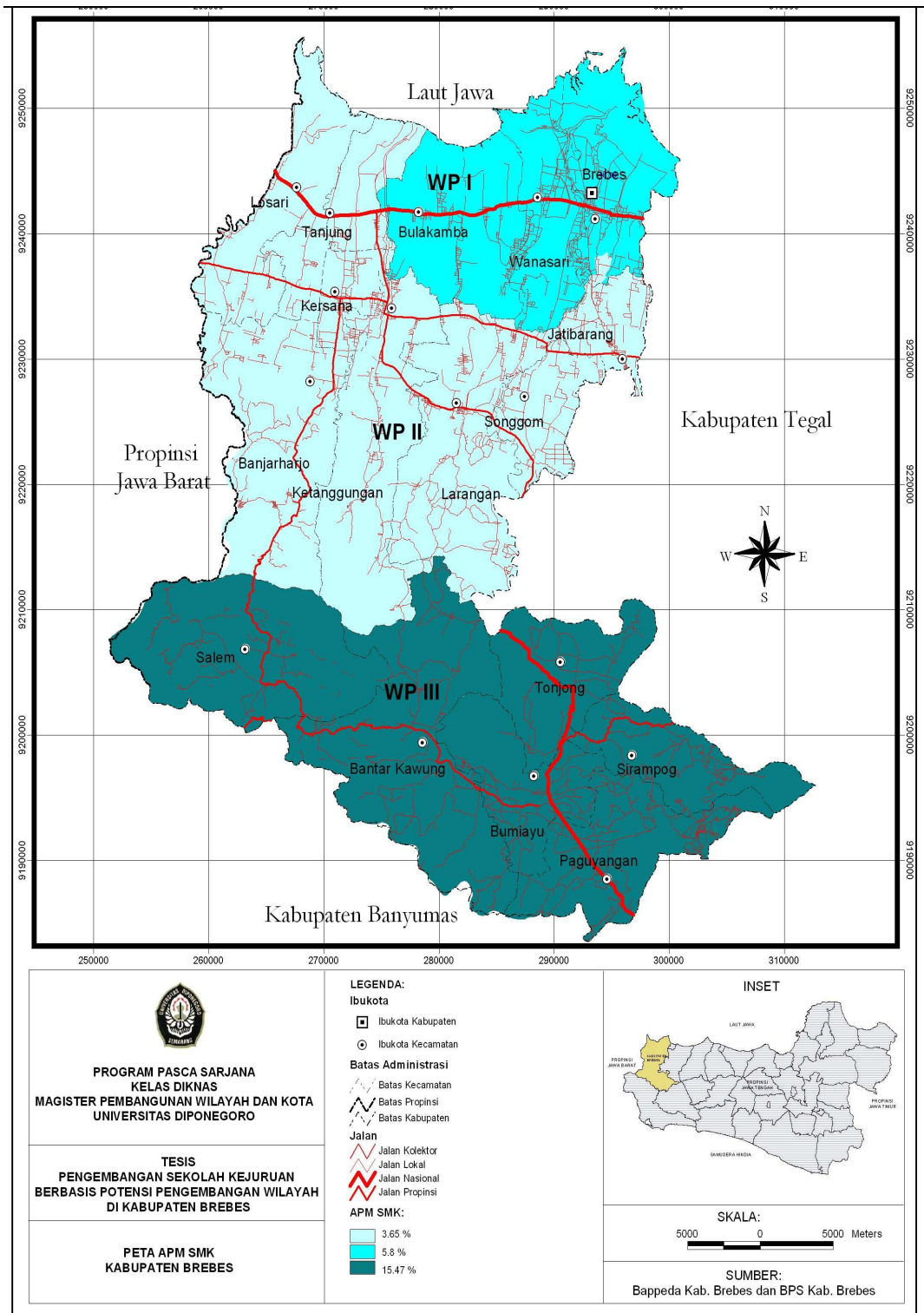
Jika dilihat menurut SWP, indikator pemerataan untuk SMA/MA dan SMK lihat Tabel IV.15

TABEL IV.15
INDIKATOR PEMERATAAN PENDIDIKAN SMA/MA DAN SMK
MENURUT SWP DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2007

NO.	WILAYAH PEMBANG	INDIKATOR	SMA/MA	SMK
1	SWP I	APK	17,64	8,78
		APM	12,82	5,80
		Rasio Murid/Sekolah	507	389
		Rasio Murid/Kelas	37	28
		Rasio Murid/Guru	15	13
2	SWP II	APK	11,33	5,42
		APM	8,32	3,65
		Rasio Murid/Sekolah	293	420
		Rasio Murid/Kelas	38	36
		Rasio Murid/Guru	12	17
3	SWP III	APK	27,13	22,51
		APM	20,32	15,47
		Rasio Murid/Sekolah	359	326
		Rasio Murid/Kelas	37	34
		Rasio Murid/Guru	12	13

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Dapat dilihat bahwa APK dan APM pada SWP III memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan SWP I dan SWP II yaitu masing-masing 27.13 (SMA/MA), 20.32 (SMK) untuk APK dan 22.51 (SMA/MA), 15.47 (SMK). Sedangkan untuk Rasio Murid per Sekolah untuk jenjang SMA/MA, SWP I memiliki nilai yang paling tinggi yaitu mencapai 507 siswa per sekolah, sementara untuk rasio murid per kelas pada jenjang SMA/MA SWP II memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 38 siswa per kelas. Peta APM SMK dan APK lihat Gambar 4.6 dan gambar 4.7



Sumber : Hasil Analisis, 2008

Gambar 4.3
APM SMK DI KABUPATEN BREBES



Sumber : Hasil Analisis, 2008

**Gambar 4.4
APK SMK DI KABUPATEN BREBES**

4.2.2 Analisis Kebutuhan Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas P dan K Kabupaten Brebes keadaan akhir Agustus tahun 2007 tercatat jumlah SMK di Kabupaten Brebes sebanyak 37 sekolah, dengan jumlah kelas sebanyak 412, guru 965 orang dan siswa 13.240 orang. Sedangkan jika ditambah dengan Sekolah Menengah Umum jumlah sekolah yang ada mencapai 92 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 34.502 orang. Namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang ada, ternyata APK untuk tingkat pendidikan menengah baru mencapai 29.24%. Jadi masih ada 83.509 orang atau 70.76% penduduk usia 16-18 tahun yang belum terlayani. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut apabila dengan rasio indikator-indikator pendidikan maka tingkat kebutuhan sekolah SMK/SMA dengan perbandingan 70:30 maka dibutuhkan sekolah sebanyak 188:81. Rencana kebutuhan fasilitas pendidikan dapat dilihat pada tabel IV.16

TABEL IV.16
RASIO SISWA PER SEKOLAH, KELAS, GURU, SISWA BARU DAN APK
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2007

NO	WIL PEMB	PENDDK 16-18	RASIO SISWA PER					RASIO SMA / SMK	KEB SEK
			SEK	KLS	GURU	% SISWA BARU	APK		
1	SWP I	48.812	461	34	14	70,47	26,42	60:40	131
2	SWP II	38.757	325	37	14	71,49	16,75	75:25	114
3	SWP III	30.442	344	35	13	72,09	49,65	53:47	87
		118.011	377	35	41	71.35	30.94	63:37	269

Sumber : Hasil Analisis, 2008

4.2.3 Analisis Kebutuhan Sekolah Kejuruan

Prioritas pengembangan wilayah di Kabupaten Brebes antara lain meliputi pengembangan pertanian sebagai salah satu lumbung padi Jawa Tengah dengan program swasembada dan surplus di bidang pangan, serta produsen besar bawang merah dan cabe. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkan kabupaten Brebes sebagai produsen dan Jawa Tengah sebagai wilayah pasarnya dan sebagian Jawa Barat, atau bahkan secara nasional. Prioritas pengembangan antar wilayah secara lokasi pusat pengembangan di Kota Brebes, Bumiayu, Ketanggungan dan Jatibarang yang memiliki aksesibilitas yang mendukung dan juga sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk sementara.

Melihat potensi, kondisi eksisting, dan pentingnya keterkaitan pengembangan wilayah dengan kondisi makro regional, serta upayaantisipasi globalisasi dan otonomi daerah, maka untuk mencapai tujuan umum penataan ruang wilayah di atas, konsep umum pengembangan wilayah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

5. Mengarahkan Kabupaten Brebes menjadi wilayah pengembangan industrialisasi pedesaan dalam arti luas, yaitu multi sektor (ekonomi, sosial, dan budaya) dan multi kawasan (pegunungan, dataran, dan pesisir/pantai)
6. Industrialisasi pedesaan tersebut merupakan usaha pengembangan proses produksi yang berbasis pada kekuatan pertanian dan atau produk pedesaan lainnya yang mengarah pada pemanfaatan potensi Sumber Daya Manusia lokal.

7. Pengembangan sektor pertanian ditingkatkan menjadi basis bagi kegiatan perekonomian pedesaan, disamping untuk kebutuhan primer yang berlangsung.
8. Mengembangkan pusat pelayanan pedesaan berupa kota-kota pusat pedesaan (*agropolitan*) yang mampu mendorong modernisasi pedesaan dan potensi produk yang mempunyai orientasi pasar ke luar wilayah. Agropolitan mempunyai peran dalam mendukung keterkaitan kota dan desa (*rural-urban linkage*). Dalam RTRW Kabupaten Brebes (2008-2027; IV-6).

Sejalan dengan pengembangan potensi daerah, maka pengembangan sekolah kejuruanpun disesuaikan dengan basis potensi wilayah yang ada pada masing-masing SWP. Sehingga untuk masing-masing SWP, lihat Tabel IV.17

TABEL IV.17
POTENSI WILAYAH MENURUT SWP
DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN SMK

NO.	SWP	POTENSI WILAYAH (RTRW Kabupaten Brebes 2008-2027; V-7-V-8)	JURUSAN SMK YANG DIKEMBANGKAN
1.	SWP I	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan dan Jasa • Industri • Pengelolaan-Konservasi Kawasan Pesisir • Pertanian • Kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Perikanan • Industri
2.	SWP II	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian Lahan Basah • Agribisnis • Industri Kecil • Hutan Produksi • Perdagangan dan Jasa • Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Industri • Pariwisata • Manajemen dan Bisnis
3.	SWP III	<ul style="list-style-type: none"> • Konservasi Sumber Daya Air • Pertanian Lahan Basah dan Kering • Perkebunan • Agribisnis • Pariwisata • Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Industri • Pariwisata • Manajemen dan Bisnis

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Analisis tingkat kebutuhan sekolah kejuruan dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan PCA. Indikator pendidikan yang digunakan sebagai dasar perhitungan PCA adalah Jumlah Penduduk (X1), Rasio Siswa Per Sekolah (X2), Rasio Siswa Per Kelas (X3), Rasio Siswa Per Guru (X4), Persentase Siswa Baru (X5) dan Angka Partisipasi Kasar (APK/X6) lihat Tabel IV.18

TABEL. IV.18
INDIKATOR PEMERATAAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN KECAMATAN
KABUPATEN BREBES TAHUN 2007

SWP	Kecamatan	Penduduk Usia 16-18 X1	Rasio Siswa Per					Rasio SMA / SMK	Kebuthn Sekolah	Ket
			Skolah X2	Kelas X3	Guru X4	% Siswa Baru X5	APK X6			
I	Songgom	4.813	106	27	6	72,00	8,83	75:25	13	
I	Jatibarang	5.657	305	35	12	66,63	16,16	67:33	14	
I	Bulakamba	11.849	462	39	14	71,38	23,41	50:50	26	
I	Wanasari	10.234	234	12	12	71,23	6,86	67:33	28	
I	Brebes	12.059	628	40	16	70,21	62,50	67:33	12	
II	Larangan	8.724	490	44	17	71,08	28,11	60:40	18	
II	Ketanggungan	8.384	193	29	9	71,93	9,22	100:0	22	
II	Banjarharjo	6.869	852	43	19	78,64	12,40	100:0	18	
II	Kersana	4.310	359	36	17	70,35	24,97	67:33	9	
II	Losari	8.306	221	30	10	67,76	10,64	50:50	22	
II	Tanjung	6.364	333	30	13	71,77	15,70	67:33	16	
III	Salem	2.926	322	36	13	62,73	22,01	100:0	7	
III	Bantarkawung	5.520	178	29	9	74,11	19,31	33:67	13	
III	Bumiayu	7.328	423	35	13	71,80	80,87	57:43	3	
III	Paguyangan	5.705	295	28	13	74,66	31,06	33:67	11	
III	Sirampog	4.671	339	40	12	73,44	87,07	58:42	1	
III	Tonjong	4.292	410	44	15	69,31	38,19	50:50	8	
	Jumlah	118.011	375	35	13	71,37	29,24	60:40	240	

Sumber : Hasil analisis 2008

Berdasarkan indikator-indikator pemerataan pendidikan, diperoleh prosentase APK terendah untuk tingkat pendidikan menengah, berada pada Kecamatan Wanasari (6,86 %), dimana jumlah anak usia 16 – 18 tahun yang tidak

tertampung sebesar 93, 14 %. Dengan kata lain, penduduk usia 16 – 18 tahun yang tidak tertampung berjumlah 9531 anak ($93,14 \% \times 10.234$). Dengan rasio jumlah siswa per sekolah 234 dan rasio SMA dibanding SMK (67:33), maka kebutuhan sekolah kejuruan di Kecamatan Wanasari berjumlah 28. Kecamatan Songgong juga mempunyai prosentase APK terendah kedua dari tujuh belas kecamatan untuk tingkat pendidikan menengah (8,83 %). Hal ini menunjukkan penduduk usia 16-18 tahun yang tidak sekolah/tidak tertampung sebesar 91, 17 % atau berjumlah 4388 anak ($91,17 \% \times 4813$). Dengan rasio jumlah siswa per sekolah 106 dan rasio SMA dibanding SMK (75:25), maka dibutuhkan 31 sekolah kejuruan di Kecamatan Wanasari. Secara keseluruhan, prosentase APK di Kabupaten Brebes sebesar 29, 24 %. Hal ini menggambarkan rendahnya kualitas sumber daya manusia usia 16-18 tahun, dimana sebesar 83.504 anak ($70,76 \% \times 118.011$) tidak tertampung di sekolah tingkat menengah. Berdasarkan indikator pemerataan pendidikan, diperlukan 240 sekolah kejuruan untuk menampung 83.504 anak usia 16-18 tahun yang tidak tertampung dengan rasio jumlah siswa per sekolah berjumlah 375 siswa dan rasio jumlah SMA dibanding SMK 60:40.

4. 3 Lokasi Sekolah Kejuruan

Salah satu manfaat dari *Principal Component Analysis* (PCA) adalah untuk *menetapkan prioritas* penanganan terhadap hal-hal yang lebih pokok dari struktur permasalahan yang dihadapi, sehingga efisiensi dan efektifitas penanganan permasalahan dapat lebih ditingkatkan (Dermoredjo dan Noekman, (2001). Berdasarkan pemikiran Dermoredjo dan Noekman (2001), PCA digunakan sebagai analisis penentuan prioritas pengembangan sekolah kejuruan.

Dengan metode PCA, berdasarkan indikator-indikator pendidikan tiap kecamatan yang digunakan, dapat diketahui lokasi dikecamatan mana sekolah kejuruan di prioritaskan. Penentuan titik prioritas dengan melihat nilai skor PCA 1 yang paling kecil. Hasil perhitungan dengan menggunakan *Software Statistik Minitab* didapat nilai PCA 1 lihat Tabel IV.19.

Tabel IV.19
NILAI SKOR PCA 1 UNTUK MASING-MASING KECAMATAN

SWP	Kecamatan	Penduduk Usia 16-18 X1	Rasio Siswa Per				Skor PCA 1	Keterangan	
			Sekolah X2	Kelas X3	Guru X4	% Siswa Baru X5			APK X6
I	Songgom	4.813	106	27	6	72,00	8,83	702,4	Prioritas I
I	Jatibarang	5.657	305	35	12	66,63	16,16	838,5	Prioritas II
I	Bulakamba	11.849	462	39	14	71,38	23,41	1710,4	
I	Wanasari	10.234	234	12	12	71,23	6,86	1467,9	
I	Brebes	12.059	628	40	16	70,21	62,50	1734,9	
II	Larangan	8.724	490	44	17	71,08	28,11	1280,4	
II	Ketanggungan	8.384	193	29	9	71,93	9,22	1206,5	
II	Banjarharjo	6.869	852	43	19	78,64	12,40	1083,1	
II	Kersana	4.310	359	36	17	70,35	24,97	656,2	Prioritas I
II	Losari	8.306	221	30	10	67,76	10,64	1196,9	
II	Tanjung	6.364	333	30	13	71,77	15,70	941,8	Prioritas II
III	Salem	2.926	322	36	13	62,73	22,01	458,7	Prioritas I
III	Bantarkawung	5.520	178	29	9	74,11	19,31	803,7	
III	Bumiayu	7.328	423	35	13	71,80	80,87	1044,4	
III	Paguyangan	5.705	295	28	13	74,66	31,06	837,3	
III	Sirampog	4.671	339	40	12	73,44	87,07	663,9	
III	Tonjong	4.292	410	44	15	69,31	38,19	651,2	Prioritas II
	Jumlah	118.011	375	35	13	71,37	29,24		

Sumber : Hasil analisis, 2008

Berdasarkan indikator-indikator pendidikan, diperoleh skor PCA 1 terendah untuk SWP I berada pada Kecamatan Songgom (702,4). Hal ini berarti untuk SWP I, lokasi prioritas untuk pengembangan sekolah kejuruan adalah Kecamatan Songgom. Kemudian diikuti Kecamatan Jatibarang menjadi lokasi prioritas untuk pengembangan sekolah kejuruan. Untuk SWP II, skor PCA 1 terendah adalah Kecamatan Kersana (656,2). Oleh karena itu, kecamatan Kersana menjadi lokasi prioritas untuk pengembangan sekolah kejuruan. Kemudian disusul Kecamatan Tanjung (941,8) menjadi prioritas kedua pengembangan sekolah kejuruan. Sedangkan untuk SWP III titik lokasi prioritas pengembangan sekolah kejuruan adalah Kecamatan Salem, dengan skor PCA 1 terendah (458,7). Kemudian prioritas selanjutnya adalah Kecamatan Tonjong (651,2).

4.4 Temuan Studi

Kebijakan Depdiknas yang tertuang dalam renstra Program Penguatan Kebijakan Depdiknas dengan RPJM Bappenas salah satunya adalah pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal di setiap kabupaten/kota. Khusus mengenai SMA dan SMK Depdiknas memiliki kebijakan untuk meningkatkan rasio SMK lebih besar dari pada SMA, yaitu 70% SMK dan 30% SMA pada akhir tahun 2015. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk kesadaran bahwa bangsa Indonesia masih banyak memerlukan tenaga kerja tingkat menengah dari pada tingkat tinggi. Kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah di Indonesia, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah tersebut.

Berdasarkan analisis LQ, sector ekonomi basis wilayah kabupaten Brebes adalah sector pertanian, industri pengolahan dan jasa lain-lain. Dari sisi masyarakat, pemilihan sekolah tingkat menengah berhubungan erat dengan kondisi ekonomi dan pendidikan. Dengan demikian masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah akan cenderung lebih memilih SMK dibandingkan dengan SMA, dan sebaliknya. Saat ini jumlah perbandingan siswa SMK : SMA adalah 40 : 60, sedangkan hasil pengolahan kuesioner menyatakan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi pilihan bagi sebagian besar siswa SMP kelas III yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah menengah di Brebes, dengan persentase perbandingan pemilihan SMK : SMA adalah 73 : 27.

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient (LQ)* and *Principal Component Analysis (PCA)*, dihasilkan pengembangan sekolah kejuruan berbasis pengembangan potensi wilayah yang dibutuhkan di Kabupaten Brebes sebagai berikut:

a. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I.

Kecamatan Songgom menjadi prioritas pertama pengembangan sekolah kejuruan berbasis pengembangan potensi wilayah. Mengingat potensi pengembangan wilayah Kecamatan Songgom berbasis ekonomi pertanian, maka prioritas pengembangan sekolah kejuruan yang diperlukan adalah pendidikan SMK pertanian/teknologi produksi pertanian dan sejenis lainnya. Untuk prioritas selanjutnya diikuti Kecamatan Jatibarang, dengan pengembangan potensi wilayah berbasis industri pengolahan, sehingga

diperlukan pengembangan sekolah kejuruan (SMK) mesin industri/otomotif dan sejenis lainnya.

b. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) II.

Kecamatan Kersana menjadi prioritas pertama pengembangan sekolah kejuruan (SMK) pertanian/teknologi produksi pertanian dan sejenis lainnya mengingat kecamatan ini memiliki basis ekonomi pertanian. Kemudian diikuti kecamatan Tanjung dengan pengembangan potensi wilayah basis pertanian, sehingga diperlukan pengembangan pendidikan SMK agro industri budidaya pertanian dan sejenis lainnya.

c. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) III.

Kecamatan Salem menjadi prioritas pertama pengembangan SMK pertanian/teknologi produksi pertanian dan sejenis lainnya mengingat kecamatan ini mempunyai basis ekonomi pertanian. Kemudian kecamatan Tonjong menjadi prioritas berikutnya. Pengembangan potensi wilayah berbasis jasa-jasa lainnya, maka Kecamatan Tonjong memerlukan pengembangan pendidikan SMK ekonomi perdagangan, manajemen dan sejenis lainnya. Rangkuman temuan studi lihat Tabel IV.20

TABEL IV 20
TEMUAN STUDI

SWP	Kecamatan	Lapangan Usaha	LQ	Kriteria	Pengembangan Potensi	Analisis Kondisi Pendidikan (%) APM dan APK	Kebutuhan Pendidikan	Lokasi Sekolah Kejuruan		
SWP I										
1	Songgom	Pertanian	1,63	Basis	Pertanian	SWP I 1. APM SMA = 12,82 2. APM SMK = 5,80 3. APK SMA = 17,46 4. APK SMK = 8,76	SWP I 1. Pertanian 2. Industri Pengolahan 3. Jasa lain-lain	Prioritas I		
		Industri Pengolahan	0,17	Non basis				Kecamatan		
		Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,12	Non basis				Songgom		
		Jasa lain-lain	0,98	Non basis						
2	Jatibarang	Pertanian	1,01	Basis	Pertanian					Prioritas II
		Industri Pengolahan	1,36	Basis	Industri Pengolahan					Kecamatan
		Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,96	Non basis						Jatibarang
		Jasa lain-lain	2,27	Basis	Jasa lain-lain					
3	Bulakamba	Pertanian	1,43	Basis	Pertanian					
		Industri Pengolahan	1,06	Basis	Industri Pengolahan					
		Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,28	Non basis						
		Jasa lain-lain	1,47	Basis	Jasa lain-lain					
4	Wanasari	Pertanian	1,48	Basis	Pertanian					
		Industri Pengolahan	0,51	Non basis						
		Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,21	Non basis						
		Jasa lain-lain	1,63	Basis	Jasa lain-lain					
5	Brebes	Pertanian	1,05	Basis	Pertanian					
		Industri Pengolahan	0,86	Non basis						
		Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,5	Non basis						
		Jasa lain-lain	3,88	Basis	Jasa lain-lain					
SWP II										
6	Larangan	Pertanian	1,42	Basis	Pertanian	SWP II 1. APM SMA = 8,32 2. APM SMK = 3,65 3. APK SMA = 11,33 4. APK SMK = 5,42	SWP II 1. Pertanian 2. Jasa lain-lain			
		Industri Pengolahan	0,27	Non basis						
		Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,31	Non basis						
		Jasa lain-lain	1,94	Basis	Jasa lain-lain					
7	Ketanggungan	Pertanian	1,36	Basis	Pertanian					
		Industri Pengolahan	0,91	Non basis						
		Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,33	Non basis						
		Jasa lain-lain	1,9	Basis	Jasa lain-lain					
8	Banjarharjo	Pertanian	1,3	Basis	Pertanian					
		Industri Pengolahan	0,27	Non basis						
		Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,16	Non basis						
		Jasa lain-lain	3,46	Basis	Jasa lain-lain					
9	Kersana	Pertanian	1,36	Basis	Pertanian			Prioritas I		
		Industri Pengolahan	0,79	Non basis				Kecamatan		
		Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,27	Non basis				Kersana		
		Jasa lain-lain	2,22	Basis	Jasa lain-lain					

Lanjutan

10	Losari	Pertanian	1,09	Basis	Pertanian			
		Industri Pengolahan	0,71	Non basis				
		Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,18	Non basis				
		Jasa lain-lain	4,74	Basis	Jasa lain-lain			
11	Tanjung	Pertanian	1,4	Basis	Pertanian			Prioritas II
		Industri Pengolahan	0,58	Non basis				Kecamatan
		Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,34	Non basis				Tanjung
		Jasa lain-lain	1,79	Basis	Jasa lain-lain			
SW P III								
12	Salem	Pertanian	1,44	Basis	Pertanian			Prioritas I
		Industri Pengolahan	0,25	Non basis				Kecamatan
		Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,38	Non basis		SWP III	SWP III	Salem
		Jasa lain-lain	1,59	Basis	Jasa lain-lain			
13	Bantarkawung	Pertanian	1,36	Basis	Pertanian	1. APM SMA = 20,32	1. Pertanian	
		Industri Pengolahan	0,59	Non basis			Jasa lain-lain	
		Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,24	Non basis				
		Jasa lain-lain	2,48	Basis	Jasa lain-lain	2. APM SMK = 15,47		
14	Bumiayu	Pertanian	1,03	Basis	Pertanian			
		Industri Pengolahan	0,67	Non basis				
		Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,1	Non basis		3. APK SMA = 27,13		
		Jasa lain-lain	5,45	Basis	Jasa lain-lain			
15	Paguyangan	Pertanian	1,44	Basis	Pertanian			
		Industri Pengolahan	0,7	Non basis		4. APK SMK = 22,51		
		Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,25	Non basis				
		Jasa lain-lain	1,73	Basis	Jasa lain-lain			
16	Sirampog	Pertanian	1,33	Basis	Pertanian			
		Industri Pengolahan	0,67	Non basis				
		Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,34	Non basis				
		Jasa lain-lain	2,32	Basis	Jasa lain-lain			
17	Tonjong	Pertanian	1,26	Basis	Pertanian			Prioritas II

Berdasarkan hasil temuan studi, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mengembangkan wilayah secara optimal saat ini Kabupaten Brebes membutuhkan tenaga kerja dibidang pertanian, industri pengolahan dan jasa-jasa lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sektor ekonomi membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan atau keahlian tertentu di bidang pertanian, industri pengolahan dan jasa-jasa lainnya, maka proporsi SMK harus lebih besar dari SMA. Hal ini karena dari sisi demand atau kebutuhan kualifikasi pendidikan tenaga kerja dari sektor ekonomi dominan membutuhkan lebih dari tenaga kerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Sektor ekonomi dominan penyumbang PDRB kabupaten Brebes terbesar berturut-turut adalah sektor pertanian (54,90%), perdagangan, restoran dan hotel (30,96%), industry pengolahan (9,70%) dan jasa-jasa lain (4,12%). Selain itu dari sisi supply, berdasarkan respondent, saat ini 73 % siswa kelas III SMP yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah menengah di Brebes lebih memilih SMK.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan data yang merupakan kajian dari pokok permasalahan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil analisis LQ, menunjukkan bahwa potensi ekonomi dengan basis pertanian, industri pengolahan dan jasa-jasa lain memiliki nilai $LQ > 1$ paling banyak yang terdapat pada 17 kecamatan di Brebes. Oleh karena itu, untuk mengembangkan wilayah secara optimal saat ini kabupaten Brebes membutuhkan tenaga kerja dengan ketrampilan dan keahlian dibidang pertanian, industri pengolahan dan jasa-jasa lain. Hal ini berarti dari sisi demand atau kebutuhan kualifikasi pendidikan tenaga kerja dari sektor ekonomi dominan, membutuhkan lebih dari tenaga kerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Hasil analisis berdasarkan indikator pendidikan (jumlah penduduk usia 16-18 tahun, rasio siswa sekolah, rasio siswa per kelas, rasio siswa per guru, rasio siswa per siswa baru, APK, rasio SMA/SMK=60:40) kabupaten Brebes membutuhkan 240 sekolah kejuruan untuk menampung 83.504 anak ($70,76\% \times 118011$) usia 16-18 tahun yang tidak terlayani ($70,76\%$ dari $APK=29,24\%$). Hal ini mencerminkan belum meratanya pendidikan terutama dari segi kuantitas/jumlah sekolah kejuruan. Pencapaian kinerja pembangunan dapat dilihat dengan mengukur indikator peningkatan APK dan APM yang

menunjukkan banyaknya usia sekolah yang terserap oleh pendidikan jalur sekolah dengan normal 100%. Pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah di kabupaten Brebes (rata-rata kurang dari 19%) sejalan dengan masih rendahnya APK sekolah tingkat menengah (29,24 %).

3. Dari hasil analisa pengembangan sekolah kejuruan berbasis pengembangan potensi wilayah, dapat diketahui lokasi pengembangan sekolah kejuruan berdasarkan prioritas yang mempunyai kesesuaian dengan pengembangan potensi wilayah di kabupaten Brebes yaitu sebagai berikut:
 - a. Untuk SWP I, Kecamatan Songgom untuk pengembangan SMK pertanian, dengan program jurusan pertanian / teknologi produksi pertanian dan sejenis lainnya, kemudian disusul Kecamatan Jatibarang untuk pengembangan SMK pertanian, dengan program jurusan industri pengolahan, mesin industri/otomotif dan sejenis lainnya;
 - b. Untuk SWP II, Kecamatan Kersana untuk pengembangan SMK pertanian, dengan program jurusan pertanian/teknologi produksi pertanian dan sejenis lainnya, disusul Kecamatan Tanjung untuk pengembangan SMK pertanian, dengan program jurusan agro industri budidaya pertanian dan sejenis lainnya;
 - c. Untuk SWP III, kecamatan Salem untuk pengembangan SMK pertanian, program jurusan teknologi produksi pertanian, ekonomi manajemen dan sejenis lainnya, disusul Kecamatan Tonjong untuk pengembangan SMK jasa-jasa lainnya, program jurusan ekonomi perdagangan , menejemen dan sejenis lainnya.

5.2. Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten Brebes, dalam hal ini Dinas Pendidikan perlu mencermati dan merespon kebutuhan tenaga kerja di sektor ekonomi yang ada di Brebes dan kondisi masyarakat Brebes. Berdasarkan kesimpulan diatas, sektor ekonomi membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan atau keahlian dibidang pertanian, industri pengolahan dan jasa-jasa lain, maka dari penelitian ini dapat dikembangkan untuk menentukan konsep pengembangan SMK. Hal ini sejalan dengan kebijakan Depdiknas yang tertuang dalam renstra Program Penguatan Kebijakan Depdiknas dengan RPJM Bappenas salah satunya adalah pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal di setiap kabupaten/kota.
2. Arahan pengembangan SMK disesuaikan pada Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang mempunyai kesesuaian terbesar antara basis ekonomi (analisis LQ) dan prioritas lokasi (analisis PCA 1). Oleh karena itu, pengembangan sekolah kejuruan di kecamatan Songgom, Kersana dan Salem menjadi prioritas pertama. Namun demikian, sebelum dilakukan pengembangan sekolah kejuruan di lokasi tersebut, perlu evaluasi lebih lanjut mengenai factor-faktor pendukung lainnya seperti akses jalan yang memadai dan survey lanjutan mengenai seberapa besar minat masyarakat terhadap sekolah kejuruan di lokasi tersebut. Dengan demikian pengembangan sekolah kejuruan dapat berjalan efektif dan efisien. Apabila pengembangan sekolah kejuruan di lokasi tersebut sudah berjalan, perlu evaluasi mengenai kualitas dan kuantitas pendidikan kejuruan.

Apabila dari segi kuantitas ternyata jumlah siswa melebihi rasio siswa per sekolah perlu dipertimbangkan pengembangan sekolah pada lokasi prioritas kedua setelah memenuhi study kelayakan.

3. Untuk masa yang akan datang diperkirakan yang akan menjadi sektor ekonomi dominan selain sektor pertanian, industri pengolahan dan jasa-jasa lain adalah sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan kontribusi PDRB sebesar 20.96 % tahun 2007. Sektor ini perlu mendapatkan perhatian terutama dalam upaya pengembangan sumber daya manusianya. Oleh karena itu , dimasa mendatang perlu pengembangan SMK bisnis dan manajemen.

5.3. Batasan Penelitian

Seperti penelitian lainnya baik penelitian secara teori maupun empirik, penelitian ini mempunyai batasan-batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya sampai pada mensingkronkan pengembangan wilayah, potensi wilayah dengan penetapan lokasi yang sesuai untuk pengembangan SMK. Sehingga penelitian ini tidak bisa di generalisir terhadap pengembangan SMK berdasarkan factor-faktor lain.
2. Penetapan lokasi sekolah kejuruan pada penelitian ini berdasarkan analisis PCA 1 yang telah dipetakan pada setiap kecamatan yang ada di Brebes. Skor terendah PCA 1 yang ada di kecamatan dijadikan dasar prioritas penetapan lokasi. Sehingga penelitian ini tidak bisa di generalisir terhadap ketepatan penetapan lokasi sekolah kejuruan berdasarkan prioritas/metode/teori lain seperti *Geographic Information System (GIS)*, *Analytic Hierarchy Processing (APH)*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Z. (2008). *Analisis Tingkat Partisipasi Pendidikan Siswa Madrasah*. Paper. Diakses 2 Juni 2010 dari <http://pendis.depag.go.id/file/dokumen/analisis200801.pdf>
- Arbo, P dan Benneworth, P. (2007). *Understanding the Regional Contribution of Higher Education Institutions: A Literature Review*. Research Report.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Reneka Cipta.
- Babatunde dan Adefabi (2005) *Long Run Relationship between Education and Economic Growth in Nigeria: Evidence from the Johansen's Cointegration Approach*. Paper presented at the Regional Conference on Education in West Africa: Constraints and Opportunities Dakar, Senegal. <http://www.saga.cornell.edu/saga/educconf/babatunde.pdf>
- Badan Pusat Statistik (2006). *Kabupaten Brebes Dalam Angka Tahun 2006*. Brebes.
- Badan Pusat Statistik (2006). *Indikator Ekonomi Kabupaten Brebes Tahun 2006*. Brebes.
- Bagdan, Robert C dan Sari Knopp Biklen. 1990. *Riset Kualitatif untuk Pendidikan: Pengantar ke Teori dan Metode*. Alih Bahasa Munandir. Jakarta: (PAU – PPA) Universitas Terbuka.
- Bagdan dan Biklen dalam Munandir (1990),
- Balitbang Depdiknas (2006), *Statistik dan Indikator Pendidikan Menurut Jenis Sekolah Tahun 2005-2006*. Depdiknas, Brebes.
- Bappeda Kabupaten Brebes. (2004). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Brebes Tahun 2004*. Brebes.
- Bappeda dan BPS Kabupaten Brebes (2006) *Kabupaten Brebes Dalam Angka 2006*. Brebes
- Catanese, Snyder, Anthony J, Snyder dan James C ; Terjemahan Susongko, (1988). *Pengantar Perencanaan Kota*, Airlangga, Jakarta.
- Chapin, F. Stuart (1957). *Urban Land Use Planning*, Harper & Brothers New York.

- Clayton (Baene, 1986:142), J.A. Toepfler, C.F dan Alessi, S.J (1990) *Curriculum, Planning and Developing*. Toronto : Allyn an Bacon, Inc.
- Depdiknas, (2006), *Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2008-2013*, Depdiknas, Jakarta.
- Dermoredjo, K. Sakyanu dan Noekman, Khairina. 2001. *Analisis Penentuan Indikator Utama Pembangunan Sektor Pertanian di Indonesia: Pendekatan Analisis Komponen Utama*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor. Diakses 4 Juni 2009 dari <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/%289%29%20soca-satyaknu%20dermoredjo-indikator%20pemb%20pert%281%29.pdf>
- Dinas P dan K Kabupaten Brebes (2006). *Pendidikan Di Kabupaten Brebes, Sebuah Deskripsi Tahun 2006*. Brebes.
- Dinas P dan K Kabupaten Brebes, (2006). *Statistik Pendidikan 2006*. Brebes.
- Dinas P dan K Kabupaten Brebes (2006). *Profil Pendidikan 2006*. Brebes.
- Dirjen Penataan Ruang, (2002). *Pengembangan Wilayah dan Kawasan Perkotaan Dalam Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*.
- Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, 2002.(2003). *Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Gomes, Faustini C. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Andi Yogyakarta.
- Golany, (1976), Gedeon, (1978). *Urban Planning for Arid Zones*, John Wiley & Sons New York.
- Kilpatrick, S (2004). *Education and training institutions: building social capital for regional development*. Research and Learning in Regional Australia, University of Tasmania, Australia. http://www.btre.gov.au/publications/92/Files/s_kilpatrick.pdf
- Marzuki, (1977:81). *Metodologi Riset*, BPFE, UII, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Natzir (2003:175), *Metode Penelitian*. Ghalia, Indonesia.

- Neil H Timm (1975), *Multivariate Analysis, With Applications in Education and Psychology*, Unyversity of Pittsburgh. Pittsburgh.
- Pemerintah Kabupaten Brebes (2007), *Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kabupaten Brebes 2008-2013*, Brebes.
- Rencana Strategi Nasional Depdiknas, 2005 (Renstranas Depdiknas 2005-2011)
- Popescu, C.C., Diaconu. (2009). *The Relatinship Between The Level of Education and The Development State of A Country*.
http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/37_E06_PopescuDiaconu.pdf
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun (2008 – 2027), Brebes.
- Riyadi, M.M.D. (2000). *Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Wilayah*. Paper disampaikan pada Acara Diseminasi dan Diskusi Program-Program Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah, Hotel Novotel, Bogor, 15-16 Mei 2000
- Salisbury S David (1996) *Five Tecnology in Educational Change*, New Jersey : Englewood Cliffs.
- Soemartini. (2008). *Principal Component Analysis (PCA) sebagai Salah Satu Meode Untuk Mengatasi Masalah Multikolinearitas*. Bandung, Universitas Padjadjaran. Diakses 4 Juni 2010 dari <http://elmurobbie.files.wordpress.com/2009/06/principal-component-analysis-pca2.pdf>
- Song Seng, L. (2007). *Vocational Technical Education and Economic Developmenet- The Singapore Experience*. ITE Paper No 9, 2007.
- Slamet, PH, 1994 *16 Teori Pendidikan Kejuruan dalam Prosser and Allen, 1925*.
- Subhash Sharma, *Applied Multivariate Techniques*, John Wiley & Sons, Inc. University of South Carolina, Carolina.
- Supriadi, (2002). *Sejarah Pendidikan Teknik di Indonesia, Membangun Manusia Produktip*. Depdiknas, Jakarta.
- Surahmad Winarno, (1989). *Pengantar Penelitian Ilmiah, Edisi 8*, Tarsito. Bandung.
- Suryadi, Acc, (1995). *Relevansi Pendidikan*, Penerbit Balitbang Depdikbud. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 1999. dan Juklak. 2000.
Jakarta: Dihimpun oleh Sinar Grafika.

Zamroni, Dr. 2002. *Penyelenggaraan School Reform Dalam Konteks MPMBS.*
Departemen Pendidikan Nasional: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.

KUESIONER PENELITIAN

" PENGEMBANGAN SEKOLAH KEJURUAN BERBASIS POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN BREBES "

Kata Pengantar

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Teknik Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Kelas Diknas di Universitas Diponegoro Semarang adalah penyusunan tesis, untuk itu judul yang kami pilih adalah : ” **Pengembangan Sekolah Kejuruan Berbasis Potensi Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Brebes** ”. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk kelengkapan data-data, informasi dan aspirasi tentang situasi, kondisi, perkembangan serta kebijakan yang ada di Kabupaten Brebes saat lalu, sekarang dan yang akan datang untuk digunakan sebagai input data penelitian yang aktual.

Dengan data penelitian yang kami peroleh akan digunakan untuk analisis potensi wilayah, digunakan sebagai dasar pengembangan sekolah kejuruan di Kabupaten Brebes.

Faktor yang sangat penting untuk keberhasilan penelitian ini adalah data yang lengkap dan akurat. Untuk itu diharapkan Bapak/Ibu/ Sdr. dengan ikhlas memberikan data penelitian dan informasi melalui kuesioner ini dengan sebenarnya serta melengkapi identitas diri, kami menjamin kerahasiaan identitas Bapak/Ibu/ Sdr. Demi untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini dan tidak untuk kepentingan lain.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Peneliti
Iskandar Mirza
NIM. L4D006083

LAMPIRAN 2.

KISI-KISI SURVEI

Nama Data	Unit Data	Bentuk Data	Fokus Survey
Potensi Wilayah	Potensi Nilai Tambah Ekonomi	Sektor-sektor ekonomi potensial menjadi unggulan	Kota Brebes sebagai pusat pengembangan di wilayah utara
	Potensi Produktivitas Wilayah	Kontribusi sektor-sektor ekonomi setempat terhadap produk domestik bruto daerah	Kota Ketanggungan sebagai pusat pengembangan di wilayah tengah
	Potensi Ketenagajaan	Peluang bekerja, peluang berusaha, dan kondisi angkatan kerja setempat	Kota Bumiayu sebagai pusat pengembangan di wilayah selatan
Potensi Peserta Didik Sekolah Kejuruan		Jumlah Penduduk Usia SMK APK dan APM Siswa SMK, Aspirasi terhadap SMK, Perencanaan SMK	Kota Brebes sebagai pusat pengembangan di wilayah utara Kota Ketanggungan sebagai pusat pengembangan di wilayah tengah Kota Bumiayu sebagai pusat pengembangan di wilayah selatan
Sekolah Kejuruan		Latarbelakang Sosek Siswa Jumlah Siswa, Jumlah Lulusan, Persentase Memperoleh Pekerjaan	SMK-SMK yang ada saat ini

LAMPIRAN 3.**KISI-KISI WAWANCARA****RESPONDEN****Camat dan Aparat Pendidikan di tingkat Kecamatan**

1. Mohon dijelaskan, sektor-sektor ekonomi unggulan atau sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menjadi unggulan dari daerah ini.
2. Mohon diperinci besarnya sumbangan sektor-sektor ekonomi di daerah ini, baik terhadap produk domestik bruto kecamatan maupun kabupaten.
3. Mohon dijelaskan mengenai peluang kerja, peluang usaha, dan kondisi kenetagakerjaan di daerah ini.
4. Dari jumlah penduduk usia sekolah menengah di daerah ini, berapa banyak yang bersekolah di SMK ?
5. Ada berapa jumlah SMK
 - a. Negeri Sekolah
 - b. Swasta Sekolah
6. Apakah mereka bersekolah di SMK yang ada di daerah ini atau diluar daerah ini?
7. Apabila mereka bersekolah di SMK yang ada di luar daerah ini, seberapa jauh jarak yang mereka tempuh?
8. Apabila di daerah ini belum terdapat SMK dan masyarakat mengharapkan adanya SMK, kira-kira bidang keahlian apa yang harus disediakan oleh SMK tersebut?

KISI-KISI WAWANCARA**RESPONDEN****Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten**

1. Mohon dijelaskan, bagaimana kebijakan dan perencanaan pengembangan SMK di Kabupaten Brebes?
2. Saat ini, berapa jumlah SMK di Kabupaten Brebes? Mohon diperinci sebaran, jenis program keahlian, dan jumlah siswanya.
3. Bagaimana target pengembangan SMK lima tahun mendatang di Kabupaten Brebes?
4. Faktor-faktor apa yang menghambat pengembangan jumlah dan mutu SMK di Kabupaten Brebes?
5. Faktor-faktor potensial apa saja yang memungkinkan dikembangkannya jumlah dan mutu SMK di Kabupaten Brebes?

KISI-KISI WAWANCARA

RESPONDEN

Kepala SMK di Kabupaten Brebes

1. Mohon dijelaskan sejarah singkat dan perkembangan SMK yang Bapak/Ibu pimpin.
2. Mohon diperinci mengenai kondisi kesiswaan di SMK ini, antara lain aspek-aspek:
 - (a) Jumlah siswa
 - (b) Latar belakang sosial ekonomi siswa
 - (c) Persentase kelulusan
 - (d) Lamanya masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan
3. Mohon dijelaskan mengenai proporsi pembiayaan pendidikan di SMK ini berdasarkan sumber-sumber pemerintah, orang tua, dan sumbangan masyarakat pada umumnya.
4. Bagaimana rencana pengembangan SMK ini untuk lima tahun mendatang?
5. Berapa jumlah dunia usaha/dunia industri yang menjadi mitra SMK ini?
6. Selain jenis-jenis program keahlian yang disediakan SMK ini, menurut pendapat Bapak/Ibu, masihkah masyarakat membutuhkan SMK dengan program-program keahlian lainnya?
7. Kalau Bapak/Ibu menganggap masyarakat masih memerlukannya, program keahlian apa yang paling relevan?
8. Di daerah manakah selayaknya SMK yang lain itu harus didirikan?

LAMPIRAN 4.

KISI-KISI DOKUMENTASI

1. Bappeda Kabupaten:

Untuk memenuhi kebutuhan analisa data, mohon dokumentasi data meliputi :

- 1.1. Renstra dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten
- 1.2. Dokumen Perencanaan Tata Ruang
- 1.3. Dokumen Pembagian Wilayah Pengembangan Gambar, Risalah, Peta, dan
- 1.4. Dokumen Data Kuantitatif yang Relevan

2. Kantor BPS:

Untuk memenuhi kebutuhan analisa data, mohon dokumentasi data meliputi:

- 2.1. Kependudukan,
- 2.2. Pendidikan,
- 2.3. Sosial Ekonomi Sosial Budaya

3. Dinas Pendidikan:

Untuk memenuhi kebutuhan analisa data, mohon dokumentasi data meliputi :

- 3.1. APK dan APM Setiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten
- 3.2. APK dan APM Siswa SMK di Kabupaten
- 3.3. Renstra Pendidikan Kabupaten

LAMPIRAN 5.**ANGKET KUESIONER****RESPONDEN****Siswa Kelas 3 SMP dan MTs****Nama Sekolah** :**Alamat Sekolah** :**Petunjuk Pengisian**

1. Pertanyaan isian
Jawabanlah singkat pada titik-titik yang telah tersedia.
2. Pada pertanyaan pilihan.
 - a. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.
 - b. Beri tanda silang (X) pada huruf urutan depan jawaban yang anda pilih.
 - c. Apabila tidak ada jawaban maka jawaban ditulis pada titik-titik yang telah tersedia.

Profil Responden.

1. Nama lengkap :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jenis kelamin : L/P
4. Alamat :
5. Jarak tempuh sampai sekolah : Km. / jam/menit.
6. Kelas :
7. Nama orang tua :
8. Pekerjaan orang tua :
9. Penghasilan orang tua / bln :
10. Jumlah anggota keluarga :

Potensi Peserta Didik

1. Apakah cita-cita anda setelah selesai sekolah ?
 - a. Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Karyawan swasta

- c. Wirausaha bidang industri/jasa
 - d. Perdagangan
 - e. Lainnya
2. Pelajaran apa yang paling anda sukai ?
- a. Kelompok IPA.
 - b. Kelompok IPS.
 - c. Kelompok Bahasa.
 - d. Kelompok Ketrampilan.
 - e. Lainnya.
3. Apakah anda sekolah sambil bekerja ?
- a. Ya.
 - b. Tidak.
 - c. Kadang-kadang/sewaktu-waktu.
 - d. Bekerja yang diutamakan.
 - e. Lainnya.
4. Apakah anda tahu kemana rencana sekolah lanjutan yang dituju setelah lulus dari SMP/MTs ?
- a. Ya.
 - b. Tidak.
 - c. Belum direncanakan.
 - d. Tidak akan melanjutkan.
 - e. Lainnya.
5. Darimanakah dorongan yang anda peroleh untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan ?
- a. Diri sendiri.
 - b. Orang tua.
 - c. Teman.
 - d. Lingkungan.
 - e. Lainnya

6. Apakah anda berminat melanjutkan ke SMK ?
 - a. Ya.
 - b. Tidak.
 - c. Belum direncanakan.
 - d. Tidak akan melanjutkan.
 - e. Lainnya.

7. Apabila melanjutkan ke SMK, Program pilihan apa yang anda inginkan di SMK nanti ?
 - a. Program Kelautan.
 - b. Program Teknik Mesin / Industri
 - c. Program Ekonomi / Business.
 - d. Program Jasa / Pariwisata.
 - e. Lainnya

8. Apakah ada sekolah SMK di kota anda ?

9. Apabila ada berapa jumlahnya ? Negeri Swasta

10. Ada berapa program / jenis kejuruan yang anda ketahui ?